



**PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

---

**RENCANA STRATEGIS  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS  
KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN PROVINSI GORONTALO  
TAHUN 2023 - 2026**

**PROVINSI GORONTALO**



**PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**  
**DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

*Jln. Tengah Desa Toto Selatan Kec. Kabila Kab. Bone Bolango. Provinsi Gorontalo*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**PROVINSI GORONTALO**  
**NOMOR : 800/DKUPP/SK/ 125 //2022**

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN**  
**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**PROVINSI GORONTALO**  
**TAHUN 2023 - 2026**

**KEPALA DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**PROVINSI GORONTALO**

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan penjabaran visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, perlu disusun Rencana Strategis sebagai satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- b. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 mengamanatkan Pemerintah Daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 agar menyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPD) dan rencana strategis perangkat daerah 2023-2026;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah, Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif;
- d. bahwa Rencana Strategis dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang - Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Gubernur Gorontalo No. 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo;
14. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023- 2026;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategi (Renstra) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, dengan susunan tim seluruhnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai tugas:
1. Melakukan inventarisasi, identifikasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengolahan data dan informasi, menelaah dan menganalisis, penyesuaian dan penajaman, serta mengevaluasi bahan/materi perihal yang dibutuhkan dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
  2. Merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) sesuai tahapan dan tata cara dokumen rencana perangkat daerah berdasarkan kebijakan dan regulasi yang berlaku;
  3. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada Tanggal : 28 Januari 2022

---

KEPALA DINAS/



**RISJON K. SUNGE**  
NIP. 196909241989021001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)
2. Bapak Wakil Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo (sebagai laporan)
4. Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo
5. Inspektur Provinsi Gorontalo
6. Yang Bersangkutan
7. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR : 800/DKUPP/SK/ 125 /I/2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS  
KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI GORONTALO  
TAHUN 2023-2026

---

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

**Pengarah/ Penanggung Jawab** : Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan  
Perdagangan Provinsi Gorontalo

**Tim Penyusun** :

Ketua : Sekretaris Dinas

Wakil Ketua : 1. Kepala Bidang Koperasi  
2. Kepala Bidang UKM  
3. Kepala Bidang Perindustrian  
4. Kepala Bidang Perdagangan  
5. Kepala Balai UPTD BPSMB

Kelompok Kerja : 1. Ramli Mohune, ST, M.Si / Kasubag Umum & Kepegawaian  
2. Irnawati Masia, ST, MSi / Perencana Ahli Muda  
3. Deibi Cendra Datunsolang, SE, M.Ec.Dev / Kepala Sub Bagian  
Keuangan  
4. Julia Kinilowarsi Dama, SH, MH / Pengawas Koperasi Ahli Muda  
5. Zainal Hala, S.Sos / Pengawas Koperasi Ahli Muda  
6. Syarifudin Nasaru, SE / Pengawas Koperasi Ahli Muda  
7. Misran Yusuf, SIP, MM / Perencana Ahli Muda  
8. Jeffryanto Naue, S.IP, MM / Perencana Ahli Muda  
9. Yolanda Abdul Wahab Ishak, SE / Perencana Ahli Muda  
10. Renny Indrayani, ST, M.Si / Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan  
11. Fahmi Ihsan, ST.MM / Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan  
12. Ramlah Safei, ST / Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan  
13. Fauziah Utiahman, SH, MH / Pengawas Perdagangan Ahli Muda  
14. Rizaldy Lihawa, ST / Pengawas Perdagangan Ahli Muda  
15. Eka Widyastuti, SH / Pengawas Perdagangan Ahli Muda  
16. Triyono, STP, MM / Kasubag. Tata Usaha UTD BPSMB  
17. Sri Dewi Suma, ST, M.Eng / Kasi. Jaminan Mutu  
18. Deyvie Wardani Kadir, ST / Kasi. Pelayanan Teknis  
19. Fecky Ferdinand Arsyad, S.Kom / Pelaksana

Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada Tanggal : 28 Januari 2022

KEPALA DINAS



RISJON K. SUNGE

NIP. 196908241989021001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 ini dapat diselesaikan. Rencana Strategis ini merupakan landasan konsistensi dan kesinambungan program pembangunan ekonomi yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan operasional dalam merumuskan dan melaksanakan program pembangunannya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan sebagaimana yang tergambar pada Rencana Kerja (RENJA).

Pada tahun 2023-2026, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo melaksanakan 13 Program, 21 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan yaitu terdiri program/kegiatan di bidang koperasi, bidang UKM, bidang industri, bidang perdagangan, UPTD BPSMB dan kesekretariatan. Kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan akan sangat tergantung pada komitmen kerja dan kerjasama internal dan eksternal yang dibangun.

Dengan adanya Renstra Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo ini diharapkan menjadi acuan untuk dapat memberikan inspirasi positif dalam menghadapi dinamika pembangunan di Provinsi Gorontalo.

Kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Renstra Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026. Semoga pelaksanaan program dan kegiatan pada periode 2023-2026 berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Gorontalo, Mei 2022

KEPALA DINAS



RISION SUNGE

Pembina Utama Madya

NIP. 196909241989021001

## DAFTAR ISI

| <i>Uraian</i>   | <i>Hal</i> |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR .....  | i          |
| DAFTAR ISI .....  | ii         |
| DAFTAR TABEL .....  | iii        |
| DAFTAR GAMBAR .....   | v          |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 1          |
| A. Latar Belakang .....   | 1          |
| B. Landasan Hukum .....   | 5          |
| C. Maksud dan Tujuan .....  | 7          |
| D. Sistematika Penulisan .....  | 8          |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD .....  | 10         |
| A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD .....                                   | 10         |
| B. Sumber Daya SKPD .....   | 14         |
| C. Kinerja Pelayanan SKPD .....   | 17         |
| D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .....                            | 51         |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....                         | 55         |
| A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>Pelayanan SKPD .....     | 55         |
| B. Telaahan Visi Misi dan Program Sesuai dengan RPJPD Gorontalo<br>2007-2025 .....    | 56         |
| C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota .....                              | 57         |
| D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan<br>Hidup Strategis ..... | 69         |
| E. Penentuan Isu-Isu Strategis.....   | 71         |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....   | 75         |
| A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .....                                      | 75         |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....   | 77         |
| A. Strategi dan Kebijakan SKPD .....  | 77         |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN .....                            | 83         |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....                                   | 93         |
| BAB VIII PENUTUP.....   | 97         |

## DAFTAR TABEL

| <i>Uraian</i>   | <i>Hal</i> |
|---|------------|
| Tabel 2.1. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Jenis Kelamin Per 31 Desember 2021 .....      | 14         |
| Tabel 2.2. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2021 ..... | 15         |
| Tabel 2.3. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Golongan Per 31 Desember 2021 .....           | 16         |
| Tabel 2.4. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Eselon Per 31 Desember 2021 .....             | 17         |
| Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo .....  | 19         |
| Tabel 2.6. Perkembangan Kinerja Koperasi 2017-2021 .....  | 20         |
| Tabel 2.7. Perkembangan Jumlah Koperasi Per Kabupaten/Kota .....  | 21         |
| Tabel 2.8. Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Per Kabupaten/Kota .....   | 22         |
| Tabel 2.9. Perkembangan Jumlah Anggota, Modal, Aset, Volume Usaha dan SHU Koperasi 2017-2021 .....                    | 22         |
| Tabel 2.10. Koperasi Berprestasi Tahun 2017-2021 .....  | 23         |
| Tabel 2.11. Koperasi Berskala Besar Tahun 2021 .....  | 23         |
| Tabel 2.12. Perkembangan Realisasi KUR Tahun 2017-2021 .....  | 24         |
| Tabel 2.13. Jumlah UMKM Provinsi Gorontalo periode 2017 – 2021 .....  | 25         |
| Tabel 2.14. Perkembangan UMKM Per Kabupaten/Kota .....  | 25         |
| Tabel 2.15. Perkembangan IKM .....  | 26         |
| Tabel 2.16. Jumlah IKM Per Kabupaten Kota .....   | 27         |
| Tabel 2.17. UKM Yang Mendapat Fasilitas Export.....   | 30         |
| Tabel 2.18. Perkembangan Volume Ekspor Gorontalo .....  | 30         |
| Tabel 2.19. Perkembangan Nilai Ekspor Gorontalo .....   | 31         |
| Tabel 2.20. Rekapulasi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Provinsi Gorontalo Tahun 2021 .....                       | 33         |
| Tabel 2.21. Capaian Program Kegiatan Bidang Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo .....       | 39         |
| Tabel 2.22. Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo .....                      | 44         |

|             |   |    |
|-------------|---|----|
| Tabel 2.23. | Anggaran dan Realisasi Pendanaan SKPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo .....               | 45 |
| Tabel 3.1.  | Neraca Perdagangan 2020-2024 .....  | 59 |
| Tabel 4.1.  | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo .....          | 76 |
| Tabel 5.1.  | Strategi dan Kebijakan Bidang KUMKM .....   | 77 |
| Tabel 5.2.  | Strategi dan Kebijakan Bidang Perindustrian .....   | 77 |
| Tabel 5.3.  | Strategi dan Kebijakan Bidang Perdagangan .....   | 78 |
| Tabel 5.4.  | Strategi dan Kebijakan Bidang Pelayanan SKPD .....  | 79 |
| Tabel 5.5.  | Rumusan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran yang mengacu Pada RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 - 2022 ..... | 80 |
| Tabel 6.1   | Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan yang mengacu pada RKPD 2023-2026 .....  | 88 |
| Tabel 7.1.  | Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026 .....                      | 93 |
| Tabel 7.2.  | Indikator Kinerja Utama Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026 .....  | 93 |

**DAFTAR GAMBAR**

| <i>Uraian</i>  | <i>Hal</i> |
|--|------------|
| Gambar 1 Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....                                   | 3          |
| Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo<br>Sesuai Pergub 67 Tahun 2016 ..... | 14         |
| Gambar 3 Ketertarikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perdagangan<br>2020- 2024 .....       | 61         |
| Gambar 4 Peta Strategi Kementerian Perindustrian .....   | 63         |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tidak terlepas dari proses perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik senantiasa mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan yang telah dilakukan, kondisi internal dan eksternal organisasi, serta peluang dan hambatan yang dihadapi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran Perangkat daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan rencana strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Berdasarkan kondisi Provinsi Gorontalo dimana masa jabatan Kepala Daerah akan berakhir di tahun 2022, maka sesuai ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada Tahun 2022, bahwa Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2023-2026.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana

Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026. Sebagaimana Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021, bahwa Renstra PD Tahun 2023-2026 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

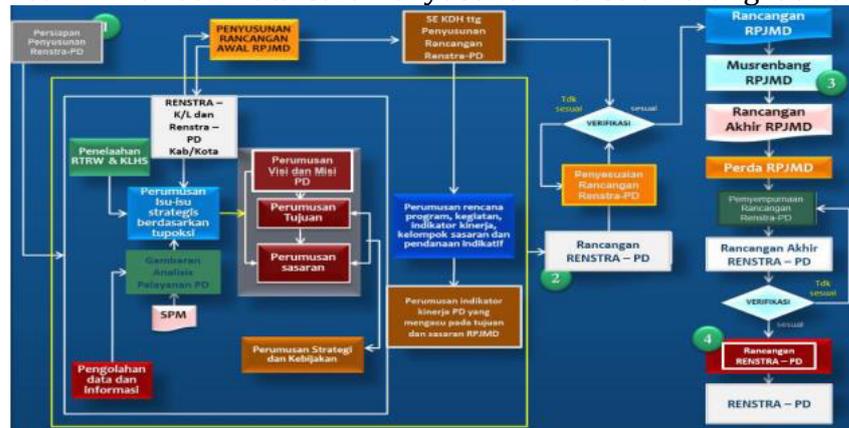
Renstra Kumperindag Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan pemerintahan bukan pelayanan dasar. Dalam penyusunan Renstra Kumperindag Provinsi Gorontalo mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.

Renstra Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan formal yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021, bahwa Renstra PD Tahun 2023-2026 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Penyusunannya dilakukan untuk menjamin kontinuitas Rencana Strategis (RENSTRA) Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2023-2026. Renstra Kumperindag juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi.

Renstra Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026. Proses penyusunan Renstra Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RKPD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan dengan mempedomani Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. sebagaimana Gambar 1.1

Gambar 1. Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Dalam pelaksanaannya, Renstra SKPD Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026 akan menjadi pedoman bagi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dan OPD Kabupaten/Kota terkait dalam merumuskan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan OPD.

Koperasi dan UMKM kedepan diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dalam rangka mendukung pertumbuhan yang berkualitas dengan sasaran utama peningkatan nilai tambah, daya saing, investasi, ekspor, dan perluasan tenaga kerja melalui penguatan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan kewirausahaan.

Keberadaan koperasi, UMKM, IKM dan perdagangan yang menyentuh kegiatan ekonomi sebagian besar masyarakat, maka pemberdayaan koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan merupakan kebijakan strategis dalam kerangka pembangunan daerah, mengingat perannya sebagai penyeimbang pemerataan dan distribusi pendapatan, penyumbang pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan kemiskinan. Dengan meningkatkan peran dan kemampuan koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan, maka kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat diharapkan akan meningkat.

Peranan sektor KUMKM termasuk industri kecil menengah dan perdagangan didalamnya semakin penting dalam perekonomian daerah, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, pentingnya sektor KUMKM terlihat dari peningkatan kontribusi sektor perdagangan, export serta sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Gorontalo.

Secara kualitas, semakin pentingnya sektor perdagangan dan sektor industri pengolahan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa yang mendukung perkembangan sektor industri, perdagangan, pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, pariwisata dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah.

Dengan memperhatikan kontribusi dan tingkat pertumbuhan sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah, maka kebijakan pembangunan koperasi, UMKM, IKM dan perdagangan penting untuk diselaraskan baik secara vertikal antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, juga secara horizontal dengan para pemangku kepentingan yang terlibat aktif didalamnya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, serta melihat peluang perkembangan koperasi, UMKM, IKM dan perdagangan di daerah yang sangat potensial kedepan.

Dokumen Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026 diharapkan dapat menjadi pedoman OPD dan pemangku kepentingan terkait dalam menjawab tiga hal mendasar :

- 1) Arah pelayanan yang akan dilaksanakan dan hendak dicapai OPD dalam empat tahun kedepan;
- 2) Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai;
- 3) Harmonisasi program dan kegiatan strategis yang perlu dilakukan dalam rangka memaksimalkan hasil, baik lintas pusat, provinsi, kabupaten/kota serta lintas sektor udan lintas pelaku.

Renstra bukan saja sebagai dokumen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan OPD, tetapi juga sekaligus sebagai sarana koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program lintas pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta lintas sektor dan lintas pelaku. Dalam kedudukannya sebagai dokumen perencanaan selama 4 tahun, Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 disusun dengan berpedoman kepada RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, serta mengacu pada Renstra K/L meliputi Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Tahun 2020 – 2024, Renstra Kementerian Perdagangan RI Tahun 2020 – 2024 dan Renstra Kementerian Perindustrian RI Tahun 2020 – 2024

dan Renstra Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026.

## **B. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan.atau stabilitas sistem keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1491);
19. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Daerah
20. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 03).

### **C. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 yaitu:

#### **a. Maksud**

Maksud penyusunan Renstra ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Kumperindag Provinsi dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 4 (empat) tahun. sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi serta memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan selang empat tahun kedepan.

#### **b. Tujuan**

- 1) Menjadi acuan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dalam menyusun, menyelaraskan pelaksanaan serta pengendalian program dan kegiatan OPD untuk kurun waktu 2023 – 2026.

- 2) Menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja OPD yang telah ditetapkan setiap tahunnya untuk kurun waktu 2023 – 2026.
- 3) Memberikan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo pada tahun 2023-2026

#### **D. Sistematika Penulisan**

Renstra Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

*BAB I PENDAHULUAN*, memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

*BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISKUMPERINDAG PROVINSI GORONTALO*, memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

*BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KUMPERINDAG PROVINSI GORONTALO*, memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kumperindag, telaahan Renstra K/L dan Renstra Kumperindag Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis

*BAB IV TUJUAN DAN SASARAN*, memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kumperindag Provinsi Gorontalo

*BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN*, memuat tentang strategi dan kebijakan pelaksanaan kinerja Kumperindag Provinsi Gorontalo

*Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN*, memuat tentang rencana program dan kegiatan, serta pendanaan pelaksanaan kinerja Kumperindag Provinsi Gorontalo selama 4 (empat) tahun.

*BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN*, memuat tentang indikator kinerja Kumperindag Provinsi Gorontalo yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dengan mempedomani Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026

*BAB VIII PENUTUP*, memuat tentang kesimpulan Rencana Strategis Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **DINAS KUMPERINDAG PROVINSI GORONTALO**

Sesuai ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada Tahun 2022, bahwa Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2023-2026.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026. Sebagaimana Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021, bahwa Renstra PD Tahun 2023-2026 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Secara umum dalam lima tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan di bidang Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan yang ditandai dengan:

1. Meningkatnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan, antara lain: DPRD, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, LSM, Asosiasi, Organisasi Profesi, lembaga dalam negeri, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya daya Saing Koperasi dan UMKM,
3. Meningkatnya Pertumbuhan IKM;
4. Meningkatnya perdagangan dalam negeri;
5. Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan

#### **A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kumperindag**

Provinsi Gorontalo merupakan daerah atau Provinsi pemekaran dari Sulawesi Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2000 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 16 Pebruari 2001. Pada awal terbentuknya Provinsi Gorontalo hanya memiliki dua daerah Kabupaten dan satu

daerah Kota, yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kota Gorontalo. Seiring dengan perkembangan daerah dan berdasarkan aspirasi masyarakat, maka dibentuk lagi dua kabupaten baru yakni Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango berdasarkan UU RI Nomor 6 Tahun 2003. Akhirnya pada tahun 2007 berdasarkan UU RI Nomor 11 Tahun 2007 disahkan pembentukan satu kabupaten lagi yaitu Kabupaten Gorontalo Utara.

Dengan demikian hingga saat ini Provinsi Gorontalo terdiri dari lima kabupaten dan satu Kota. Sebagai provinsi baru, Provinsi Gorontalo menghadapi sejumlah tantangan antara lain minimnya sumberdaya alam, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Namun dalam kurun waktu 12 tahun, Gorontalo berhasil membuktikan bahwa kondisi tersebut bukanlah penghalang bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk membangun ekonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, diatas maka Pemerintah Provinsi Gorontalo membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Dinas, Badan, Biro, Kantor, Sekretariat, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), termasuk Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

Dalam perjalanannya Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan telah mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur nama dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa perubahan nomenklatur tersebut berdasarkan Peraturan Daerah yang mendasarinya sebagai berikut:

1. Perda Nomor 84 Tahun 2001 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah bernama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Tenaga Kerja disingkat Dinas Perindagkopnaker.
2. Perda Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, berubah menjadi 2 (dua) dinas yang terdiri dari:
  - a. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi
  - b. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal
3. Perda Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah tidak mengalami perubahan:
  - a. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi
  - b. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal

4. Perda Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo berubah menjadi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.
5. Perda No. 12 Tahun 2013, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo berubah menjadi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan hingga sekarang.
6. Peraturan Gubernur Gorontalo No. 67 Tahun 2016 Tentang Tugas Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

### **1. Tugas Pokok SKPD**

Berdasarkan Bab II Pasal 3 Peraturan Gubernur Gorontalo No. 67 Tahun 2016 Tentang Tugas Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Bidang Koperasi, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), Perindustrian dan Perdagangan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Tugas tersebut di atas menjadi tanggung jawab seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, guna menyelesaikan dan menindaklanjuti pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik sesuai bidang kewenangan yang dimiliki, yang dilandasi dengan 5 (lima) Nilai Budaya Kerja, yakni :

- a. Inovasi (*Innovation*)
- b. Kerjasama Tim (*Team Work*)
- c. Membangun Kepercayaan Masyarakat (*Trust Worthiness*)
- d. Membangun Kesejahteraan Masyarakat (*Prosperity*) dan
- e. Cepat (*Speed*).

### **2. Fungsi SKPD**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

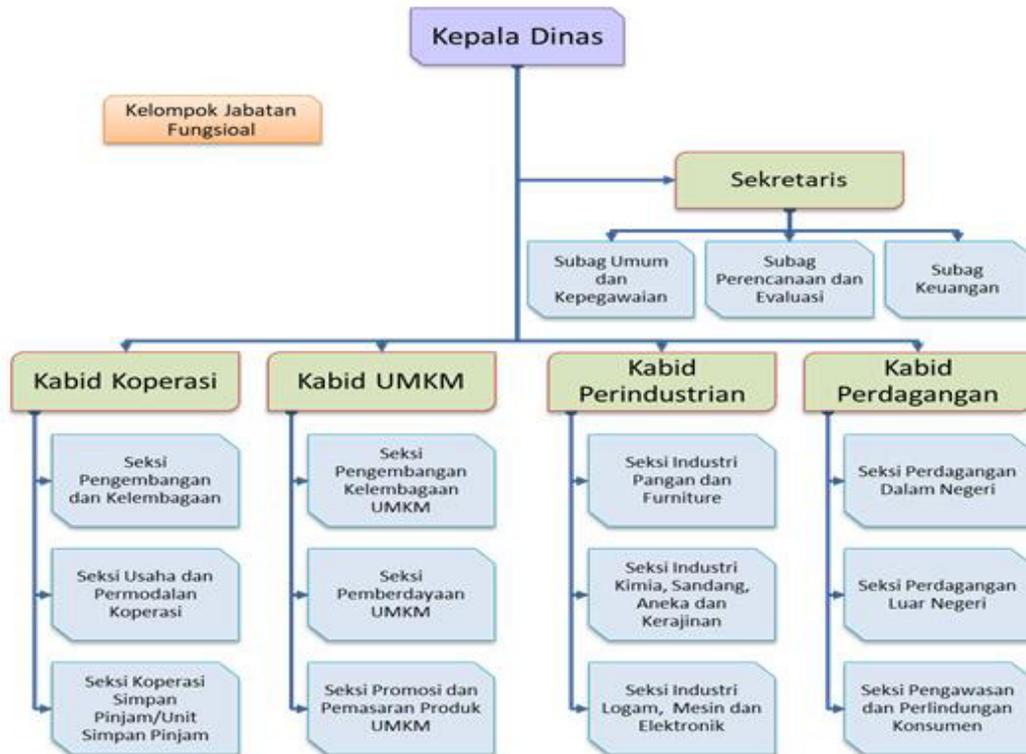
- a. perumusan dan penetapan kebijakan peningkatan di bidang kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelayanan di bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
- d. koordinasi dan pelaksanaan bimbingan teknis dan workshop di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo;
- f. pengelolaan barang milik Negara/Daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo; dan
- g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

### **3. Struktur Organisasi SKPD**

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,, Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Koperasi;
- d. Bidang Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM);
- e. Bidang Perindustrian;
- f. Bidang Perdagangan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lebih lengkapnya, struktur organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Sesuai Pergub 67 Tahun 2016

## B. Sumber Daya Kumperindag Provinsi Gorontalo

### a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kondisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Per 31 Desember 2021 berjumlah 84 orang, dan juga terdapat pegawai PTT APBD/APBN sebanyak 32 orang, dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Jenis Kelamin

Tabel 2.1 Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Jenis Kelamin Per 31 Desember 2021

| No.           | Unit Organisasi    | Laki - Laki | Perempuan | Jumlah    |
|---------------|--------------------|-------------|-----------|-----------|
| 1             | Sekretariat        | 10          | 8         | 18        |
| 2             | Subdin Koperasi    | 5           | 5         | 10        |
| 3             | Subdin UMKM        | 4           | 7         | 11        |
| 4             | Subdin Industri    | 7           | 6         | 13        |
| 5             | Subdin Perdagangan | 7           | 8         | 15        |
| 6             | UPTD BPSMB         | 6           | 11        | 17        |
| <b>JUMLAH</b> |                    | <b>39</b>   | <b>45</b> | <b>84</b> |

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, 2021

Data diatas menunjukkan proporsi pegawai di lingkup Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo lebih didominasi oleh pegawai perempuan dibandingkan dengan pegawai laki-laki. Dimana Jumlah pegawai perempuan mencapai 53,57% sedangkan pegawai laki-laki 46,42 %. Konsentrasi pegawai terbanyak di bagian Sekretariat sebanyak 20 orang, kemudian diikuti oleh UPTD BPSMB 16 Orang, Bidang perdagangan berjumlah masing-masing 15 orang.

Berdasarkan proporsi tersebut diatas, maka penyebaran dan jumlah pegawai di Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo telah memenuhi unsur kesetaraan gender dalam MDG's, di mana ada keseimbangan antara jumlah pegawai perempuan dan laki-laki.

## 2. Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2 Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2021

| No            | Unit Organisasi    | SD       | SMP      | SMA       | D 1,2,3   | S1        | S2        | Jumlah    |
|---------------|--------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1             | Sekretariat        | -        | -        | 4         | 3         | 6         | 5         | 18        |
| 2             | Subdin Koperasi    | -        | 1        | 1         | 2         | 4         | 2         | 10        |
| 3             | Subdin UMKM        | -        | -        | 2         | 2         | 3         | 4         | 11        |
| 4             | Subdin Industri    | -        | -        | 2         | 2         | 5         | 4         | 13        |
| 5             | Subdin Perdagangan | -        | -        | 4         | 1         | 8         | 2         | 15        |
| 6             | UPTD BPSMB         | -        | -        | 2         | 2         | 10        | 3         | 17        |
| <b>JUMLAH</b> |                    | <b>-</b> | <b>1</b> | <b>15</b> | <b>12</b> | <b>36</b> | <b>20</b> | <b>84</b> |

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, 2021

Data diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tertinggi di Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo adalah jenjang S1 dan tidak ada pegawai yang berpendidikan SD. Adapun keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan di Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menunjukkan 22,99 berpendidikan magister S2, naik dibanding tahun 2020 syang sebesar 23,81%. Pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) sebesar 42,86% , Pendidikan D1, D2 dan D3 sebanyak 14,28%, dan pendidikan SMA sebesar 17.86% dan SMP sebanyak 1,19%.

Berdasarkan data tersebut diatas maka pengembangan SDM Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo masih diperlukan dalam rangka penyiapan

SDM yang handal dan professional, serta mendorong pegawai yang berpendidikan setara SMA dan Diploma untuk mengikuti pendidikan S1 sesuai keahlian. Meskipun telah terlihat adanya peningkatan dari pendidikan jenjang s1 ke S2.

Upaya meningkatkan jumlah PNS dengan kualifikasi jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus diikuti pula dengan upaya yang sistimatis terhadap kesesuaian disiplin ilmu dengan tupoksi SKPD. Dengan begitu, pencapaian kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dapat ditingkatkan pada masa-masa yang akan datang.

### 3. Keadaan Pegawai Menurut Golongan

Adapun keadaan pegawai Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

*Tabel 2.3 Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menurut Golongan Per 31 Desember 2021*

| No           | Unit Organisasi      | Golongan |           |           |           | Jumlah    |
|--------------|----------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|              |                      | I        | II        | III       | IV        |           |
| 1            | Sekretariat          |          | 4         | 8         | 6         | 18        |
| 2            | Subdin Koperasi      | -        | 2         | 6         | 2         | 10        |
| 3            | Subdin UMKM          | -        | 1         | 8         | 2         | 11        |
| 4            | Subdin Perindustrian | -        | 2         | 7         | 4         | 13        |
| 5            | Subdin Perdagangan   | -        | 4         | 9         | 2         | 15        |
| 6            | UPTD BPSMB           | -        | 2         | 13        | 2         | 17        |
| <b>TOTAL</b> |                      | -        | <b>15</b> | <b>51</b> | <b>18</b> | <b>84</b> |

*Sumber : Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, 2021*

Berdasarkan tabel diatas maka keadaan pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo berdasarkan Golongan terdiri dari Golongan II sebesar 17.86%, Golongan III sebesar 60.71% dan 21,43 % golongan IV

### 4. Keadaan Pegawai Menurut Eselon

Untuk pegawai Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Eselon Per 31 Desember 2021

|              | Unit Organisasi      | Eselon   |          |          | Pejabat Fungsional | Staf      | Jumlah    |
|--------------|----------------------|----------|----------|----------|--------------------|-----------|-----------|
|              |                      | II       | III      | IV       |                    |           |           |
| 1            | Sekretariat          | I        | I        | 2        | 1                  | 13        | 18        |
| 2            | Subdin Koperasi      | -        | 1        | -        | 3                  | 6         | 10        |
| 3            | Subdin UMKM          | -        | 1        | -        | 3                  | 7         | 11        |
| 4            | Subdin Perindustrian | -        | 1        | -        | 3                  | 9         | 13        |
| 5            | Subdin Perdagangan   | -        | 1        | -        | 3                  | 11        | 15        |
| 6            | UPTD BPSMB           | -        | 1        | 3        | 7                  | 6         | 17        |
| <b>TOTAL</b> |                      | <b>1</b> | <b>6</b> | <b>5</b> | <b>20</b>          | <b>52</b> | <b>84</b> |

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, 2021

Keadaan pegawai menurut eselon menunjukkan jumlah pejabat struktural yang mengisi struktur organisasi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo urusan wajib dengan komposisi pejabat eselon II sebanyak 1 orang (1,2%), pejabat eselon III berjumlah 6 orang atau 7,14 % dan pejabat eselon IV berjumlah 5 orang atau 5,95%. Dari komposisi ini terlihat bahwa tenaga atau pejabat fungsional di lingkup Dinas Kumperindag pada urusan Koperasi & UKM tersedia sebanyak 20 orang untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi .

#### b. Aset

Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan Kumperindag Provinsi Gorontalo adalah tanah dan bangunan kantor seluas 15.424 m<sup>2</sup>, Tanah dan bangunan Laboratorium (BPSMB) seluas 8.769 m<sup>2</sup>, Gedung Pusat Promosi (Gedung Kantor Dinas Kopperindag Provinsi) seluas 15.242 m<sup>2</sup>, Gedung Industri Agro Terpadu (KIAT), Kendaraan Dinas Roda Dua/Motor sebanyak 22 unit, kendaraan dinas plat merah/non KDO sebanyak 7 unit, ruang rapat yang memadai selain itu juga terdapat aset berupa alat perlengkapan kantor. *(terlampir)*

### C. Kinerja Pelayanan Kumperindag Provinsi Gorontalo

Kinerja pelayanan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo yang dimaksud adalah pencapaian indikator kinerja sasaran OPD sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017 sebagai penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022.

### **1. Pencapaian Kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2021**

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2017– 2022, terdapat 5 (lima) sasaran strategis Kumperindag yaitu:

- a. Meningkatnya Koperasi Sehat
- b. Meningkatnya Jumlah UKM Naik Kelas
- c. Meningkatnya Pertumbuhan IKM
- d. Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri
- e. Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan

Sasaramn Strategis ini diukur melalui 5 (lima) indikator sasaran yaitu :

- a. Persentase Koperasi Sehat
- b. Rata-Rata UKM Naik Kelas
- c. Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja IKM
- d. Laju Inflasi harga Terhadap Kemampuan Daya Beli Masyarakat
- e. Persentase Barang beredar Sesuai ketentuan

Adapun Kinerja pelayanan Dinas Kumperindag Tahun 2017 – 2021 akan diuraikan dalam 2 (dua) bagian, yakni *Pertama*, capaian kinerja berdasarkan sasaran RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022, dan *Kedua*, capaian kinerja pembangunan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.

- a. Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2021

Berikut uraian capaian kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo selang tahun 2017 – 2021 :

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Berdasarkan Sasaran RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017–2021

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017) | Target Renstra SKPD Tahun Ke |        |        |        | Relisasi Capaian Tahun Ke |        |        |        | Rasio Capaian Tahun Ke |      |      |      |
|----|--|-----------------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------|--------|--------|--------|------------------------|------|------|------|
|    |  |                                   | 2018                         | 2019   | 2020   | 2021   | 2018                      | 2019   | 2020   | 2021   | 1                      | 2    | 3    | 4    |
| 1  | Jumlah Koperasi Aktif                          | 658 Koperasi                      | 668                          | 678    | 693    | 708    | 840                       | 866    | 907    | 957    | 1,26                   | 1,28 | 1,31 | 1,35 |
| 2  | Jumlah Koperasi Berkualitas                    | 15 Koperasi                       | 10                           | 10     | 10     | 10     | -                         | -      | -      | 10     | -                      | -    | -    | 1    |
| 3  | Jumlah Koperasi Berprestasi                    | 10 Koperasi                       | 10                           | 10     | 10     | 10     | 6                         | 6      | -      | 10     | 0,6                    | 0,6  | -    | 1    |
| 4  | Jumlah UKM yang dibina/naik kelas              | 20 UKM                            | 50                           | 50     | 50     | 50     | 60                        | 70     | 50     | 75     | 1,2                    | 1,4  | 1    | 1,5  |
| 5  | Jumlah Perdagangan antar Pulau                 | 2400 Kali                         | 2.640                        | 2.880  | 3.120  | 3.360  | 3.033                     | 3.308  | 3.553  | 3.732  | 1,15                   | 1,15 | 1,14 | 1,11 |
| 6  | Jumlah Eksport                                 | 6 Komoditi                        | 7                            | 8      | 9      | 10     | 7                         | 8      | 13     | 11     | 1                      | 1    | 1,44 | 1,1  |
| 7  | Jumlah Sertifikasi Mutu Barang                 | 20 Sertifikat                     | 3                            | 3      | 3      | 3      | 3                         | -      | 8      | 3      | 1                      | -    | 2,67 | 1    |
| 8  | Jumlah IKM yang Dibina                         | 14.339 IKM                        | 14.539                       | 14.739 | 14.939 | 15.139 | 14.886                    | 15.000 | 15.226 | 15.555 | 1,02                   | 1,02 | 1,02 | 1,02 |

**b. Capaian Kinerja Pembangunan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo**

Dalam rangka pembangunan daerah di bidang Koperasi, perindustrian dan perdagangan yang bertanggung jawab, efektif dan efisien, maka diperlukan sinergi dan interaksi yang konstruktif antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Dinas Kumperindag Provinsi melalui rencana strategis tahun 2017-2022 menetapkan visi “Percepatan Pembangunan Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan yang Berdaya Saing”. Dengan visi tersebut maka capaian kinerja pembangunan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

- ***Bidang Koperasi***

Kebijakan pada urusan koperasi adalah penguatan kelembagaan, pembinaan dan pengembangan koperasi melalui peningkatan SDM. Tujuannya adalah peningkatan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Dalam menunjang hal tersebut , program yang dilaksanakan meliputi Proghram Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.

Pada Tahun 2021 total koperasi aktif mencapai 957 koperasi aktif dari target 708 koperasi aktif dan target jumlah koperasi berprestasi sebanyak 10 koperasi juga tercapai ditahun 2021.

Perkembangan Koperasi di Provinsi Gorontalo menunjukkan kinerja positif (tabel 2.6). Periode 2017 hingga 2021 jumlah koperasi di Provinsi Gorontalo terus meningkat. Pada kondisi akhir tahun 2017 jumlah koperasi tercatat sebanyak 1.258 unit dan meningkat menjadi 1.387 unit Tahun 2021, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

*Tabel 2.6. Perkembangan Kinerja Koperasi 2017-2021*

| <b>URAIAN</b>                      | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jumlah Koperasi Aktif (unit)       | 717         | 840         | 866         | 907         | 957         |
| Jumlah Koperasi Tidak Aktif (unit) | 541         | 442         | 438         | 430         | 430         |
| Total Koperasi                     | 1.258       | 1.282       | 1.304       | 1.337       | 1.387       |
| Jumlah Anggota                     | 136.912     | 140.874     | 138.627     | 140.296     | 142.713     |

| <b>URAIAN</b>               | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| RAT (unit)                  | 275         | 252         | 245         | 227         | 221         |
| Jumlah Manager (orang)      | 339         | 352         | 338         | 356         | 350         |
| Jumlah Karyawan (orang)     | 2.371       | 2.393       | 2.306       | 2.170       | 2.173       |
| Jumlah Asset (Rp. 000)      | 437.066.070 | 478.598.338 | 477.904.376 | 517.257.795 | 551.366.521 |
| Modal Sendiri (Rp. 000)     | 189.470.117 | 230.562.545 | 230.906.015 | 269.839.272 | 306.039.971 |
| Jumlah Modal Luar (Rp. 000) | 202.755.646 | 220.738.144 | 205.005.923 | 208.706.686 | 209.392.718 |
| Volume Usaha (Rp. 000)      | 418.769.203 | 375.350.749 | 370.439.880 | 398.344.178 | 414.931.109 |
| SHU (Rp. 000)               | 25.142.758  | 25.513.205  | 26.152.270  | 28.632.564  | 28.393.614  |

Sumber : Data olahan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo , 2022

Tabel 2.7. Perkembangan Jumlah Koperasi Per Kabupaten/Kota

| <b>No</b>     | <b>Kabupaten/kota</b> | <b>2017</b>  | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  | <b>2021</b>  |
|---------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1             | Kota Gorontalo        | 300          | 304          | 308          | 315          | 326          |
| 2             | Kab. Gorontalo        | 400          | 405          | 413          | 421          | 422          |
| 3             | Kab. Boalemo          | 143          | 143          | 145          | 147          | 153          |
| 4             | Kab. Pohuwato         | 123          | 126          | 129          | 130          | 138          |
| 5             | Kab. Bone Bolango     | 135          | 140          | 143          | 149          | 157          |
| 6             | Kab. Gorontalo Utara  | 113          | 114          | 114          | 120          | 126          |
| 7             | Provinsi Gorontalo    | 44           | 50           | 52           | 55           | 65           |
| <b>JUMLAH</b> |                       | <b>1.258</b> | <b>1.282</b> | <b>1.304</b> | <b>1.337</b> | <b>1.387</b> |

Sumber : Data olahan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2022

Dari total 1258 koperasi ditahun akhir 2017 sebesar 57 persen merupakan koperasi aktif dan 43 persen koperasi tidak aktif. Ditahun 2018 jumlah total koperasi 1282 Koperasi dengan persentase untuk koperasi aktif sebesar 65,52 persen dan koperasi tidak aktif sebesar 34,48 persen. Ditahun 2021 jumlah koperasi tidak aktif 31 persen dari total koperasi dan 69 persen koperasi aktif dari total koperasi. Untuk jumlah koperasi tidak aktif, terlihat adanya penurunan persentase jumlah koperasi tidak aktif ditahun 2021 jika dibanding tahun 2018 hal ini karena adanya beberapa uapaya antara lain revitalisasi koperasi dan pembinaan koperasi di kabupaten/Kota

Tabel 2.8. Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Per Kabupaten/Kota

| No            | Kabupaten/kota       | 2018       |             | 2021       |             | % kenaikan    |                |
|---------------|----------------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|----------------|
|               |                      | Aktif      | Tidak aktif | Aktif      | Tidak aktif | Aktif         | Tidak aktif    |
| 1             | Kota Gorontalo       | 157        | 147         | 180        | 146         | 15,00         | -0,68          |
| 2             | Kab. Gorontalo       | 329        | 76          | 346        | 76          | 4,91          | 0,00           |
| 3             | Kab. Boalemo         | 82         | 61          | 92         | 61          | 10,87         | 0,00           |
| 4             | Kab. Pohuwato        | 88         | 38          | 101        | 37          | 12,87         | -2,70          |
| 5             | Kab. Bone Bolango    | 83         | 57          | 100        | 57          | 17,00         | 0,00           |
| 6             | Kab. Gorontalo Utara | 64         | 50          | 86         | 40          | 25,58         | -25,00         |
| 7             | Provinsi Gorontalo   | 37         | 13          | 52         | 13          | 28,85         | 0,00           |
| <b>Jumlah</b> |                      | <b>840</b> | <b>442</b>  | <b>957</b> | <b>430</b>  | <b>115,08</b> | <b>-27,703</b> |

Sumber : Data olahan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2021

Peran koperasi terhadap pembangunan dan perekonomian daerah juga terlihat dari sisi jumlah anggota, perkembangan modal, aset, koperasi sebagaimana ditunjukkan oleh tabel dibawah ini.

Tabel 2.9. Perkembangan Jumlah Anggota, Modal, Aset, Volume Usaha dan SHU Koperasi 2017-2021

| Indikator               | (kondisi akhir)<br>2017 | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jumlah Anggota (orang)  | 136.912                 | 140.874     | 138.627     | 140.296     | 142.713     |
| Modal Sendiri (Rp. 000) | 189.470.117             | 230.562.545 | 230.906.015 | 269.839.272 | 306.039.971 |
| Modal Luar (Rp. 000)    | 202.755.646             | 220.738.144 | 205.005.923 | 208.706.686 | 209.392.718 |
| Asset (Rp.000)          | 437.066.070             | 478.598.338 | 477.904.376 | 517.257.795 | 551.366.521 |
| Volume Usaha (Rp. 000)  | 418.769.203             | 375.350.749 | 370.439.880 | 398.344.178 | 414.931.109 |
| SHU (Rp. 000)           | 25.142.758              | 25.513.205  | 26.152.270  | 28.632.564  | 28.393.614  |

Sumber : Data olahan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo 2021

Data diatas menunjukkan perkembangan jumlah anggota, permodalan, asset, volume usaha dan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi selang tahun 2018–2021 mengalami fluktuasi namun secara umum semua indikator tersebut mengalami peningkatan. Untuk jumlah anggota koperasi mengalami kenaikan, dimana selang tahun 2018–2021 jumlah anggota koperasi mengalami kenaikan dari 140.874 orang ditahun 2018 naik menjadi 142.713 ditahun 2021 (1,31%) hal ini dikarenakan adanya kenaikan pada jumlah koperasi baru yang berpengaruh pada kenaikan jumlah anggota. Adapun dengan modal sendiri meningkat dari Rp. 230,56 milyar menjadi Rp. 306,03 milyar atau naik sebesar 32,74%, modal luar dari Rp. 220,73 milyar di tahun 2018 menjadi Rp. 209,39 milyar di tahun 2021 atau turun sebesar -5.14%, begitupun asset dari Rp. 478.59

milyar menjadi Rp. 551,36 milyar di tahun 2021 atau naik 15,2%, dan untuk volume usaha mengalami kenaikan sebesar 10.54 % yaitu dari Rp. 375,35 milyar ditahun 2018 menjadi Rp. 414,93 milyar ditahun 2021 dan total SHU mengalami kenaikan dari Rp. 25,51 milyar menjadi Rp. 28,39 milyar atau naik sebesar 11,29%.

Selang tahun 2017-2021, terdapat 33 Koperasi berprestasi. Adapun parameter penilaian koperasi berprestasi yaitu:

- a. Aspek Organisasi mencakup penerapan jati diri, nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip koperasi
- b. Aspek tata laksana dan manajemen
- c. Aspek Produktifitas
- d. Aspek Manfaat dan dampak
- e. Aspek pengembangan daya saing

*Tabel 2.10. Koperasi Berprestasi Tahun 2017-2021*

|                      | 2017        | 2018       | 2019       | 2021        |
|----------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| Koperasi Berprestasi | 11 Koperasi | 6 Koperasi | 6 Koperasi | 10 Koperasi |

Disamping itu, selang tahun 2012 - 2017, Provinsi Gorontalo telah memiliki 5 koperasi berskala besar tingkat nasional sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

*Tabel 2.11. Koperasi Berskala Besar Tahun 2021*

| No | Nama Koperasi  | Jumlah Anggota (orang) | Total Aset Rp. (000) | Omset Rp. (000)     | SHU Rp. (000)      |
|----|--|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 1  | KSU Mekar Jaya, Kota Gorontalo, Kec. Kota Tengah             | 2.921                  | 21.052.321           | 14.481.643          | 679.025            |
| 2  | KSP. KPKD. Kab. Gorontalo, Kec. Limboto                      | 1.478                  | 12.818.369           | 8.892.325           | 137.394            |
| 3  | KPRI Eka Prasetya, Kab. Gorontalo. Kec. Limboto              | 1.259                  | 3.589.632            | 4.308.297           | 55.244             |
| 4  | KPRI Wiyowa  | 784                    | 4.284.632.9          | 2.137.191.6         | 137.453.7          |
| 5  | Kop. Tebu Rakyat Mitra Bangkit, Kab. Boalemo, Kec. Paguyaman | 212                    | 10.289.425           | 2.774.113           | 30.297             |
|    | <b>JUMLAH</b>  | <b>6654</b>            | <b>52.034.379,9</b>  | <b>32.593.569,6</b> | <b>1.039.413,7</b> |

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, 2021

Keberadaan perbankan di daerah diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi sebagai bentuk penguatan modal usaha melalui skim kredit. Salah satu skim yang sangat diminati adalah Kredit Usaha Rakyat disingkat KUR. KUR diarahkan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki kelayakan usaha namun tidak bankable dikarenakan tidak adanya asset yang bisa dijadikan jaminan. Penyaluran KUR di Gorontalo hingga tahun 2021 telah mencapai Rp. 1.374.360.420,-. Dimana berdasarkan Data Sistem Informasi Kredit Perbankan (SIKP) jumlah pelaku usaha yang mengajukan kredit sebanyak 52.247 yang disalurkan kepada 52.247 KUMKM se Provinsi Gorontalo.

Tabel 2.12. Perkembangan Realisasi KUR Tahun 2018-2021

| No           | Sektor Ekonomi                               | Realisasi KUR      |               |                    |               |                    |               |                      |               |
|--------------|--|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------|
|              |  | 2018               |               | 2019               |               | 2020               |               | 2021                 |               |
|              |  | Nilai (Rp .000)    | Debitur       | Nilai (Rp .000)    | Debitur       | Nilai (Rp .000)    | Debitur       | Nilai (Rp .000)      | Debitur       |
| 1            | Pertanian, Perburuan dan Kehutanan           | 162.057.850        | 8.512         | 193.999.310        | 9.591         | 247.838.580        | 11.438        | 436.478.452          | 18.285        |
| 2            | Perikanan                                    | 15.101.500         | 810           | 24.973.710         | 1.271         | 31.199.850         | 1.437         | 57.717.150           | 2.711         |
| 3            | Industri Pengolahan                          | 26.456.200         | 908           | 60.755.100         | 2.639         | 79.611.876         | 3.258         | 117.211.950          | 4.112         |
| 4            | Konstruksi                                   | 200.000            | 1             | 177.000            | 8             | 107.000            | 5             | 755.000              | 9             |
| 5            | Perdagangan Besar dan Ecer                   | 345.926.601        | 16.863        | 295.240.972        | 11.986        | 252.145.592        | 10.518        | 577.785.868          | 20.094        |
| 6            | Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan    | 5.955.500          | 204           | 16.046.700         | 510           | 32.369.679         | 1200          | 52.643.000           | 1.604         |
| 7            | Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi     | 31.198.900         | 1.867         | 31.844.560         | 1.799         | 19.271.900         | 992           | 25.779.000           | 1.284         |
| 8            | Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa        | 2.482.000          | 84            | 1.893.425          | 85            | 2.466.500          | 81            | 5.506.000            | 205           |
| 9            | Jasa Pendidikan                              | 47.000             | 3             | 25.000             | 1             | 420.000            | 7             | 70.000               | 2             |
| 10           | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial           | 120.000            | 6             | 1.183.000          | 60            | 3.712.000          | 97            | 3.467.000            | 71            |
| 11           | Jasa Masyarakat, Sosial Budaya, Hiburan, dll | 41.706.500         | 2.178         | 45.014.710         | 2.325         | 57.380.400         | 2.534         | 96.947.000           | 3.870         |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>631.252.051</b> | <b>31.436</b> | <b>671.153.487</b> | <b>30.275</b> | <b>726.523.377</b> | <b>31.567</b> | <b>1.374.360.420</b> | <b>52.247</b> |

Sumber : Data SIKP, Kementerian Keuangan

- **Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Untuk kebijakan di bidang UKM yaitu pengembangan kerjasamna UKM dan informasi serta pengembangan pemasaran hasil produk UKM dan pengembangan wirausaha mikro untuk naik kelas. Dengan tujuan peningkatan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Untuk menunjang tujuan tersebut didukung

oleh beberapa program yaitu Program Pemberdayaan UMKM yang antara lain kegiatannya yaitu Bimtek OSS (Online Submission System) dan bantuan bahan produksi bagi UMK pasca SHAT. Serta program Pengembangan UMKM yang dilakukan antara lain melalui kegiatan Pembinaan UMKM Naik Kelas, Kegiatan Bisnis Kelas Bagi UKM, Kegiatan Promosi Produk UKM, Pemberian Bantuan kepada UKM dan lain-lain. Adapun jumlah UKM Naik Kelas ditahun 2021 sebanyak 75 UKM Naik Kelas.

Perkembangan UMKM di Provinsi Gorontalo periode 2018-2021 jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 jumlah UMKM sebanyak 64.335 unit dan Tahun 2020 menjadi 94.829 unit, atau meningkat sebesar 47,40%, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

*Tabel 2.13. Jumlah UMKM Provinsi Gorontalo periode 2017 – 2020*

| UMKM         | (kondisi akhir) 2017 | 2018          | 2019          | 2020          |
|--------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| MIKRO        | 57.053               | 60.087        | 63.121        | 88.787        |
| KECIL        | 3.618                | 3.630         | 3.782         | 5.271         |
| MENENGAH     | 600                  | 618           | 636           | 771           |
| <b>TOTAL</b> | <b>61.271</b>        | <b>64.335</b> | <b>67.539</b> | <b>94.829</b> |

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2021

Perkembangan jumlah UMKM tersebut merupakan akumulasi dari pertumbuhan UMKM di kabupaten/kota. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

*Tabel 2.14. Perkembangan UMKM Per Kabupaten/Kota*

| Wilayah              | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kab. Gorontalo       | 33.459        | 33.548        | 33.637        | 43.559        |
| Kota Gorontalo       | 11.418        | 11.640        | 11.862        | 14.507        |
| Kab. Gorontalo Utara | 3.626         | 3.673         | 3.720         | 5.703         |
| Kab Pohuwato         | 6.530         | 6.737         | 6.944         | 11.028        |
| Kab. Boalemo         | 5.320         | 5.945         | 6.570         | 11.928        |
| Kab. Bone Bolango    | 918           | 2.792         | 4.806         | 8.104         |
| <b>Jumlah</b>        | <b>61.271</b> | <b>64.335</b> | <b>67.539</b> | <b>94.829</b> |

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo 2022

Tabel diatas menunjukkan tingkat pertumbuhan UMKM terbesar di Kabupaten Bone Bolango, dengan tingkat pertumbuhan dari tahun 2018 – 2020 mencapai 190,26%. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Boalemo sebesar 100,64%, Kabupaten Pohuwato 63,69%, Kabupaten Gorontalo Utara 55,27%, Kabupaten Gorontalo 29.84 % sedangkan Kota Gorontalo sebanyak 24,63%. Dari uraian

tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 3 tahun terakhir pertumbuhan UMKM di Provinsi Gorontalo mencapai 47,40%, Perkembangan jumlah UMKM belum diikuti dengan peningkatan produktifitas, daya saing usaha dan permodalan, sehingga UMKM di Gorontalo cenderung rentan dengan gejolak dan tekanan ekonomi, terlebih jika ada kenaikan harga bahan kebutuhan pokok.

Pada prinsipnya, perkembangan kuantitas KUMKM belum dibarengi dengan perkembangan kualitas yang dapat memberi nilai tambah yang besar bagi pelaku usaha. Hal ini disebabkan KUMKM Provinsi Gorontalo belum didukung sepenuhnya dengan permodalan yang memadai, teknologi tepat guna, dan promosi produk untuk pemasaran yang efektif serta belum didukung oleh kemitraan dalam bentuk inti-plasma, subkontrak, waralaba (*franchise*), distribusi dan keagenan, perdagangan umum, dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya, seperti usaha patungan (*joint venture*), bagi hasil.

- **Industri Kecil Menengah (IKM)**

Industri Kecil Menengah dalam peraturan Menteri 64/M-IND/PER/7/2016 yang dimaksud dengan Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Berdasarkan cabang IKM terdiri atas industri kerajinan, sandang, pangan, logam dan kimia.

Tabel 2.15. Perkembangan IKM

| No. | URAIAN                  | JUMLAH      |             |               |               |               |
|-----|-------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|     |                         | 2017        | 2018        | 2019          | 2020          | 2021          |
| 1   | INDUSTRI KECIL MENENGAH | 14.388      | 12.985      | 14.282        | 15.221        | 15.211        |
| 2   | SENTRA IKM              | 563         | -           | -             | -             | 39            |
| 3   | JUMLAH TENAGA KERJA     | 35.526      | 31.283      | 34.971        | 35.727        | 25.855        |
| 4   | NILAI INVESTASI (Rp.)   | 192.637.968 | 187.103.014 | 5.197.067.090 | 5.193.825.361 | 5.248.716.211 |
| 5   | NILAI PRODUKSI (Rp.)    | 580.300.089 | 672.012.186 | 767.899.395   | 976.894.427   | 946.172.392   |

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2021

Tabel diatas menunjukkan perkembangan IKM yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Selang tahun 2018 - 2021 pertumbuhan IKM naik

sebesar 17,14%. Demikian halnya dengan jumlah tenaga kerja, nilai investasi dan nilai produksi menunjukkan peningkatan selang tahun 2018 hingga 2021.

Adapun untuk Jumlah industri kecil menengah dan jumlah tenaga kerja mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2018 hal ini disebabkan karena kondisi pandemic covid-19 sehingga ada pengurangan terhadap jumlah tenaga kerja dan IKM di Provinsi Gorontalo Sementara untuk nilai investasi dan nilai produksi mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun 2018 yaitu sebesar 2705,25 % untuk kenaikan nilai investasi dan 40.79 % untuk nilai produksi.

Berikut data penyebaran IKM per kabupaten/kota selang 2017 – 2021 sebagaimana ditunjukkan oleh tabel dibawah ini.

*Tabel 2.16. Jumlah IKM Per Kabupaten Kota*

| No. | JUMLAH INDUSTRI KECIL MENENGAH | JUMLAH |       |       |       |       |
|-----|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|     |                                | 2017   | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| 1   | KOTA GORONTALO                 | 2.926  | 3.448 | 3.515 | 3.549 | 3.589 |
| 2   | KABUPATEN GORONTALO            | 3.442  | 3.558 | 3.928 | 4.144 | 4.301 |
| 3   | KABUPATEN BOALEMO              | 874    | 1.094 | 1.079 | 899   | 1.050 |
| 4   | KABUPATEN POHUWATO             | 1.989  | 2.035 | 2.404 | 3.042 | 2.547 |
| 5   | KABUPATEN BONE BOLANGO         | 2.664  | 2.783 | 2.842 | 2.890 | 3.018 |
| 6   | KABUPATEN GORONTALO UTARA      | 2.493  | 67    | 514   | 697   | 706   |

*Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2021*

Kebijakan pembangunan bidang industri difokuskan pada peningkatan peran IKM dalam perekonomian daerah, dengan sasaran utamanya adalah peningkatan pertumbuhan IKM. Pembangunan urusan perindustrian menjadi sangat penting karena kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan ekonomi sangat besar karena kemampuannya dalam peningkatan nilai tambah yang tinggi, serta sebagai pemicu kegiatan ekonomi lain yang berdampak ekspansif atau meluas ke berbagai sektor jasa, penyediaan bahan baku, transportasi, distribusi atau perdagangan, pariwisata dan sebagainya. Untuk itu penting untuk mendorong pembangunan sektor industri yang dimulai dari Pengembangan

Industri Kecil Menengah (IKM). Adapun kegiatan yang dilakukan diantaranya Kegiatan Workshop e-Smart dan E-Katalog bagi IKM Pangan, Pengembangan Wirausaha Baru (WUB) Pangan, Penguatan Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) dan Wira Usaha Baru dalam bentuk stimulan, fasilitasi halal bagi IKM pangan, fasilitasi kemasan bagi IKM pangan dan kerajinan. Hingga tahun 2022 jumlah IKM yang dibina telah berjumlah 15.555 IKM dimana nilai ini merupakan akumulasi dari jumlah IKM yang dibina dari tahun 2017.

- **Perdagangan**

Bidang Perdagangan merupakan salah satu sektor ekonomi yang mempunyai peran strategis terutama dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi .

Pembaangunan bidang perdagangan untuk peningaktan pengamanan stabilitas perdagangan dalam negeri dan peningkatan akses pasar luar negeri produk dan komoditi unggulan Provinsi Gorontalo. Hal ini dilakukan mellalui beberapa program kegiatabn diantaranya program stabilisasu harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, Program Pengembangan Ekspor dan Program Standarisasi dan perlindungan Konsumen.

#### **Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**

Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dilaksanakan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Program tersebut meliputi kegiatan pemantauan harga dan operasi pasar/pasar murah. Kegiatan pemantauan harga dilaksanakan rutin setiap hari untuk mengantisipasi terjadinya gejolak harga, utamanya barang kebutuhan pokok masyarakat. Gejolak/fluktuasi harga dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor antara lain tingginya permintaan (momen Hari Besar Keagamaan Nasional), terganggunya jalur distribusi dan pengaruh cuaca extrim (berkurang jumlah produk dan ketersediaan stok). Sedangkan untuk

kegiatan operasi pasar/pasar murah dilaksanakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mempermudah akses dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Jenis bahan kebutuhan pokok pada pelaksanaan operasi pasar berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Daerah meliputi :

- a. Beras
- b. Gula kristal putih bukan rafinasi
- c. Minyak goreng dalam kemasan
- d. Daging sapi
- e. Daging kerbau
- f. Tepung terigu kemasan
- g. Telur ayam ras

Jenis bahan kebutuhan pokok pada pelaksanaan operasi pasar dapat secara keseluruhan atau sebagian diantaranya dimana sasaran pelaksanaan operasi pasar adalah masyarakat atau konsumen umum. Adapun untuk jumlah pelaksanaan pasar murah di tahun 2018 sebanyak 20 kali, tahun 2019 sebanyak 85 kali, tahun 2020 sebanyak 178 kali dan di tahun 2021 sebanyak 25 kali pelaksanaan.

### ***Pengembangan Export***

Peran pelaku UKM selaku sektor riil di daerah tercermin melalui aktifitas perdagangan Gorontalo baik ekspor maupun perdagangan antar pulau. Produk-produk UMKM memiliki potensi yang sangat besar untuk menembus pasar ekspor. Dengan melakukan ekspor, UMKM berpotensi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, karena pasarnya akan menjadi semakin luas. Para UKM yang telah masuk dalam era pasar global harus memperhatikan kualitas produk. Menjadi pemain global bukan lagi menjadi pilihan, melainkan merupakan suatu keharusan bagi para pelaku usaha UKM dalam negeri untuk bisa tetap eksis di dunia perdagangan.

Sampai dengan tahun 2021 terdapat 8 (delapan) UKM yang telah mendapat fasilitas promosi melalui pameran Trade expo. UKM ini antara lain :

Tabel 2.17. UKM yang Mendapat Fasilitas Promosi

| Tahun | Nama IKM                            | Jenis Produk                     |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 2017  | IKM Briska, IKM Azzahra             | Kerajinan Karawo                 |
| 2018  | IKM Maharani, Wumula Karawo         | Pangan Olahan & kerajinan Karawo |
| 2019  | IKM Bilal Mekar, IKM Rahida Cookies | Pangan Olahan                    |
| 2021  | IKM Lembayung, IKM Bumbu Pres       | Kerajinan rotan, dan bambu       |

Sumber : Bidang Perdagangan, Diskumperindag Provinsi Gorontalo 2021

Dari UKM-UKM yang telah mengikuti pameran trade expo ini blum ada pelaku usaha/UKM yang telah menjalin kerjasama dengan pihak luar negeri hal ini karena proses ijin setiap negara yang berbeda, konsisten kualitas produk UKM, jumlah tenaga kerja yang terbatas sehingga mempengaruhi produksi dan harga produk.

Sejak tahun 2017 sekitar 80 % komoditi unggulan provinsi gorontalo didominasi dengan raw material seperti jagung molasses dan bungkil kelapa. kinerja ekspor Gorontalo ditahun 2018 untuk jagung mengalami peningkatan hal ini disebabkan harga dunia naik

Berikut data perkembangan ekspor Gorontalo tahun 2017 - 2021.

Tabel 2.18. Perkembangan Volume Ekspor Gorontalo

| NO | JENIS KOMODITI           | JUMLAH KOMODITI (KG) |             |            |            |            |
|----|--------------------------|----------------------|-------------|------------|------------|------------|
|    |                          | 2017                 | 2018        | 2019       | 2020       | 2021       |
| 1  | JAGUNG                   |                      | 103.200.000 |            | 37.100.000 |            |
| 2  | IKAN TUNA                | 4.134,26             | 13.127.000  | 796.725,43 | 65.159     | 27.225     |
| 3  | UDANG                    |                      |             |            | 31.914     |            |
| 4  | PALAM ACID OIL           |                      |             |            | 206.740    |            |
| 5  | KELAPA PARUT             |                      |             |            | 422.500    |            |
| 6  | ARANG                    |                      |             |            | 54.000     |            |
| 7  | KOPI BUBUK               |                      |             |            | 8          |            |
| 8  | KOPI BIJI                |                      |             |            | 2          |            |
| 9  | KOPRA                    |                      |             |            | 7.776.000  |            |
| 10 | CENGKEH                  |                      |             |            | 80         |            |
| 11 | FYTOMAXX VEGETABLE FRUIT |                      |             |            | 202,40     | 48         |
| 12 | MOLASES                  |                      |             | 11.427.752 | 21.700.850 | 23.861.992 |
| 13 | VCO                      |                      | 28.500.000  |            | 40.500     | 14.400     |
| 14 | BARECORE                 |                      |             | 70.848     |            |            |

| NO            | JENIS KOMODITI             | JUMLAH KOMODITI (KG) |                    |                      |                      |                   |
|---------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|               |                            | 2017                 | 2018               | 2019                 | 2020                 | 2021              |
| 15            | COCONUT                    |                      |                    | 100.000              |                      |                   |
| 16            | KAKAO                      |                      |                    | 800                  |                      |                   |
| 17            | WOODPELET                  |                      |                    | 26.000               |                      |                   |
| 18            | GULA TETES                 | 18.105.146           | 24.005.000         |                      |                      |                   |
| 19            | ARANG<br>TEMPURUNG         |                      | 12.000.000         |                      |                      |                   |
| 20            | BUNGKIL KELAPA             |                      |                    |                      |                      | 6.400.000         |
| 21            | KEPITING BAKAU             |                      |                    |                      |                      | 1.211             |
| 22            | SOZO FORMULA<br>MANGGATA 1 |                      |                    |                      |                      | 350               |
| 23            | KELAPA PARUT               |                      |                    |                      |                      | 10.241.500        |
| 24            | BRIKET ARANG               |                      |                    |                      |                      | 17.500            |
| 25            | SANTAN KELAPA              |                      |                    |                      |                      | 24.192            |
| <b>JUMLAH</b> |                            | <b>18.109.280,26</b> | <b>180.832.000</b> | <b>12.422.125,43</b> | <b>67.397.955,40</b> | <b>40.588.418</b> |

Sumber : Bidang Perdagangan, Diskumperindag Provinsi Gorontalo 2021

Tabel diatas menunjukkan adanya adanya kenaikan volume export selang tahun 2017 hingga 2021. Kondisi di tahun 2018 terjadi kenaikan volume export yang cukup tinggi hal ini disebabkan karena adanya kenaikan export jagung di tahun 2018. Adapun di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1355,7% jika dibandingkan dengan tahun 2018. Dan ditahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar -66,1%. kecenderungan adanya fluktuasi volume ekspor Gorontalo selang tahun 2017–2021 diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain penurunan permintaan negara importir, stok barang daerah, kebijakan ekspor nasional dan negara importir, dan membaiknya harga komoditi antar pulau sehingga pelaku usaha lebih memilih perdagangan antar pulau ketimbang ekspor.

Adapun data perkembangan nilai ekspor Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.19. Perkembangan Nilai Ekspor Gorontalo

| NO | JENIS KOMODITI | NILAI EKSPOR (USD) |            |              |            |         |
|----|----------------|--------------------|------------|--------------|------------|---------|
|    |                | 2017               | 2018       | 2019         | 2020       | 2021    |
| 1  | JAGUNG         |                    | 27.531.225 |              | 9.560.000  |         |
| 2  | IKAN           | 37.243,22          | 317.505    | 1.544.421,81 | 275.848,46 | 240.711 |
| 3  | UDANG          |                    |            |              | 246.110,40 |         |
| 4  | PLAM ACID OIL  |                    |            |              | 81.662,30  |         |
| 5  | KELAPA PARUT   |                    |            |              | 654.564,22 |         |
| 6  | ARANG          |                    |            |              | 57.213,79  |         |

| NO            | JENIS KOMODITI           | NILAI EKSPOR (USD)  |                   |                     |                      |                   |
|---------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|               |                          | 2017                | 2018              | 2019                | 2020                 | 2021              |
| 7             | KOPI BUBUK               |                     |                   |                     | 20,84                |                   |
| 8             | KOPI BIJI                |                     |                   |                     | 20,84                |                   |
| 9             | KOPRA                    |                     |                   |                     | 10.620.68            |                   |
| 10            | CENGKEH                  |                     |                   |                     | 689,65               |                   |
| 11            | FYTOMAXX VEGETABLE FRUIT |                     |                   |                     | 26.475               | 5.100             |
| 12            | MOLASES                  |                     |                   | 5.136.360,53        | 4.340.162            | 3.698.609         |
| 13            | VCO                      |                     | 92.070            |                     | 81.000               | 45.000            |
| 14            | BARECORE                 |                     |                   | 39.881,45           |                      |                   |
| 15            | COCONUT                  |                     |                   | 120.650             |                      |                   |
| 16            | KAKAO                    |                     |                   | 4.340,77            |                      |                   |
| 17            | WOODPELET                |                     |                   | 648                 |                      |                   |
| 18            | GULA TETES               | 1.584.200           | 1.950.045         |                     |                      |                   |
| 19            | ARANG TEMPURUNG          |                     | 1.927.500         |                     |                      |                   |
| 20            | BUNGKIL KELAPA           |                     |                   |                     |                      | 1.280.000         |
| 21            | KEPITING BAKAU           |                     |                   |                     |                      | 6.444             |
| 22            | SOZO FORMULA MANGGATA 1  |                     |                   |                     |                      | 330.000           |
| 23            | KELAPA PARUT             |                     |                   |                     |                      | 14.467.351        |
| 24            | BRIKET ARANG             |                     |                   |                     |                      | 21.000            |
| 25            | SANTAN KELAPA            |                     |                   |                     |                      | 28.985            |
| <b>Jumlah</b> |                          | <b>1,621,443,22</b> | <b>31.818.345</b> | <b>6.846.302,56</b> | <b>15.334.388,18</b> | <b>20.123.200</b> |

Sumber : Bidang Perdagangan, Diskumperindag Provinsi Gorontalo 2021

Selang tahun 2017-2021 Komoditi ekspor terbesar Gorontalo adalah Jagung Kuning dengan nilai sebesar US\$ 27,531,225 ditahun 2018 Kemudian diikuti oleh kelapa parut sebesar \$ 14.467.351,- ditahun 2021 kemudian molasses sebesar \$ 5.136.360,53 di tahun 2019. Adapun Negara tujuan ekspor Gorontalo antara lain Filipina, Japan, Singapura, Malaysia, China, Brazil, United Kingdom, Polandia, Saudi Arabia, Rusia, Pakistan, Korea, Vietnam, Turkey, Taiwan, German, India, Inggris, Jeddah.

### **Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyebutkan pada pasal 39 bahwa pendanaan penyelenggaraan BPSK dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Pendanaan penyelenggaraan BPSK sebagaimana dimaksud terdiri dari sarana dan prasarana, biaya operasional,

honorarium ketua, wakil ketua dan anggota BPSK serta honorarium kepala sekretariat dan anggota sekretariat.

Ditahun 2021 telah dibentuk 3 (tiga) BPSK yang beranggotakan 9 (sembilan) orang dan sekretariat berjumlah 3 (tiga) orang yaitu di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kota Gorontalo. Untuk tahun 2022 akan dibentuk lagi sebanyak 3 (tiga) BPSK yaitu di kabupaten Gorontalo Utara, Boalemo dan Kabupaten Bone Bolango.

Tabel 2.20. Rekapitan Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Provinsi Gorontalo Tahun 2021

| <b>URAIAN (KATEGORI TEMUAN)</b>      | <b>JUMLAH</b> | <b>PROSES HUKUM</b>   | <b>PEMBINAAN</b> | <b>KETERANGAN</b>   |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|---|
| - KASUS ALAT UKUR UTTP               | 25            | PEMBINAAN             | 25               | liter/Timbangan (Pasar2 Tradisional) (diserahkan Di Kab/Kota) |
| SNI (Wajib)                          | 35            | PEMBINAAN             | 35               | Mainan anak   |
|                                      | 2             | PEMBINAAN             | 2                | Kabel Lisrik  |
|                                      | 2             | PEMBINAAN             | 2                | Regulator (dalam pengujian)                                   |
| Tanda Daftar Gudang (Kota Gorontalo) | 10            | PEMBINAAN/ PERINGATAN | 10               | Tidak ada Tanda Daftar Gudang                                 |
| Harga Pada Barang                    | 130           | PEMBINAAN             | 130              | Tidak adanya label Harga                                      |
| Kota Gorontalo                       | 35            |                       |                  | Pada barang yang di   |
| Bone-Bolango                         | 20            |                       |                  | Perdagangkan/Kab/Kota   |
| Kab Gorontalo                        | 30            |                       |                  | (di beri Peringatan lisan dan                                 |
| Gorontalo Utara                      | 15            |                       |                  | peringatan tertulis)  |
| Kab. Pohuwato                        | 20            |                       |                  |   |
| Boalemo                              | 10            |                       |                  |   |
| -KADALUARSA                          | 15            | PEMBINAAN             | 15               | Kab/Kota (termasuk kasus Yg Lagi Viral) Di serahkan Ke B'POM  |
|                                      |               | Diserahkan ke B'POM   |                  |   |
| <b>JUMLAH TEMUAN</b>                 | <b>219</b>    |                       | <b>219</b>       |   |

Sumber : Bidang Perdagangan, Diskumperindag Provinsi Gorontalo 2021

**Pengawasan Barang beredar**

Pengawasan Barang beredar dan/atau Jasa serta Pengawasan Perdagangan Meliputi :

1. Untuk Barang :
  - a. Standar
  - b. Label dalam bahasa Indonesia
  - c. Petunjuk Penggunaan
  - d. Jaminan Layanan Purna Jual
  - e. Cara Menjual
  - f. Pengiklanan
  - g. Kalusula Baku
2. Untuk Jasa :
  - a. Standar
  - b. Jaminan dan/atau garansi yang di sepakati dan/atau di perjanjikan
  - c. Kalusula Baku
3. Untuk Pengawasan Perdagangan Meliputi;
  - a. Perizinan di bidang perdagangan
  - b. Perdagangan Barang yang diawasi,di larang dan/atau diatur
  - c. Diatribusi
  - d. Pendaftaran Barang produk dalam negeri dan asal inpor yang terkait dengan K3L (keamanan, keselamatan, Kesehatan dan lingkungan hidup)
  - e. Pemberlakuan SNI kualifikasi secara wajib
  - f. Pendaftaran Gudang
  - g. Penyimpanan Bahan Kebutuhan Pokok dan/atau penting
  - h. Perdagangan melalui sistim elektronik

**Beberapa Hasil Pengawasan barang Beredar dan atau/Jasa :**

1. Terdapatnya Besi, celokan, kabel, kipas angin, Yang belum sesuai dengan Standar Nasional
2. Masih banyak terdapat barang-barang kadaluarsa yang bercampur dengan barang-barang yang masih layak di konsumsi, berupa Biskuit, minuman dan bahan untuk pembuatan kue terdapat pada gudang-gudang

**Pengawasan Perdagangan antara lain :**

1. Distribusi
  - a. Pengawasan terhadap pelaku usaha distribusi
    - Pola Distribusi dari Produsen
    - Distributor, Agen ke Pengecer.
    - Distribusi Barang
  - b. Distribusi barang yang dilarang, diawasi, dan diatur.
    - Minuman beralkohol, pupuk bersubsidi, gula rafinasi, barang berbahaya.
  - c. Pengawasan terhadap penyimpanan bahan kebutuhan pokok dan penting.
2. Perijinan
  - Gudang-gudang (Tanda daftar Gudang, Siup, TDP, TDPUD, SIUP-MB)
3. Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
  - Pasar rakyat
  - Pusat-pusat perbelanjaan
  - Toko swalayan
  - Gudang
  - Sarana perdagangan lainnya

**Hasil Pengawasan**

1. Masih terdapatnya gudang-gudang yang tidak mempunyai tanda daftar gudang
2. Untuk kota gorontalo tidak lagi mengeluarkan Tanda daftar gudang sebab daerah kota gorontalo tidak memenuhi syarat lingkungan untuk didirikan gudang.
3. Terdapatnya minuman beralkohol yang kadarnya 4.5% masih di jual di toko-toko tidak mempunyai ijin
4. Masih terdapatnya gudang-gudang yang tidak sesuai dengan peruntukannya
5. Distributor Minuman beralkohol yang izinnya sudah menghampiri (dalam proses penegakan Hukum oleh kepolisian )
6. Banyak pangkalan-pangkalan Gas LPG yang Nakal menjual Gas LPG sudah melebihi Harga HET,
7. Terdapatnya Toko-Toko yang menjual HP yang tidak Mempunyai Garansi

8. Masih terdapatnya distributor besi yang menjual Besi Beton yang sudah mempunyai SNI namun ukuran panjang diameternya tidak sesuai dengan ukuran yang di janjikan.

### **Lokasi Pengawasan**

Tempat pelaksanaan se Provinsi Gorontalo yaitu terdiri dari 5(lima) Kabupaten dan 1(satu) Kota yakni ,Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo

### **UPTD BPSMB**

Adapun ruang lingkup pelayanan UPTD BPSMB hingga tahun 2021 meliputi:

- a. pengambilan contoh
- b. pengujian terakreditasi yang meliputi komoditi jagung, rumput laut, biji kakao, beras
- c. pengujian tidak terakreditasi yaitu untuk pengujian kadar lemak total, asam lemak bebas (FFA), kadar air, organoleptik, kopi, kopra

#### ➤ Tahun 2021

Jumlah Sampel Pengujian = sampel

Jumlah Pengujian = 692 pengujian

Laporan Hasil Pengujian (LHP) yang diterbitkan sejumlah 69 LHP dan pada tahun ini tidak menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Mutu (SKM).

Jumlah UKM yang menerapkan standart sebanyak 30 UKM produk olahan pangan

#### ➤ Tahun 2020

Jumlah Sampel Pengujian = 232 sampel

Jumlah Pengujian = 699 pengujian

Obyek pengujian :

~ Komoditi akreditasi : beras, jagung, biji kakao, rumput laut

~ Komoditi Non Akreditasi : Sosis asap daging, kerang, bakso, ikan cakalang, kopra, minyak kelapa super, teh daun sirsak, gula merah cair, minyak kelapa kampung

~ Komoditi Potensial : Biji Kakao dan Biji Kopi

Menghasilkan 8 (delapan) Sertifikat Kesesuaian Mutu (SKM) untuk komoditi jagung export

➤ Tahun 2019

Jumlah Sampel Pengujian = 178 sampel

Jumlah Pengujian = 726 kali pengujian

Mencakup 38 produk dengan parameter pengujian yang berbeda.

8 (delapan) IKM mendapat fasilitas pengujian kandungan gizi untuk label kemasan pada minyak goreng dan pangan olahan

➤ Tahun 2018

Jumlah Sampel Pengujian = 439 sampel

Jumlah Pengujian = 1075 kali pengujian

Mencakup 37 produk dengan parameter pengujian yang berbeda

10 (sepuluh) sertifikat kesesuaian mutu untuk komoditi jagung export

Parameter pengujian di Laboratorium BPSMB hingga tahun 2021 antara lain meliputi :

- a. Beras : Kadar air, butir pecah, kotoran, derajat sosoh, butir patah butir kepala, butir menir, butir merah, butir kunign, kapur, benda asing, butir gabah, uji lengkap
- b. Jagung : kadar air (meter kadar air), butir pecah, rusak, kotoran
- c. Biji kakao : kadar air, serangga hidup, biji berbau asap, biji pecah, benda asing, biji jamur, biji berserangga, biji slaty, biji berkecambah, kotoran
- d. Kopra : kadar air, kadar lemak
- e. Minyak kelapa : Kadar air, bilangan asam, FFA
- f. Teh Daun Sirsak : Kadar air
- g. Biji Kopi : Kadar air, nilai cacat (visual)
- h. Rumput laut : Kadar air, kenampakan, tekstur
- i. Gula merah cair : Kadar air

Penyediaan sarana dan prasarana laboratorium sampai dengan tahun 2021 meliputi:

- a. Pembangunan gedung kantor dan laboratorium
- b. Perangkat uji protein

- c. Kromatografi Gas, untuk pengujian asam-asam senyawa lemak dan hidrokarbon
- d. Bahan kimia dan bahan pendukung pengujian

Adapun capaian Program Kegiatan Bidang Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel 2.21 berikut ini :

Tabel 2.21 Capaian Program Kegiatan dan Pendanaan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan. Provinsi Gorontalo Yang Mengacu pada RPJMD 2017-2022

| Tujuan                                    | Sasaran  | No. Kode                             | Program dan Kegiatan                              | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2017)   | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2022) |   |             |
|---|--|--------------------------------------|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|-------------|
|   |  |                                      |   |  |  | 2018  |   | 2019                                      |   | 2020                                      |   | 2021  |   | 2022  |   | Target   | Rp.   |             |
|   |  |                                      |   |  |  | Target  | Capaian                                 | Target                                    | Capaian                                 | Target                                    | Capaian   | Target  | Capaian   | Target  | Capaian   |  |   |             |
|   |  | 1,13                                 | <b>KOPERASI DAN UMKM</b>                          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |             |
| Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UKM | 1. Meningkatnya Koperasi Sehat<br>2. Meningkatnya Koperasi yang Menjalिन Kemitraan |                                      | <b>Program Pengembangan Koperasi dan UMKM</b>     | <b>Program (outcome) dan Kegiatan (output):</b>                            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |             |
|   |  |                                      |   | Jumlah Koperasi Aktif  | 658 Koperasi Aktif   | 668 Koperasi Aktif                            | 840 Koperasi Aktif                      | 678 Koperasi Aktif                        | 866 Koperasi Aktif                      | 693 Koperasi Aktif                        | 907 Koperasi Aktif  | 708 Koperasi Aktif  | 957 Koperasi Aktif  | 728 Koperasi Aktif  |   | 728 Koperasi Aktif   |   |             |
|   |  |                                      |   | Jumlah Koperasi Berprestasi  | 15 Koperasi Berkualitas dan 10 Kop. Berprestasi  | 10 Kop. Berkualitas & 10 Kop. Berprestasi     | 6 Kop. Berprestasi                      | 10 Kop. Berkualitas & 10 Kop. Berprestasi | 6 Kop. Berprestasi                      | 10 Kop. Berkualitas & 10 Kop. Berprestasi | 0 Kop. Berprestasi  | 10 Kop. Berkualitas & 10 Kop. Berprestasi                     | 10 Kop. Berprestasi   | 10 Kop. Berkualitas & 10 Kop. Berprestasi                     |   | 10 Kop. Berkualitas & 10 Kop. Berprestasi                          |   |             |
|   |  |                                      |   | <b>Kegiatan :</b>  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |             |
|   |  |                                      |   | Penguatan SDM dan Kelembagaan Koperasi                                     | Jumlah pengurus, pengawas, pengelola koperasi serta masyarakat yang ditingkatkan pemahamannya berkaitan dengan aturan/regulasi kelembagaan | 3627 Pengurus/ Pengelola                      | 120 pengurus dan pengelola yang dilatih | 320 pengurus dan pengelola yang dilatih   | 120 pengurus dan pengelola yang dilatih | 490 pengurus dan pengelola yang dilatih   | 150 pengurus, pengawas, pengelola dan masyarakat yang dilatih | 390 pengurus, pengawas, pengelola dan masyarakat yang dilatih | 150 pengurus, pengawas, pengelola dan masyarakat yang dilatih | 390 pengurus, pengawas, pengelola dan masyarakat yang dilatih | 150 pengurus, pengawas, pengelola dan masyarakat yang dilatih |  | 690 pengurus, pengawas, pengelola dan masyarakat yang dilatih |             |
|   |  |                                      |   |  | Jumlah Revitalisasi Koperasi   |   |   |   | 10 Koperasi                             | 6 Koperasi                                | 10 Koperasi   | 1 Koperasi  | 10 Koperasi   | 5 Koperasi  | 10 Koperasi   |  | 30 Koperasi   |             |
|   |  |                                      |   | Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi                 | Jumlah dokumen laporan hasil pengawasan  | 3 Dokumen                                     | 3 dokumen                               | 5 dokumen                                 | 3 dokumen                               | 5 dokumen                                 | 7 dokumen   | 42 dokumen  | 7 dokumen   | 7 dokumen   | 7 dokumen   |  | 27 doukmen  |             |
|   |  |                                      |   |  | Jumlah satgas pengawas koperasi yang terbentuk & dilatih   | 1 satgas (provinsi)                           | 1 satgas (provinsi)                     | 1 satgas (provinsi)                       | 2 satgas                                | 1 tim satgas (7 satgas)                   | 1 tim satgas  |  | 1 Tim satgas  |             |
|   |  |                                      |   |  | Jumlah koperasi berprestasi & koperasi percontohan   | 10 Koperasi                                   | 10 Koperasi                             | 6 Koperasi                                | 10 Koperasi                             | 6 Koperasi                                | 10 Koperasi   | -   | 10 Koperasi   | 10 Koperasi   | 10 Koperasi   |  | 50 Koperasi   |             |
|   |  |                                      |   |  | Jumlah pemeriksaan KSP/USP   |   |   |   |   |   |   | 10 Koperasi   | 1 Koperasi  | 10 Koperasi   | 10 Koperasi   | 10 Koperasi  |   | 30 Koperasi |
|   |  |                                      |   | Peningkatan Akses Permodalan dan Efektifitas pembiayaan bagi KUKM          | Jumlah Koperasi dan UMKM yang mengakses permodalan   |   | 500 KUKM                                | 31.383 KUKM                               | 750 KUKM                                | 3.554 KUKM                                | 1000 KUKM   | 31.567 KUKM   | 1.250 KUKM  | 1.250 KUKM  | 1.500 KUKM  |  | 5.000 KUKM  |             |
|   |  |                                      |   |  | Jumlah pelaksanaan sosialisasi kredit perbankan  |   | 6 Kali                                  | 6 Kali                                    | 6 kali                                  |   |   | -   | -   |   |   |  | 12 kali   |             |
|   |  |                                      |   | Peningkatan Kemitraan Koperasi   | Jumlah kerjasama antar koperasi dan lembaga lainnya  |   |   |   |   |   | --  | 24 Koperasi   | Tidak dianggarkan   | 24 Koperasi   | Tidak dianggarkan   | 24 Koperasi  | 72 Koperasi   |             |
|   |  | Peningkatan Perluasan Jaringan Usaha | Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Koperasi Pasar        |  |  |   |   |   | --                                      | 5 kali                                    | Tidak dianggarkan   | 5 kali  | Tidak dianggarkan   | 5 kali  | 15 kali   |  |   |             |
|   |  |                                      | Jumlah pengembangan jaringan usaha koperasi pasar |  |  |   |   |   |   | --  | 5 unit  | Tidak dianggarkan   | 5 unit  | Tidak dianggarkan   | 5 unit  | 5 unit   |   |             |

| Tujuan                             | Sasaran | No. Kode | Program dan Kegiatan                                      | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)           | Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2017)   | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                                       |                                       |                                       |                        |                                       |                        |                                       |                        |                                       | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2022) |     |
|------------------------------------|---------|----------|---|--|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|-----|
|                                    |         |          |   |  |  | 2018  |                                       | 2019                                  |                                       | 2020                   |                                       | 2021                   |                                       | 2022                   |                                       | Target   | Rp. |
|                                    |         |          |   |  |  | Target  | Capaian                               | Target                                | Capaian                               | Target                 | Capaian                               | Target                 | Capaian                               | Target                 | Capaian                               |  |     |
| Meningkatnya Jumlah UKM Naik Kelas |         |          | Sosialisasi Kredit Perbankan Bagi KUKM                    | Pendampingan KUR , Monev dan Temu Bisnis   | 750 KUKM   |   |                                       |                                       |                                       |                        |                                       |                        |                                       |                        |                                       |  |     |
|                                    |         |          | Peingkatan Penumbuhan Koperasi Baru                       | Jumlah Koperasi Baru yang di Fasilitas Pembentukannya                                | 25 Koperasi Baru   |   |                                       |                                       |                                       |                        |                                       |                        |                                       |                        |                                       |  |     |
|                                    |         |          | Revitalisasi Koperasi                                     | Jumlah Koperasi tidak Aktif yang menjadi Koperasi Aktif                              | 10 Koperasi  |   |                                       |                                       |                                       |                        |                                       |                        |                                       |                        |                                       |  |     |
|                                    |         |          | Pengembangan UPTD PLUT KUKM                               | Persentase Pelayanan Terhadap KUKM   | 1 PLUT KUKM  |   |                                       |                                       |                                       |                        |                                       |                        |                                       |                        |                                       |  |     |
|                                    |         |          | <b>2,7</b>  | <b>USAHA KECIL MENENGAH</b>  |  |   |                                       |                                       |                                       |                        |                                       |                        |                                       |                        |                                       |  |     |
|                                    |         |          | <b>2.7.1</b>  | <b>Program Pengembangan UKM</b>  | <b>Program (outcome) dan Kegiatan (output):</b>  |   |                                       |                                       |                                       |                        |                                       |                        |                                       |                        |                                       |  |     |
|                                    |         |          |   | <b>Kegiatan :</b>  | <b>Jumlah UKM yang dibina/naik kelas</b>   | <b>20 UKM</b>                                 | <b>50 UKM</b>                         | <b>60 UKM</b>                         | <b>50 UKM</b>                         | <b>70 UKM</b>          | <b>50 UKM</b>                         | <b>50 UKM</b>          | <b>75 UKM</b>                         | <b>50 UKM</b>          | <b>250 UKM</b>                        |  |     |
|                                    |         |          | 2.7.1.2   | Peningkatan SDM dan Penguatan Kelembagaan UMKM                                       | Jumlah UKM yang ditingkatkan pemahaman mengenai manajemen, pengelolaan,                    | 304 UKM                                       | 200 UKM                               | 200 UKM                               | 200 UKM                               | 140 UKM                | 100 UKM                               | -                      | 150 UKM                               | 75 UKM                 | 200 UKM                               | 850 UKM  |     |
|                                    |         |          |   |  |  | 6 UKM yang dimagangkan                        | 3 UKM yang dimagangkan                | 6 UKM yang dimagangkan                | -                                     | 6 UKM yang dimagangkan | -                                     | 6 UKM yang dimagangkan | -                                     | 6 UKM yang dimagangkan | 30 UKM yang dimagangkan               |  |     |
|                                    |         |          | 2.7.1.3   | Pembinaan UMKM Naik Kelas  | Jumlah UKM yang dibina   | 20 UKM  | 50 UKM                                | 60 UKM                                | 50 UKM                                | 70 UKM                 | 50 UKM                                | 50 UKM                 | 75 UKM                                | 50 UKM                 | 250 UKM                               |  |     |
|                                    |         |          | 2.7.1.4   | Lomba Inovasi/UMKM Model dan Percontohan Daerah                                      | Jumlah UMKM Model/Percontohan  |   | 3 UKM Model                           | 12 UKM Model                          | 3 UKM Model                           | ---                    |                                       |                        |                                       |                        |                                       |  |     |
|                                    |         |          | 2.7.2.1   | Peningkatan Kemitraan usaha bagi UKM/IKM   | Jumlah UKM/IKM yang mengikuti temu mitra   |   | 200 UKM/IKM yang mengikuti temu mitra | 200 UKM/IKM yang mengikuti temu mitra | 200 UKM/IKM yang mengikuti temu mitra | ---                    | 200 UKM/IKM yang mengikuti temu mitra | Tidak dianggarkan      | 200 UKM/IKM yang mengikuti temu mitra | Tidak dianggarkan      | 200 UKM/IKM yang mengikuti temu mitra | 1000 UKM/IKM yang mengikuti temu mitra                             |     |
|                                    |         |          | 2.7.2.2   | Promosi dan Pemasaran Produk UMKM  | Jumlah produk UKM/IKM yang dipromosikan/ dipasarkan di dalam & luar daerah                 | 12 UMKM                                       | 10 Produk UKM/IKM                     | 10 Produk UKM/IKM                     | 15 Produk UKM/IKM                     | 15 Produk UKM/IKM      | 15 Produk UKM/IKM                     | 15 Produk UKM/IKM      | 20 Produk UKM/IKM                     | 20 Produk UKM/IKM      | 20 Produk UKM/IKM                     | 80 Produk UKM/IKM  |     |
|                                    |         |          |   | Pengembangan Layanan Usaha KUKM  | Jumlah KUKM yang difasilitasi pendampingan usaha oleh PLUT KUKM                            | 50 KUKM                                       | 60 KUKM                               |                                       | 70 KUKM                               |                        | 80 KUKM                               |                        | 90 KUKM                               |                        | 100 KUKM                              | 400 KUKM   |     |
|                                    |         |          |   | Pengembangan Pos Daya dan SHAT   | Meningkatnya Jumlah UMKM   | 70.274 KUKM                                   | -                                     |                                       | -                                     | -                      | -                                     | -                      | -                                     | -                      | -                                     | -  |     |
|                                    |         |          |   | UP DateBase UMKM Provinsi Gorontalo  | Dokumen DateBase UMKM  | 1 Dokumen                                     | -                                     |                                       | -                                     | -                      | -                                     | -                      | -                                     | -                      | -                                     | -  |     |
|                                    |         |          |   | <b>Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur</b> | <b>Persentase Peningkatan Layanan Jasa Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur</b> | <b>100%</b>                                   | <b>100%</b>                           | <b>100%</b>                           | <b>100%</b>                           | <b>100%</b>            | <b>100%</b>                           | <b>100%</b>            | <b>100%</b>                           | <b>100%</b>            | <b>100%</b>                           | <b>100%</b>  |     |
|                                    |         |          | <b>Kegiatan :</b>   |  |  |   |                                       |                                       |                                       |                        |                                       |                        |                                       |                        |                                       |  |     |
|                                    |         |          | Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Dinas Kumperindag | Persentase pelayanan jasa administrasi perkantoran Dinas Kumperindag                 | 100%   | 100%  | 100%                                  | 100%                                  | <b>100%</b>                           | 100%                   | 100%                                  | 100%                   | 100%                                  | 100%                   | 100%                                  |  |     |
|                                    |         |          | Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD BPSMB        | Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Kantor UPTD BPSMB                             | 100%   | 100%  | 100%                                  | 100%                                  | <b>100%</b>                           | 100%                   | 100%                                  | 100%                   | 100%                                  | 100%                   | 100%                                  |  |     |
|                                    |         |          | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran              | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana SKPD                                    | 100%   | 100%  | 100%                                  | 100%                                  | <b>100%</b>                           | 100%                   | 100%                                  | 100%                   | 100%                                  | 100%                   | 100%                                  |  |     |
|                                    |         |          | Peningkatan Kualitas SDM Aparatur                         | Jumlah SDM Aparatur yang di latih  | 120 ASN  | 20 ASN  | 14 ASN                                | 20 ASN                                | 33 ASN                                | 20 ASN                 | 17 ASN                                | 20 ASN                 | 120 ASN                               | 20 ASN                 | 135 ASN                               |  |     |

| Tujuan | Sasaran   | No. Kode   | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2017) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                                  |                       |                                 |                        |                                 |                        |                       |                        |                        | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2022) |     |
|--------|---|------------|---|--|--|---|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--|-----|
|        |   |            |   |  |  | 2018  |                                  | 2019                  |                                 | 2020                   |                                 | 2021                   |                       | 2022                   |                        | Target   | Rp. |
|        |   |            |   |  |  | Target  | Capaian                          | Target                | Capaian                         | Target                 | Capaian                         | Target                 | Capaian               | Target                 | Capaian                |  |     |
|        |   |            | Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan             | Persentase pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi monitoring dan pelaporan      | 100%   | 100%  | 100%                             | 100%                  | 100%                            | 100%                   | 100%                            | 100%                   | 100%                  | 100%                   | 100%                   |  |     |
|        |   |            | Kegiatan :  |  |  |   |                                  |                       |                                 |                        |                                 |                        |                       |                        |                        |  |     |
|        |   |            | Penatausahaan & Pelaporan Keuangan SKPD                             | Persentase Pelayanan & Akuntabilitas Keuangan SKPD                         | 1 Dokumen  |   |                                  |                       |                                 |                        |                                 |                        |                       |                        |                        |  |     |
|        |   |            |   | Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan  | -  | 2 Dokumen                                     | 1 Dokumen                        | 2 Dokumen             | 1 Dokumen                       | 2 Dokumen              | 1 Dokumen                       | 2 Dokumen              | 1 Dokumen             | 2 Dokumen              |                        | 2 Dokumen  |     |
|        |   |            | Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program & Kegiatan | Persentase peningkatan perencanaan & Monev                                 | 1 Kegiatan                                       |   |                                  |                       |                                 |                        |                                 |                        |                       |                        |                        |  |     |
|        |   |            |   | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Koordinasi Lintas Sektor/SKPD/Pusat         | 10 Dokumen Perencanaan                           | 10 Dokumen Perencanaan                        | 10 Dokumen Perencanaan           | 8 Dokumen Perencanaan | 8 Dokumen Perencanaan           | 8 Dokumen Perencanaan  | 8 Dokumen Perencanaan           | 8 Dokumen Perencanaan  | 8 Dokumen Perencanaan | 8 Dokumen Perencanaan  | 8 Dokumen Perencanaan  | 8 Dokumen Perencanaan  |     |
|        |   |            |   | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan SKPD               | 12 Dokumen Monitoring & Evaluasi                 | 12 Dokumen Monitoring & Evaluasi              | 12 Dokumen Monitoring & Evaluasi | 7 Dokumen Monitoring  | 7 Dokumen Monitoring & Evaluasi | 7 Dokumen Monitoring   | 7 Dokumen Monitoring & Evaluasi | 7 Dokumen Monitoring   | 7 Dokumen Monitoring  | 7 Dokumen Monitoring   | 7 Dokumen Monitoring   | 7 Dokumen Monitoring   |     |
|        |   |            | <b>JUMLAH URUSAN KOPERASI DAN UKM</b>                               |  |  |   |                                  |                       |                                 |                        |                                 |                        |                       |                        |                        |  |     |
|        |   | <b>2</b>   | <b>URUSAN PILIHAN</b>   |  |  |   |                                  |                       |                                 |                        |                                 |                        |                       |                        |                        |  |     |
|        |   | <b>2,7</b> | <b>PERDAGANGAN</b>  |  |  |   |                                  |                       |                                 |                        |                                 |                        |                       |                        |                        |  |     |
|        | Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri                       |            | Program Pengembangan dan Penguatan Perdagangan Dalam Negeri         | Jumlah Perdagangan antar Pulau   | 2400 kali  | 2640 kali                                     | 3033 Kali                        | 2880 kali             | 3.308                           | 3120 kali              | 3553 kali                       | 3360 kali              | 3808 kali             | 3600 kali              | 3600 kali              |  |     |
|        |   |            | Kegiatan :  |  |  |   |                                  |                       |                                 |                        |                                 |                        |                       |                        |                        |  |     |
|        | Meningkatnya Perlindungan Konsumen & Pengawasan Perdagangan | 2.6.2.1    | Peningkatan Perdagangan Antar Pulau                                 | - Jumlah Sosialisasi Penerapan Aturan Perdagangan Antar Pulau              | - 4 kali sosialisasi                             |   | 4 kali sosialisasi               | -                     | 4 kali sosialisasi              | 4 kali sosialisasi     | 4 kali sosialisasi              | 4 kali sosialisasi     | 4 kali sosialisasi    | 4 kali sosialisasi     | 4 kali sosialisasi     | 4 kali sosialisasi   |     |
|        |   |            |   | - aplikasi pelaporan antar pulau secara online                             | -  | -   | 1 aplikasi                       | -                     | 1 aplikasi                      | 1 aplikasi             | 1 aplikasi                      | 1 aplikasi             | 1 aplikasi            | 1 aplikasi             | 1 aplikasi             | 1 aplikasi   |     |
|        |   | 2.6.2.2    | Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis              | Jumlah Operasi Pasar   |  | 20 kali Operasi Pasar                         | 89 kali Operasi Pasar            | 60 kali Operasi Pasar | 85 kali Operasi Pasar           | 120 kali Operasi Pasar | 178 kali Operasi Pasar          | 130 kali Operasi Pasar | 25 kali Operasi Pasar | 150 kali Operasi Pasar | 150 kali Operasi Pasar |  |     |
|        |   |            | Bazar Murah Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat           | Jumlah Paket Bazar Murah yang disalurkan kepada masyarakat Miskin          | 60 Paket   |   |                                  |                       |                                 |                        |                                 |                        |                       |                        |                        |  |     |
|        |   | 2.6.2.3    | Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa                    | Jumlah pelaku usaha yang diawasi   | 90%  | 80 Pelaku Usaha                               | 80 Pelaku Usaha                  | 80 Pelaku Usaha       | 95 Pelaku Usaha                 | 100 Pelaku Usaha       | 120 Pelaku Usaha                | 110 Pelaku Usaha       | 125 Pelaku Usaha      | 120 Pelaku Usaha       | 120 Pelaku Usaha       | 120 Pelaku Usaha   |     |
|        |   | 2.6.2.4    | Penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen                        | Jumlah Penyelesaian Pengaduan Konsumen                                     | 12 kasus   | 12 kasus                                      | -                                | 12 kasus              | -                               | 55 kasus               | 12 kasus                        | 60 kasus               | 96 kasus              | 80 kasus               | 80 kasus               |  |     |
|        |   | 2.6.1      | Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Daerah                  | Jumlah Ekspor  | 6 Komoditi                                       | 7 komoditi                                    | 7 komoditi                       | 8 Komoditi            | 8 Komoditi                      | 9 Komoditi             | 13 Komoditi                     | 10 Komoditi            | 10 Komoditi           | 12 Komoditi            | 12 Komoditi            |  |     |
|        |   |            | Kegiatan:   |  |  |   |                                  |                       |                                 |                        |                                 |                        |                       |                        |                        |  |     |
|        |   |            | Promosi dan pemoebangan   | - Jumlah Komoditi Produk Ekspor yang dipromosikan                          | 6 Komoditi Ekspor                                | 4 komoditi                                    | 7 Komoditi                       | 4 komoditi            | 8 komoditi                      | 8 komoditi             | 0 komoditi                      | 9 komoditi             | 3 Komoditi            | 10 komoditi            | 10 komoditi            |  |     |

| Tujuan  | Sasaran                      | No. Kode | Program dan Kegiatan                                      | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)         | Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2017) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan       |  |   |  |   |  |   |   |   |  | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2022) |     |  |  |
|---|------------------------------|----------|---|--|--|---|--|---|--|---|--|---|---|---|--|--|-----|--|--|
|   |                              |          |   |  |  | 2018  |  | 2019  |  | 2020  |  | 2021  |   | 2022  |  | Target   | Rp. |  |  |
|   |                              |          |   |  |  | Target  | Capaian  | Target  | Capaian  | Target  | Capaian  | Target  | Capaian                                       | Target  | Capaian  |  |     |  |  |
| Peningkatan Peran IKM Dalam Perekonomian Daerah | Meningkatnya Pertumbuhan IKM | 2.6.1.1  | Perencanaan pengembangan Produk Ekspor Daerah             | - Jumlah UKM yang memahami prosedur ekspor<br>- Misi dagang ekspor dan antar pulau | -  | 20 calon eksportir                                  |  | 20 calon eksportir                            |  | 20 calon eksportir  |  | 20 calon eksportir                            | 30 Calon Eksportir                            | 20 calon eksportir                            |  | 20 calon eksportir   | 500 |  |  |
|   |                              |          | Program Peningkatan Efisiensi dalam Negeri                | Meningkatnya volume perdagangan antar pulau Gorontalo                              |  |   |  |   |  |   |  |   |   |   |  |  |     |  |  |
|   |                              |          | Bazar Murah Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat | Jumlah Paket Bazar Murah yang disalurkan kepada masyarakat Miskin                  | 60 Paket   |   |  |   |  |   |  |   |   |   |  |  |     |  |  |
|   |                              |          | Revitalisasi Pasar  | Jumlah Sarana Distribusi yang di bangun  | 4 Pasar Tradisional                              |   |  |   |  |   |  |   |   |   |  |  |     |  |  |
|   |                              | 2.6.3    | Program Peningkatan Standarisasi Mutu Barang              | Jumlah Sertifikasi Mutu Barang   | 20 Sertifikat                                    | 3 Sertifikat  | 3 Sertifikat                                   | 3 Sertifikat                                  | - sertifikat (tidak ada export keluar prov. Grtlo) | 3 Sertifikat  | 8 Sertifikat   | 3 Sertifikat                                  | 0 Sertifikat                                  | 3 Sertifikat                                  | 15 Sertifikat  |  |     |  |  |
|   |                              |          | Kegiatan :  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |   |   |  |  |     |  |  |
|   |                              | 2.6.3.1  | Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang                     | Jumlah Pengujian Standar Mutu Barang   | 1439 Kali  | 1639 Kali   | 1075 Kali                                      | 1839 Kali                                     | 726 Kali   | 700 Kali  | 699 kali   | 950 Kali                                      | 692 kali                                      | 1200 Kali                                     | 3500 Kali  |  |     |  |  |
|   |                              | 2.6.3.1  | Penerapan Standarisasi Mutu Barang                        | Pelaku Usaha UKM yang Menerapkan Standar Mutu Barang                               | -  | 3 Pelaku Usaha                                      | 20 Pelaku Usaha                                | 4 Pelaku Usaha                                | 30 Pelaku Usaha                                    | 30 Pelaku Usaha   | 13 Pelaku Usaha  | 30 Pelaku Usaha                               | 30 Pelaku Usaha                               | 30 Pelaku Usaha                               | 123 Pelaku Usaha                                       |  |     |  |  |
|   |                              |          |   |  |  |   |  |   |  |   |  |   |   |   |  |  |     |  |  |
|   |                              |          |   |  |  |   |  |   |  |   |  |   |   |   |  |  |     |  |  |
|   |                              |          | Program Pengembangan Industri Kecil Menengah              | Program (outcome) dan Kegiatan (output):   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |   |  |  |     |  |  |
|   |                              |          | Kegiatan :  | Jumlah IKM yang Dibina   | 14.339 IKM                                       | 14.539 IKM  | 14.886 IKM                                     | 14.739 IKM                                    | 15.000 IKM   | 14.939 IKM  | 15.226 IKM   | 15.139 IKM                                    | 15.555 IKM                                    | 15.339 IKM                                    | 15.339 IKM   |  |     |  |  |
|   |                              |          | Pengembangan Agro Industri & Industri Pangan Daerah       | Jumlah IKM yang Bersertifikat dan terampil tentang pengolahan pangan               |  | 50 IKM yang mendapat Bimtek Pengolahan Pangan       | 50 IKM yang mendapat Bimtek Pengolahan Pangan  | 60 IKM yang mendapat Bimtek Pengolahan Pangan | 60 IKM yang mendapat Bimtek Pengolahan Pangan      | 30 IKM yang mendapat Bimtek Pengolahan Pangan & Bersertifikat   | 100 IKM yang mendapat Bimtek Pengolahan Pangan & Bersertifikat | 30 IKM yang mendapat Bimtek Pengolahan Pangan | 199 KM yang mendapat Bimtek Pengolahan Pangan | 50 IKM yang mendapat Bimtek Pengolahan Pangan | 140 IKM yang mendapat Bimtek/Bantuan Pengolahan Pangan |  |     |  |  |
|   |                              |          | Pengembangan Industri Kerajinan Daerah                    | Jumlah IKM berbasis industri Kerajinan   |  | 50 IKM yang mendapat Bimtek/bantuan Kerajinan       | 282 IKM yang mendapat Bimtek/bantuan Kerajinan | 50 IKM yang mendapat Bimtek/bantuan Kerajinan | 50 IKM yang mendapat Bimtek/bantuan Kerajinan      | Kegiatan ini Dipindahkan ke Kegiatan Pembinaan Teknologi Industri Kimia, Kerajinan, Sandang dan Aneka |  |   |   |   |  |  |     |  |  |
|   |                              |          | Pengembangan Industri Hulu dan Hilir                      | Jumlah Industri Hulu dan Hilir di Daerah Gorontalo                                 |  | 1 Industri Hulu dan 1 Industri Hilir yang terbentuk |  |   |  |   |  |   |   |   |  |  |     |  |  |

| Tujuan | Sasaran | No. Kode | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)           | Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2017) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan                                |          |        |         |   |   |   |   |   |         | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2022) |     |
|--------|---------|----------|--|--|--|--|----------|--------|---------|---|---|---|---|---|---------|--|-----|
|        |         |          |  |  |  | 2018   |          | 2019   |         | 2020  |   | 2021  |   | 2022  |         | Target   | Rp. |
|        |         |          |  |  |  | Target   | Capaian  | Target | Capaian | Target  | Capaian   | Target  | Capaian   | Target  | Capaian |  |     |
|        |         |          | Pengembangan Teknologi Industri Pangan                           | Jumlah IKM Pangan berbasis Teknologi   |  | 40 IKM Pangan yang Difasilitasi dengan Teknologi                             | 80 IKM   |        | --      |   |   |   |   |   |         |  |     |
|        |         |          | Pembinaan Teknologi Industri Kimia, Kerajinan, Sandang dan Aneka | Jumlah Industri Kimia, Kerajinan, Sandang dan Aneka yang dibina Penguasaan Teknologi |  | 30 IKM Kimia Kerajinan Sandang dan Aneka yang di Fasilitasi dengan Teknologi | 60 IKM   |        | --      | 50 IKM Kimia Kerajinan Sandang dan Aneka yang di Bina | 85 IKM Kimia Kerajinan Sandang dan Aneka yang di Bina | 60 IKM Kimia Kerajinan Sandang dan Aneka yang di Bina | 86 IKM Kimia Kerajinan Sandang dan Aneka yang di Bina | 70 IKM Kimia Kerajinan Sandang dan Aneka yang di Bina |         | 240 IKM Kimia Kerajinan Sandang dan Aneka yang di Bina             |     |
|        |         |          | Pembinaan Teknologi Logam Mesin dan Elektronik                   | Jumlah IKM di Bidang Logam, Mesin dan elektronik yang dibina Penguasaan Teknologi    |  | 30 IKM Logam dan Mesin yang Difasilitasi dengan Teknologi                    | 20 IKM   |        | --      | 20 IKM Logam, Mesin dan Elektronik yang di Bina       | 41 IKM Logam, Mesin dan Elektronik yang di Bina       | 20 IKM Logam, Mesin dan Elektronik yang di Bina       | 44 IKM Logam, Mesin dan Elektronik yang di Bina       | 20 IKM Logam, Mesin dan Elektronik yang di Bina       |         | 120 IKM Logam, Mesin dan Elektronik yang di Bina                   |     |
|        |         |          | Pengembangan Sentra Industri Agro Terpadu                        | Jumlah Produksi Pakan Temak yang Dihasilkan oleh Sentra Industri Agro                |  | 67 Ton   | 96,5 Ton | 72 Ton | 2.5 Ton |   |   |   |   |   |         |  |     |
|        |         |          | Pengembangan Sistem Informasi IKM                                | Data Informasi IKM   |  |  | --       |        | --      | 1 Sistem Informasi IKM                                | 0 Sistem Informasi IKM                                | 1 Sistem Informasi IKM                                | 0 Sistem Informasi IKM                                | 1 Sistem Informasi IKM                                |         | 1 Sistem Informasi IKM   |     |
|        |         |          | Penumbuhan IKM   | Meningkatnya Jumlah IKM  | 14025 IKM  |  |          |        |         |   |   |   |   |   |         |  |     |
|        |         |          | Pengembangan Dekranasda Provinsi Gorontalo                       | Tersedianya Sarana dan Prasarana Dekranasda Provinsi Gorontalo                       | 1 Kegiatan                                       |  |          |        |         |   |   |   |   |   |         |  |     |
|        |         |          | Pengembangan Agro Industri Terpadu                               | Jumlah Industri Agro Terpadu   | 1 Industri Terpadu                               |  | --       |        | --      | 1 Industri Agro Terpadu                               | -   | 1 Industri Agro Terpadu                               | 1 Industri Agro Terpadu                               | 1 Industri Agro Terpadu                               |         | 1 Industri Agro Terpadu  |     |
|        |         |          |  |  |  |  |          |        |         |   |   |   |   |   |         |  |     |

\*(Rp. 000.000)

## 2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2018 – 2021

Selang tahun 2018–2021 anggaran Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.22. Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

| Tahun Anggaran | Jumlah Anggaran | Realisasi Keuangan |       | Realisasi Fisik (%) |
|----------------|-----------------|--------------------|-------|---------------------|
|                |                 | (Rp)               | %     |                     |
| 2018           | 10,525,518,124  | 10,254,167,340     | 97.42 | 100                 |
| 2019           | 17,689,662,000  | 17,493,053,361     | 98.89 | 100                 |
| 2020           | 25,361,940,934  | 25,198,325,932     | 99.35 | 100                 |
| 2021           | 25,655,968,548  | 24,664,970,660     | 96.14 | 99.21               |
| 2022           | 26,207,354,748  |                    |       |                     |

Secara lebih detail, anggaran pelayanan SKPD dapat dilihat pada Tabel 2.23 di bawah ini.

Tabel 2.23. Anggaran dan Realisasi Pendanaan SKPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

| Uraian        | Anggaran pada Tahun Ke (Rp. 000) |                   |                   |                   |                   | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke (Rp. 000) |                   |                   |                   |                   | Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke |              |              |              |              | Rata-rata Pertumbuhan |              |
|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
|               | 2017                             | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2017                                       | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2017  | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Anggaran              | Realisasi    |
| Koperasi      | 2.040.900                        | 1.520.175         | 1.937.100         | 1.529.952         | 2.785.438         | 2.033.560                                  | 1.480.165         | 1.918.097         | 1.528.112         | 2.783.390         | 99,64   | 97,37        | 99,02        | 99,88        | 99,93        | 26,73                 | 26,94        |
| UKM           | 1.625.670                        | 2.285.410         | 1.581.250         | 1.175.282         | 660.299           | 1.543.870                                  | 2.257.711         | 1.549.995         | 1.171.903         | 641.535           | 94,97   | 98,79        | 98,02        | 99,71        | 97,16        | (146,20)              | (140,65)     |
| Perdagangan   | 3.361.870                        | 2.705.270         | 8.774.759         | 19.210.015        | 2.782.328         | 3.231.913                                  | 2.518.683         | 8.741.106         | 19.206.991        | 2.747.513         | 96,13   | 93,10        | 99,62        | 99,98        | 98,75        | (20,83)               | (17,63)      |
| Perindustrian | 1.267.800                        | 1.230.410         | 817.300           | 834.155           | 1.973.825         | 1.258.857                                  | 1.227.537         | 808.689           | 816.916           | 1.740.014         | 99,29   | 99,77        | 98,95        | 97,93        | 88,15        | 35,77                 | 27,65        |
| UPTD BPSMB    | 580.820                          | 346.159           | 1.524.475         | 228.305           | 423.431           | 575.842                                    | 345.963           | 1.508.636         | 220.070           | 420.753           | 99,14   | 99,94        | 98,96        | 96,39        | 99,37        | (37,17)               | (36,86)      |
| Sekretariat   | 2.540.552                        | 2.438.095         | 3.054.778         | 2.384.232         | 17.030.646        | 2.457.221                                  | 2.424.109         | 2.966.531         | 2.254.334         | 16.331.766        | 96,72   | 99,43        | 97,11        | 94,55        | 95,90        | 85,08                 | 84,95        |
| <b>Total</b>  | <b>11.417.612</b>                | <b>10.525.518</b> | <b>17.689.662</b> | <b>25.361.941</b> | <b>25.655.969</b> | <b>11.101.262</b>                          | <b>10.254.167</b> | <b>17.493.053</b> | <b>25.198.326</b> | <b>24.664.971</b> | <b>97,23</b>                                      | <b>97,42</b> | <b>98,89</b> | <b>99,35</b> | <b>96,14</b> | <b>55,50</b>          | <b>54,99</b> |

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2022

Tabel 2.23. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2021

| No | PROGRAM/KEGIATAN  | Anggaran pada Tahun Ke (Rp. 000) |           |           |      | Realisasi pada Tahun Ke (Rp. 000) |           |           |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke |      |      |      |
|----|---|----------------------------------|-----------|-----------|------|-----------------------------------|-----------|-----------|------|---|------|------|------|
|    |   | 2018                             | 2019      | 2020      | 2021 | 2018                              | 2019      | 2020      | 2021 | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1  | <b>Program Pelayanan Administrasi Sarana Prasarana dan SDM Aparatur</b> | 1.601.995                        | 2.165.658 | 1.898.138 |      | 1.588.766                         | 2.072.887 | 1.793.372 |      | 99  | 96   | 94   |      |
|    | Pelayanan jasa administrasi perkantoran                                 | 776.372                          | 749.360   | 586.790   |      | 767.936                           | 683.870   | 520.762   |      | 99  | 91   | 89   |      |
|    | Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran                            | 525.623                          | 1.115.698 | 1.128.341 |      | 525.401                           | 1.102.319 | 1.097.837 |      | 100   | 99   | 97   |      |
|    | Peningkatan Kualitas SDM Aparatur                                       | 150.000                          | 150.600   | 56.212    |      | 149.696                           | 143.192   | 56.212    |      | 100   | 95   | 100  |      |
|    | Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD BPSMB                      | 150.000                          | 150.000   | 126.795   |      | 145.733                           | 143.506   | 118.560   |      | 97  | 96   | 94   |      |
| 2  | <b>Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan</b>          | 836.100                          | 1.039.120 | 612.888   |      | 835.343                           | 1.037.150 | 579.523   |      | 100   | 100  | 95   |      |
|    | Perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi program/kegiatan       | 778.200                          | 929.120   | 584.200   |      | 777.509                           | 927.150   | 550.845   |      | 100   | 100  | 94   |      |
|    | Penatausahaan & Pelaporan Keuangan SKPD                                 | 57.900                           | 110.000   | 28.688    |      | 57.834                            | 110.000   | 28.678    |      | 100   | 100  | 100  |      |
| 3  | <b>Program Pengembangan Koperasi dan UKM</b>                            | 520.175                          | 437.100   | 227.302   |      | 517.145                           | 434.574   | 225.462   |      | 99  | 99   | 99   |      |
|    | Penguatan SDM dan Kelembagaan Koperasi                                  | 89.375                           | 90.875    | 9.945     |      | 89.375                            | 90.290    | 9.945     |      | 100   | 99   | 100  |      |
|    | Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi              | 137.825                          | 176.225   | 38.160    |      | 137.419                           | 176.020   | 38.160    |      | 100   | 100  | 100  |      |
|    | Peningkatan Akses Permodalan dan Efektifitas Pembiayaan Bagi KUKM       | 177.900                          | 170.000   | 179.197   |      | 175.941                           | 168.265   | 177.357   |      | 99  | 99   | 99   |      |
|    | Pengembangan Layanan Usaha KUKM   | 115.075                          |           |           |      | 114.410                           |           |           |      | 99  |      |      |      |
| 4  | <b>Program Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah</b>                    | 785.410                          | 483.900   | 177.932   |      | 774.436                           | 479.042   | 176.252   |      | 99  | 99   | 99   |      |
|    | Peningkatan SDM dan Penguatan Kelembagaan UMKM                          | 228.900                          | 203.900   | 38.982    |      | 227.839                           | 203.897   | 37.302    |      | 100   | 100  | 96   |      |
|    | Pembinaan UMKM Naik Kelas   | 137.850                          | 180.000   | 65.824    |      | 130.733                           | 177.489   | 65.824    |      | 95  | 99   | 100  |      |
|    | Lomba Inovasi/UMKM Model dan Percontohan Daerah                         | 155.700                          |           |           |      | 155.684                           |           |           |      | 100   |      |      |      |
|    | Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UKM/IKM                                | 125.460                          |           |           |      | 122.700                           |           |           |      | 98  |      |      |      |
|    | Promosi dan Pemasaran Produk UMKM                                       | 137.500                          | 100.000   | 73.126    |      | 137.480                           | 97.656    | 73.126    |      | 100   | 98   | 100  |      |
| 5  | <b>Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan (DAK)</b>     | 2.500.000                        | 2.597.350 | 2.300.000 |      | 2.446.295                         | 2.554.476 | 2.298.300 |      | 98  | 98   | 100  |      |
|    | Peningkatan Kapasitas SDM UMKM (DAK) (Diskumperindag)                   | 1.500.000                        | 1.097.350 | 997.350   |      | 1.483.275                         | 1.070.954 | 995.651   |      | 99  | 98   | 100  |      |
|    | Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi (DAK) (Diskumperindag)               | 1.000.000                        | 1.500.000 | 1.302.650 |      | 963.020                           | 1.483.522 | 1.302.650 |      | 96  | 99   | 100  |      |

| No | PROGRAM/KEGIATAN  | Anggaran pada Tahun Ke (Rp. 000) |           |            |            | Realisasi pada Tahun Ke (Rp. 000) |           |            |            | Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke |      |      |      |
|----|---|----------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-----------|------------|------------|---|------|------|------|
|    |   | 2018                             | 2019      | 2020       | 2021       | 2018                              | 2019      | 2020       | 2021       | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 6  | <b>Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan dalam Negeri</b>     | 2.547.190                        | 8.609.859 | 19.182.677 |            | 2.360.608                         | 8.577.811 | 19.179.653 |            | 93  | 100  | 100  |      |
|    | Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis                  | 2.461.409                        | 8.510.994 | 19.159.647 |            | 2.274.827                         | 8.480.765 | 19.156.623 |            | 92  | 100  | 100  |      |
|    | Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa                        | 85.781                           | 98.865    | 23.030     |            | 85.781                            | 97.046    | 23.030     |            | 100   | 98   | 100  |      |
|    | Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Konsumen                            |                                  |           |            |            |                                   |           |            |            |   |      |      |      |
| 7  | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor daerah</b>               | 158.080                          | 164.900   | 27.338     |            | 158.075                           | 163.294   | 27.338     |            | 100   | 99   | 100  |      |
|    | Promosi dan Pengembangan Produk Ekspor                                  | 158.080                          | 164.900   | 27.338     |            | 158.075                           | 163.294   | 27.338     |            | 100   | 99   | 100  |      |
| 8  | <b>Program Peningkatan Standardisasi Mutu Barang</b>                    | 346.159                          | 1.374.475 | 101.510    |            | 345.963                           | 1.365.130 | 101.510    |            | 100   | 99   | 100  |      |
|    | Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang                                   | 264.638                          | 1.216.400 | 69.905     |            | 264.447                           | 1.208.344 | 69.905     |            | 100   | 99   | 100  |      |
|    | Penerapan Standardisasi Mutu Barang                                     | 81.522                           | 158.075   | 31.605     |            | 81.516                            | 156.787   | 31.605     |            | 100   | 99   | 100  |      |
| 9  | <b>Program Pengembangan Industri Kecil Menengah</b>                     | 1.230.410                        | 817.300   | 834.155    |            | 1.227.537                         | 808.689   | 816.916    |            | 100   | 99   | 98   |      |
|    | Pengembangan Agro Industri & Industri Pangan Daerah                     | 118.900                          | 300.000   | 152.866    |            | 118.095                           | 298.567   | 150.346    |            | 99  | 100  | 98   |      |
|    | Pengembangan Industri Kerajinan Daerah                                  | 536.080                          | 357.300   |            |            | 535.609                           | 352.571   |            |            | 100   | 99   |      |      |
|    | Pengembangan Industri Hulu dan Hilir                                    | 60.180                           |           |            |            | 59.075                            |           |            |            | 98  |      |      |      |
|    | Pembinaan teknologi Industri Pangan                                     | 122.170                          |           |            |            | 121.984                           |           |            |            | 100   |      |      |      |
|    | Pembinaan Teknologi Industri Kimia, Kerajinan, Sandang dan Aneka        | 79.250                           |           | 395.153    |            | 79.248                            |           | 389.539    |            | 100   |      | 99   |      |
|    | Pembinaan Teknologi Industri Logam dan Mesin                            | 88.480                           |           | 9.800      |            | 88.278                            |           | 9.777      |            | 100   |      | 100  |      |
|    | Pengembangan sentra industri agro terpadu                               | 225.350                          |           |            |            | 225.249                           |           |            |            | 100   |      |      |      |
|    | Pengembangan industri agro terpadu                                      |                                  | 160.000   | 122.068    |            |                                   | 157.550   | 118.608    |            |   | 98   | 97   |      |
|    | Pengembangan Sistem Informasi IKM                                       |                                  |           | 154.269    |            |                                   |           | 148.646    |            |   |      | 96   |      |
| 10 | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>            |                                  |           |            | 17.030.646 |                                   |           |            | 16.331.766 |   |      |      | 96   |
|    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |                                  |           |            | 1.097.313  |                                   |           |            | 1.091.642  |   |      |      | 99   |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         |                                  |           |            | 1.091.642  |                                   |           |            | 1.091.642  |   |      |      | 100  |
|    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |                                  |           |            | 9.298.358  |                                   |           |            | 9.278.226  |   |      |      | 100  |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       |                                  |           |            | 9.197.230  |                                   |           |            | 9.179.023  |   |      |      | 100  |
|    | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD        |                                  |           |            | 101.128    |                                   |           |            | 99.203     |   |      |      | 98   |
|    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        |                                  |           |            | 239.725    |                                   |           |            | 235.439    |   |      |      | 98   |

| No | PROGRAM/KEGIATAN   | Anggaran pada Tahun Ke (Rp. 000) |      |      |                  | Realisasi pada Tahun Ke (Rp. 000) |      |      |                  | Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke |      |      |      |
|----|--|----------------------------------|------|------|------------------|-----------------------------------|------|------|------------------|---|------|------|------|
|    |  | 2018                             | 2019 | 2020 | 2021             | 2018                              | 2019 | 2020 | 2021             | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
|    | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  |                                  |      |      | 239.725          |                                   |      |      | 235.439          |   |      |      | 98   |
|    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  |                                  |      |      | <b>5.286.967</b> |                                   |      |      | <b>4.689.782</b> |   |      |      | 89   |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |                                  |      |      | 5.286.967        |                                   |      |      | 4.689.782        |   |      |      | 89   |
|    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                                  |      |      | <b>1.108.283</b> |                                   |      |      | <b>1.036.677</b> |   |      |      | 94   |
|    | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |                                  |      |      | 1.108.283        |                                   |      |      | 1.036.677        |   |      |      | 94   |
|    |  |                                  |      |      |                  |                                   |      |      |                  |   |      |      |      |
| 11 | <b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>   |                                  |      |      | <b>130.018</b>   |                                   |      |      | <b>129.825</b>   |   |      |      | 100  |
|    | <b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>             |                                  |      |      | <b>130.018</b>   |                                   |      |      | <b>129.825</b>   |   |      |      | 100  |
|    | Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat |                                  |      |      | 130.018          |                                   |      |      | 129.825          |   |      |      | 100  |
|    |  |                                  |      |      |                  |                                   |      |      |                  |   |      |      |      |
| 12 | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>  |                                  |      |      | <b>2.438.991</b> |                                   |      |      | <b>2.438.636</b> |   |      |      | 100  |
|    | <b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>             |                                  |      |      | <b>2.438.991</b> |                                   |      |      | <b>2.438.636</b> |   |      |      | 100  |
|    | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi  |                                  |      |      | 2.438.991        |                                   |      |      | 2.438.636        |   |      |      | 100  |
|    |  |                                  |      |      |                  |                                   |      |      |                  |   |      |      |      |
| 13 | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>  |                                  |      |      | <b>216.429</b>   |                                   |      |      | <b>214.929</b>   |   |      |      | 99   |
|    | <b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>                  |                                  |      |      | <b>216.429</b>   |                                   |      |      | <b>214.929</b>   |   |      |      | 99   |
|    | Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha   |                                  |      |      | 216.429          |                                   |      |      | 214.929          |   |      |      | 99   |
|    |  |                                  |      |      |                  |                                   |      |      |                  |   |      |      |      |

| No | PROGRAM/KEGIATAN  | Anggaran pada Tahun Ke (Rp. 000) |      |      |           | Realisasi pada Tahun Ke (Rp. 000) |      |      |           | Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke |      |      |      |
|----|---|----------------------------------|------|------|-----------|-----------------------------------|------|------|-----------|---|------|------|------|
|    |   | 2018                             | 2019 | 2020 | 2021      | 2018                              | 2019 | 2020 | 2021      | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 14 | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>   |                                  |      |      | 200.000   |                                   |      |      | 197.010   |   |      |      | 99   |
|    | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan  |                                  |      |      | 200.000   |                                   |      |      | 197.010   |   |      |      | 99   |
|    | Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan              |                                  |      |      | 200.000   |                                   |      |      | 197.010   |   |      |      | 99   |
|    |   |                                  |      |      | -         |                                   |      |      |           |   |      |      |      |
| 15 | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>  |                                  |      |      | 460.300   |                                   |      |      | 444.525   |   |      |      | 97   |
|    | <b>Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>   |                                  |      |      | 460.300   |                                   |      |      | 444.525   |   |      |      | 97   |
|    | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi   |                                  |      |      | 460.300   |                                   |      |      | 444.525   |   |      |      | 97   |
|    |   |                                  |      |      |           |                                   |      |      |           |   |      |      |      |
| 16 | <b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>  |                                  |      |      | 2.295.494 |                                   |      |      | 2.294.046 |   |      |      | 100  |
|    | <b>Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</b> |                                  |      |      | 2.295.494 |                                   |      |      | 2.294.046 |   |      |      | 100  |
|    | Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  |                                  |      |      | 2.295.494 |                                   |      |      | 2.294.046 |   |      |      | 100  |
|    |   |                                  |      |      |           |                                   |      |      |           |   |      |      |      |
| 17 | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>  |                                  |      |      | 62.821    |                                   |      |      | 62.521    |   |      |      | 100  |
|    | <b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi</b>                            |                                  |      |      | 62.821    |                                   |      |      | 62.521    |   |      |      | 100  |
|    | Pameran Dagang Internasional/Nasional   |                                  |      |      | 62.821    |                                   |      |      | 62.521    |   |      |      | 100  |
|    |   |                                  |      |      |           |                                   |      |      |           |   |      |      |      |
| 18 | <b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>  |                                  |      |      | 847.445   |                                   |      |      | 811.699   |   |      |      | 96   |

| No | PROGRAM/KEGIATAN  | Anggaran pada Tahun Ke (Rp. 000) |                   |                   |                   | Realisasi pada Tahun Ke (Rp. 000) |                   |                   |                   | Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke |           |           |           |
|----|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|
|    |   | 2018                             | 2019              | 2020              | 2021              | 2018                              | 2019              | 2020              | 2021              | 2018  | 2019      | 2020      | 2021      |
|    | <b>Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>   |                                  |                   |                   | 362.148           |                                   |                   |                   | 329.081           |   |           |           | 91        |
|    | Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen   |                                  |                   |                   | 362.148           |                                   |                   |                   | 329.081           |   |           |           | 91        |
|    | <b>Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>   |                                  |                   |                   | 423.431           |                                   |                   |                   | 420.753           |   |           |           | 99        |
|    | Pengembangan Layanan Pengujian  |                                  |                   |                   | 285.235           |                                   |                   |                   | 284.018           |   |           |           | 100       |
|    | Pengembangan Layanan Sertifikasi  |                                  |                   |                   | 138.196           |                                   |                   |                   | 136.734           |   |           |           | 99        |
|    | <b>Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>   |                                  |                   |                   | 61.866            |                                   |                   |                   | 61.866            |   |           |           | 100       |
|    | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen  |                                  |                   |                   | 61.866            |                                   |                   |                   | 61.866            |   |           |           | 100       |
|    |   |                                  |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |   |           |           |           |
| 19 | <b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>   |                                  |                   |                   | 1.819.507         |                                   |                   |                   | 1.595.909         |   |           |           | 88        |
|    | <b>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>  |                                  |                   |                   | 1.819.507         |                                   |                   |                   | 1.595.909         |   |           |           | 88        |
|    | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi  |                                  |                   |                   | 219.179           |                                   |                   |                   | 215.807           |   |           |           | 98        |
|    | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri  |                                  |                   |                   | 722.283           |                                   |                   |                   | 517.132           |   |           |           | 72        |
|    | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat  |                                  |                   |                   | 667.657           |                                   |                   |                   | 660.941           |   |           |           | 99        |
|    | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri  |                                  |                   |                   | 210.388           |                                   |                   |                   | 202.030           |   |           |           | 96        |
|    |   |                                  |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |   |           |           |           |
| 20 | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>   |                                  |                   |                   | 154.319           |                                   |                   |                   | 144.104           |   |           |           | 93        |
|    | <b>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</b>                             |                                  |                   |                   | 154.319           |                                   |                   |                   | 144.104           |   |           |           | 93        |
|    | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) |                                  |                   |                   | 154.319           |                                   |                   |                   | 144.104           |   |           |           | 93        |
|    | <b>TOTAL</b>  | <b>10.525.518</b>                | <b>17.689.662</b> | <b>25.361.941</b> | <b>25.655.969</b> | <b>10.254.167</b>                 | <b>17.493.053</b> | <b>25.198.326</b> | <b>24.664.971</b> | <b>97</b>   | <b>99</b> | <b>99</b> | <b>96</b> |

#### **D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat secara keseluruhan yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap terarah dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi, politik dan ideologi dan bersifat komprehensif bagi masyarakat.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

Analisis di lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Kumperindag Provinsi Gorontalo.

#### **1. Analisis Lingkungan Internal**

##### ***a. Analisis Kekuatan (Strength)***

Guna menghadapi tantangan dan peluang kedepan, Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo memiliki kekuatan antara lain:

- Visi dan misi organisasi yang jelas dan fokus
- Struktur OTK yang jelas membidangi Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
- Didukung oleh 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas yakni UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB)
- Laboratorium UPTD BPSMB telah TER-AKREDITASI oleh Komite Akreditasi Nasional
- PLUT KUKM memiliki fungsi pelayanan Usaha secara terpadu bagi Pengembangan Koperasi dan UMKM
- SDM yang memadai dari sisi jumlah maupun latar belakang pendidikan
- Didukung oleh aturan perundang-undangan dan regulasi pemerintah di bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

- Political will pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

## 2. Analisis Kelemahan (*Weakness*)

- SDM aparatur yang memiliki sertifikat keahlian khusus masih sangat terbatas
- Masih kurangnya tenaga fungsional pembinaan dan penyuluhan KUKM dan pengawas perdagangan,
- Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi belum memadai (kendaraan dinas operasional roda dua dan roda empat, peralatan laboratorium, infrastruktur teknologi informasi dan lain-lain)
- Masih terbatasnya fasilitas laboratorium UPTD BPSMB sebagai sarana pengujian dan sertifikasi mutu barang ekspor dan antar pulau
- Belum adanya system manajemen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program dan kegiatan yang terintegrasi dengan kabupaten/ kota
- Masih lemahnya koordinasi dan keterkaitan program antara unit kerja dalam Dinas Kumperindag
- Volume dan beban kerja sangat tinggi
- Jumlah penelitian dan kajian tentang koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan belum ada
- Belum semua pelayanan public di Dinas Kumperindag memiliki SOP
- Anggaran SKPD masih sangat terbatas dibandingkan dengan tugas, fungsi dan kewenangan dimiliki
- Jabatan bagian perencanaan Dinas Kumperindag yang bertanggungjawab terhadap perencanaan dan evaluasi program hanya setingkat eselon IV, sementara tingkat aktifitas kerja dan tanggung jawab sangat tinggi.

## 3. Analisis Lingkungan Eksternal

### a. Analisis Peluang (*Opportunities*)

Kedepan, Dinas Kumperindag dihadapkan pada sejumlah peluang antara lain:

- Makin meningkatnya jumlah koperasi, UMKM, Industri Kecil Menengah dan pelaku usaha termasuk asosiasi profesi yang menaunginya
- Makin tingginya tuntutan terhadap kuantitas dan kualitas mutu produk KUMKM, IKM dan pelaku usaha yang berstandar nasional dan internasional

- Layanan pengujian mutu produk oleh UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Ketersediaan produk pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan makin meningkat
- Tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan semakin tinggi
- Makin tingginya tuntutan terhadap kualitas SDM pelaku koperasi, UKM, IKM dan pelaku usaha dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas produk
- Terbukanya kesempatan berusaha yang luas di sector industri kreatif seperti fesyen, pariwisata, radio dan film, desain grafis, dekorasi, industri daur ulang, dan lain-lain.
- Permintaan pasar terhadap produk unggulan yang berkualitas dan tersedia secara memadai untuk ekspor maupun antar pulau akan semakin meningkat
- Dukungan perbankan dalam perkuatan modal usaha bagi KUMKM, IKM dan pelaku usaha akan semakin besar
- Makin meningkatnya daya dukung perguruan tinggi dan lembaga riset untuk pengembangan KUMKM, industri dan perdagangan
- Makin meningkatnya daya dukung anggaran Dinas Kumperindag yang dibarengi dengan makin tingginya tuntutan kualitas kinerja hasil dan akuntabilitas publik
- Makin menjamurnya praktek ijon berkedok koperasi dan lembaga kredit mikro

**b. Analisis Ancaman (Threat)**

Kedepan, Dinas Kumperindag akan menghadapi sejumlah tantangan dan ancaman antara lain:

- Kesadaran masyarakat akan pentingnya berkoperasi masih sangat rendah
- Kapasitas kewirausahaan, *skill*, dan *market intelligent* sebagian besar pelaku usaha dan koperasi di daerah masih rendah

- Standar mutu produk dan kemasan yang dihasilkan oleh pelaku industri di daerah belum memenuhi standar baku mutu nasional dan internasional
- Semakin ketatnya standarisasi produk ekspor akibat persaingan pasar global yang akan membatasi ekspor komoditi unggulan daerah
- Makin tingginya arus barang impor yang masuk ke Gorontalo
- Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting memicu kenaikan harga dasar barang kebutuhan pokok dan penting di daerah
- Jumlah penduduk dan angkatan kerja makin meningkat sementara kapasitas lapangan kerja/usaha yang tersedia terbatas akan memicu peningkatan pengangguran dan kemiskinan di daerah

**BAB III****PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo didasarkan pada beberapa hal utama yaitu sumber daya manusia, produksi dan pemasaran, pembiayaan, kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM, belum membaiknya distribusi barang dan jasa, lemahnya akses pasar luar negeri produk dan komoditi unggulan Gorontalo, serta belum optimalnya kinerja layanan dan akuntabilitas publik OPD.

Beberapa permasalahan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo antara lain:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berkoperasi
2. Rendahnya kepatuhan terhadap tata kelola manajemen kelembagaan dan usaha koperasi
3. Rendahnya produktivitas, akses permodalan dan pemasaran produk KUKM.
4. Rendahnya kualitas SDM terhadap pengelolaan, keterampilan dan kewirausahaan KUKM.
5. Masih perlunya peningkatan kualitas SDM industri kecil menengah dalam hal skill, manajemen usaha dan akses terhadap permodalan
6. Masih perlunya peningkatan produktivitas dan pemasaran produk IKM, baik pasar lokal, regional, nasional dan internasional
7. Masih perlunya pengembangan sentra dan kluster industri di daerah, untuk meningkatkan jumlah dan investasi dibidang industri
8. Belum ada kawasan Industri terpadu di Provinsi Gorontalo
9. Fluktuasi Harga Barang Kebutuhan Pokok
10. Tingginya Biaya Logistik
11. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait BPSK
12. Kurangnya intensitas pengawasan kegiatan perdagangan dan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
13. Kurangnya fasilitas pengembangan produk potensial daerah
14. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur ekspor
15. Kurangnya sarana dan prasarana Laboratorium dan operasional BPSMB

16. Masih rendahnya kualitas SDM aparatur Dinas Kumperindag
17. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan SKPD
18. Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD
19. Masih rendahnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan monev program dan kegiatan SKPD.
20. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan lintas pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

**B. Tealaahan Visi Misi dan Program sesuai dengan RPJPD Gorontalo 2007-2025**

**Visi : “Gorontalo Maju dan Mandiri 2007 – 2025**

**Misi :**

1. Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Gorontalo yang Handal
3. Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah

**Tujuan :**

1. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasardengan indikator tujuan sebagai berikut :
  - ~ Rasio Konektivitas Provinsi
2. Meningkatnya kelembagaan dan proses bisnis yang lebih sederhana, pelayanan publik yang lebih berkualitas serta akuntabilitas kinerja dan perencanaan, pengawasan, yang handal, efektif dan berintegritas :
  - Nilai SAKIP (dari B menjadi A)
  - Nilai WTP
  - Indeks Kepuasan Masyarakat
  - Indeks Inovasi Daerah
  - ~ Presentase Hasil Temuan (Nol Temuan)

### C. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota

Analisis terhadap Renstra Kementerian/Lembaga di Pusat meliputi Renstra 3 (tiga) Kementerian, yakni Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Sedangkan analisis Renstra Kabupaten/Kota meliputi Renstra Dinas Koperasi, UMKM Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo, Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Bone Bolango.

#### 1. Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa tidak ada lagi visi dan misi Menteri, hanya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karenanya Kementerian Koperasi dan UKM mengarahkan visi dan misinya untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Dalam rangka menjalankan amanat Presiden seta untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal dan fokus dalam pengembangan Koperasi dan UMKM maka visi Kementerian Koperasi dan UKM dalam 5 (lima) tahun kedepan diarahkan untuk mendukung Presiden dalam mewujudkan misinya yaitu: “Koperasi dan UMKM yang Maju, Berdaulat dan Mandiri untuk mendukung Presiden mewujudkan misi struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing”.

Dalam rangka mewujudkan visi dari Pengembangan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan, maka tujuan pengembangan Koperasi dan UMKM tahun 2020-224 diarahkan untuk:

1. Terwujudnya koperasi generasi baru yang maju dan modern, dengan hasil:
  - a. Modernisasi Koperasi
  - b. Melahirkan wirausaha baru (*New Enterpreuner*)
2. Terwujudnya UMKM yang mampu berdaya bersaing di pasar domestic dan global dengan hasil:
  - a. Integrasi UMKM dalam *Global Value Chain (GVC)*
  - b, UMKM Naik Kelas (*Scaling Up*)

3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang professional dan berkinerja tinggi, dengan hasil:
  - a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM
  - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM

Berdasarkan tujuan tersebut diatas maka Sasaran yang hendak dicapai oleh Kementerian KUKM RI adalah:

- a. Mewujudkan koperasi modern yang berdaulat, mandiri dan maju
- b. Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang berdaulat dan mampu berdaya saing di pasar domestic dan global
- c. Menyediakan kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM yang efektif
- d. Menyelenggarakan kebijakan pengembangan Koperasi dan UMKM melalui program/kegiatan yang efektif, efisien bermanfaat dan berkelanjutan
- e. Menyelenggarakan pengendalian pengawasan kebijakan pengembangan Koperasi dan UKM
- f. Mewujudkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara Kementerian Koperasi dan UKM
- g. Mewujudkan system data dan informasi pengembangan koperasi dan UMKM yang terintegrasi
- h. Mewujudkan tata kelola pemerintah Kementerian Koperasi dan UKM yang baik
- i. Mewujudkan akuntabilitas kinerja dan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM yang baik.

Dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian KUKM RI Tahun 2020 – 2024, maka Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo perlu menetapkan program dan kegiatan yang sejalan dengan kebutuhan daerah dan bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional di sektor koperasi dan UMKM. Keterpaduan dan sinergi program pusat dan daerah sangat menentukan keberhasilan pembangunan koperasi dan UMKM di Gorontalo, yang didukung dengan dana APBD dan APBN (dekonsentrasi tugas pembantuan).

## **2. Renstra Kementerian Perdagangan Republik Indonesia**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian/Lembaga wajib mengacu pada visi dari Presiden dan Wakil Presiden. Teknis penyusunan visi dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Perdagangan periode 2020-2024

dilakukan dengan menyelaraskan visi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu dalam Renstra Kementerian Perdagangan menetapkan visi 2020-2024 sebagai berikut. “Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Mengacu pada Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka dalam Renstra Kementerian Perdagangan 2020 – 2024, ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Sektor Perdagangan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang tersebut diatas serta memperhatikan potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi; maka Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa; untuk menciptakan surplus neraca perdagangan yang ditopang oleh ekspor non-migas bernilai tambah dan jasa sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Adapun yang menjadi indicator pencapaian tujuan ini adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.1. Neraca Perdagangan 2020-2024

| Indikator                       | Tahun |      |      |      |      |
|---------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                 | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Neraca Perdagangan (USD Miliar) | 0,3   | 1,0  | 3,0  | 7,5  | 15,0 |

Sumbetr : Renstra Kementerian Perdagangan 2020-2024

2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi; melalui stabilisasi harga dan barang kebutuhan pokok, konsumen berdaya dan pelaku usaha bertanggung jawab, peningkatan pasar produk dalam negeri, dan optimalisasi peran Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas sehingga mendukung peningkatan nilai tambah

ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

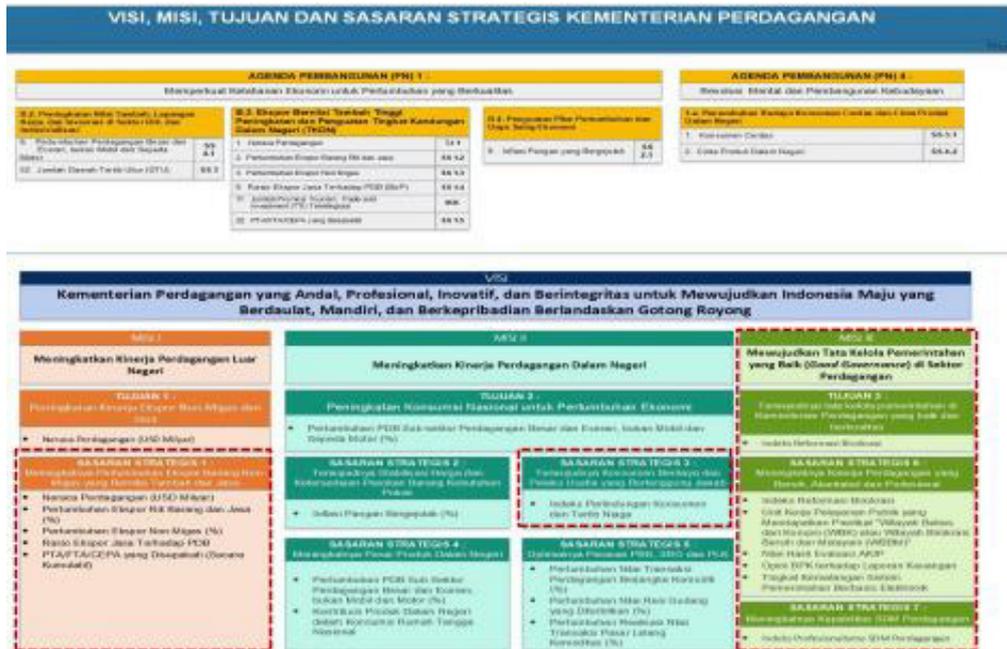
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas; melalui peningkatan kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional, serta peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia perdagangan.

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan dan merupakan kondisi yang akan dicapai oleh Kementerian Perdagangan selama periode pembangunan tahun 2020- 2024 dan dapat diukur secara nyata melalui indikator-indikator kinerja. Sasaran strategis Kementerian Perdagangan adalah

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa;
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok;
3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;
4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri;
5. Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK;
6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional; dan
7. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan

Adapun keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai pada masing-masing tujuan yang telah dipaparkan di atas, secara umum dapat dilihat pada diagram berikut :

Gambar 3. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perdagangan 2020-2024



Sumber : Renstra Kemendag 2020-2024

### 3. Renstra Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Kementerian Perindustrian sebagai menteri yang membantu Presiden di bidang perindustrian, maka visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024. Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong apabila dipandang dalam sudut pandang sektor industri yaitu mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi Making Indonesia 4.0 untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata

Mengacu berdasarkan visi Presiden dan Wakil Presiden diatas berusaha untuk dicapai melalui 9 (sembilan) misi yang telah dimandatkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2020-2024, maka 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden yang juga merupakan Misi Kementerian Perindustrian yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Kementerian Perindustrian senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh stakeholder industri, yakni pemerintah baik pusat/ daerah, investor, pengusaha, asosiasi, pegawai/ karyawan, dan masyarakat industri lainnya. Kesembilan misi-misi di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong bagi semua kementerian/lembaga. Kementerian Perindustrian fokus pada pembangunan dan pengembangan sektor industri pengolahan nonmigas sehingga dapat memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi kepentingan bangsa Indonesia.

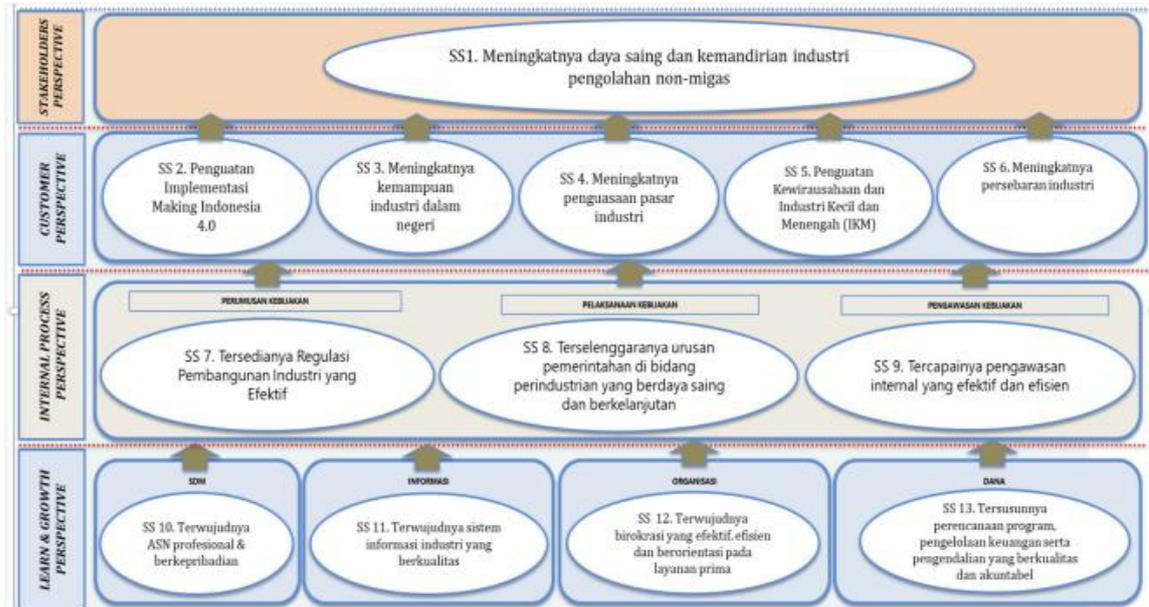
Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu "Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional". Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja tujuan yang juga menjadi indikator kinerja utama, yaitu:

- a. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Non Migas
- b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%)
- c. Tenaga Kerja di Sektor Industri
- d. Nilai Export Produk Industri Pengolahan Nonmigas

Adapun Sasaran strategis pembangunan sektor industri merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Perindustrian sebagai suatu impact/outcome dari 4 (empat) program yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian.

Pada peta strategi Kementerian Perindustrian dapat digambarkan beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan. Sasaran strategis tersebut dicapai melalui indikator kinerja program (indikator kinerja pada unit organisasi setingkat Eselon I) dan indikator kinerja kegiatan (indikator kinerja pada unit organisasi setingkat Eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan). Peta strategi Kementerian Perindustrian dapat di lihat pada gambar 2.1

Gambar 4. Peta Strategi Kementerian Perindustrian



Sumber : Renstra Kementerian perdagangan Tahun 2020-2024

#### 4. Kajian Renstra Kabupaten/Kota

##### a. Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo Tahun 2019-2024

Isu strategis adalah sebagai berikut ini:

- 1) Rendahnya daya saing produk industri kecil menengah (IKM) dikota Gorontalo,
- 2) Terbatasnya sarana penunjang untuk memperlancar distribusi barang dan jasa
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan pelaksanaan Kemetrolgian
- 4). Kurangnya SDM Penera, pengawas dan PPNS

b. Renstra Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Gorontalo Tahun 2019-2024

Isu strategis yang berkembang di lingkup Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut:

- 1). Menciptakan Tenaga Kerja Terampil, Kreatif, Inovatif dan Adaptif
- 2). Meningkatkan Kuantitas Koperasi Sehat
- 3). Mengembangkan Permodalan dan Pembinaan Manajemen UMKM

c. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2026

Isu strategis Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut ini:

Urusan Koperasi

1. Dengan terbatasnya SDM perkoperasian, yang disebabkan keluar, kurangnya pembinaan kualitas SDM melalui Diklat Perkoperasian (Pengawasan, Akuntansi Koperasi, Manajemen SP, Perkoperasian/kelembagaan), sulit untuk monitoring keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Ilegal yang sangat merugikan masyarakat;
2. Masih lemahnya fasilitasi pemerintah berupa akses permodalan bagi Koperasi dengan bertambahnya kepercayaan masyarakat dalam berkoperasi;
3. Masih banyaknya Koperasi yang tidak melaksanakan RAT maupun Laporan progress kelembagaan dan usaha (Simpan pinjam);
4. Masih diperlukan evaluasi secara kompetitif dan terpadu untuk memberikan motivasi kepada pengelola dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan perkoperasian dan mendapatkan progres kinerja yang dapat memacu perkembangan lembaga koperasi yang lain;
5. Masih banyak anggota koperasi yang pinjam untuk kepentingan konsumtif dan bukan produktif;
6. Masih lemahnya pemahaman anggota Koperasi dalam pengembangan modal koperasi sebagai milik bersama
7. Perkembangan koperasi masih lemah disebabkan sumberdaya produktif, permodalan, teknologi, sarana prasarana dan informasi pasar;

8. Kurang tumbuhnya penciptaan wirausaha baru disebabkan pola pikir dan peluang usaha terhadap jiwa kewirausahaan masih rendah

#### URUSAN UMKM

1. Masih lemahnya kesadaran pelaku usaha UMKM dengan hasil produk makanan dan minuman yang masih belum mempunyai PIRT, HAKI dan Ijin Usaha (SIUP/TDP) sehingga tidak dapat menerobos Pasar Modern yang lebih banyak dikunjungi oleh masyarakat;
2. Masih lemahnya fasilitasi pemerintah dalam pengenalan produk UMKM baik di pasar regional maupun nasional yang bisa akses secara tradisional berupa promo, penyediaan space pada Pasar Modern maupun teknologi informasi (WEBSITE UMKM)
3. Masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku UMKM dalam mengolah limbah UMKM menjadi produk bernilai ekonomis melalui pemberdayaan masyarakat sekitar;
4. Masih lemahnya pelaku UMKM skala mikro dalam akses permodalan dengan atau dengan Koperasi maupun CSR untuk pengembangan sektor ekonomi produktif;
5. Masih lemahnya fasilitasi pemerintah dalam mendorong produktifitas usaha melalui bantuan alat produksi;
6. Masih lemahnya pemahaman pelaku UMKM dalam kemitraan baik bersifat SDM, bahan, produksi, permodalan maupun pasar;
7. Masih rendahnya ketrampilan SDM sektor Industri olahan dalam hasil kerajinan maupun makanan dan minuman sehingga kalah dalam persaingan global;
8. Masih rendahnya kompetensi para pengelola UMKM;
9. Mayoritas UMKM bergerak dalam sektor informal tanpa dukungan perijinan usaha sehingga UMKM sulit bersaing dalam mekanisme pasar;
10. Terbatasnya akses UMKM terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan, bahan baku, teknologi, sarana prasarana dan informasi pasar;
11. Kecintaan masyarakat terhadap produk daerah sendiri masih kurang. Menjalin kemitraan dengan pengusaha dari luar daerah terutama pengusaha/pemilik pasar modern

- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2026
- Beberapa isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo :
- 1) Belum terwujudnya daya saing industri dan industri hijau
  - 2) Dominasi skala usaha kecil dalam ekonomi kerakyatan
  - 3) Kondisi Sarana dan prasarana Pasar belum memadai
  - 4) Masih lemahnya kesadaran pelaku usaha untuk berlaku jujur dan peduli terhadap hak konsumen
  - 5). Belum terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Energi dan Mineral yang tertib dan berwawasan lingkungan
- e. Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026
- Isu-isu strategis:
- Bidang Perindustrian :
- 1). Keterlibatan Peran Pemerintah terhadap Output Produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam bentuk pembinaan, pelatihan dan bimbingan teknis yang berdampak positif terhadap pertumbuhan Industri dan PDRB.
  - 2). Pembangunan Gedung dan Ruang Promosi untuk hasil produksi yang dihasilkan.
  - 3). Pembangunan Rumah Kemasan di luar sentra industri
  - 4). Pola pengurusan dokumen dan administrasi perizinan merk produksi yang berlabel SNI
  - 5). Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bentuk Pelatihan dan Bimbingan Tekhnis yang profesional
  - 6). Mewujudkan perlindungan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
  - 7). Studi Banding Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM)
  - 8). Pembangunan UPT Industri di daerah
  - 9). Monitoring dan Evaluasi di tingkatkan
- Bidang Perdagangan :
- 1) Pelaksanaan Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan bagi aparatur yang ahli dan profesional
  - 2). Pembangunan UPT Kemeterologian

- 3). Pembangunan POS pengawasan dibidang ekspor dan import di daerah perbatasan
- 4). Pengawasan dan perlindungan konsumen terhadap barang kadaluarsa dan obat-obat yang tidak layak diperjual belikan kepada masyarakat/konsumen
- 5). Menambahkan dan pembangunan pasar dalam menunjang ekonomi masyarakat
- 6). Monitoring dan Evaluasi di tingkatkan

Bidang Koperasi dan UKM :

- 1). Penambahan aparatur Tenaga Teknis yang memiliki sertifikat dalam melakukan evaluasi dan penilaian kesehatan koperasi
- 2). Peningkatan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan pendidikan serta pembinaan pada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- 3). Penambahan Tenaga Pendamping bagi pelaku Usaha Kecil Menengah dalam pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di daerah
- 4). Monitoring dan Evaluasi di tingkatkan

Urusan Pemerintahan Umum/Sekretariat :

- 1) Penempatan pegawai didasarkan pada standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi.
- 2) Terwujudnya profesionalisme sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
- 3) Pendistribusian pegawai pada masing-masing Bidang di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato dengan spesifikasi disiplin ilmu dan keahlian yang dimilikinya.
- 4) Data base kepegawaian di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato yang dengan mudah dapat diakses guna mendukung pelayanan kepegawaian yang efektif dan efisien
- 5). Terwujud sepenuhnya kedisiplinan aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi, hak dan kewajibannya, terutama dalam mematuhi jam kerja;
- 6) Terwujudnya profesionalisme pegawai penggunaan teknologi informasi dalam menunjang pelayanan kepegawaian

f. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2026

Isu-isu strategis:

- 1) Rendahnya pertumbuhan industri
- 2). Belum efektifnya distribusi barang kebutuhan pokok
- 3). Belum Optimalnya kemampuan Aparat dalam pelayanan publik

g. Renstra Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022 – 2026

Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut:

1. Masih besarnya jumlah penduduk miskin dikabupaten Bone Bolango
2. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka
3. Belum terpenuhinya kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Kabupaten Bone Bolango yang sesuai dengan standar perusahaan;
4. Masih banyaknya kasus perselisihan hubungan industrial yang terjadi;
5. Sangat bersinggungan dengan persoalan hukum dalam penanganan kasus perselisihan HI

h. Renstra Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018-2023

isu-isu strategis Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo Utara untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

- 1) Membangun SDM CERIA (Cerdas, Empatik, Ramah, Inovatif, Amanah), baik SDM Aparatur maupun SDM Masyarakat guna meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat ;
- 2) Perlunya Fasilitas (Pelatihan/Infrastruktur/ Permodalan) dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas UMKM
- 3) Perlunya peningkatan penumbuhan wirausaha baru berbasis sumberdaya lokal berdaya saing global;
- 4) Peningkatan Daya saing Kelembagaan Koperasi dan UKM sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar dalam rangka mendukung perekonomian nasional;
- 5) Perlu dukungan pemerintah untuk menciptakan Sarana Perdagangan (Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko ) yang nyaman

- sehingga kesempatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk makin berkembang kian luas
- 6) Minimnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan tera ulang terhadap alat - alat UTTP; ;
  - 7) Banyaknya produk-produk beredar di pasaran yang tidak memenuhi kaidah standarisasi;
  - 8) Belum optimalnya pengembangan industri berbasis cluster dalam meningkatkan nilai tambah produk berbasis agro (pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan)

Untuk Renstra Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026, masih dalam proses penyusunan bersamaan dengan penyusunan Renstra Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo.

#### **D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo Tahun 2010 – 2030 (Perda Nomor 04 Tahun 2011), disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Gorontalo adalah mewujudkan tatanan ruang wilayah provinsi yang memiliki keseimbangan ekonomi, ekologi, dan social budaya, serta mendukung pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka optimalisasi potensi sumberdaya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata dan pertambangan melalui inovasi dan pengembangan kualitas sumberdaya manusia demi kesejahteraan masyarakat menuju Gorontalo yang Maju dan Mandiri.

Untuk itu maka kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Gorontalo (KSP) meliputi beberapa sudut kepentingan antara lain :

1. Kepentingan pertumbuhan ekonomi;
2. Kepentingan sosial dan budaya;
3. kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi yang ramah lingkungan;
4. Kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Dengan mengacu pada aRTRW Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 tersebut diatas, maka arah pelayanan SKPD Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023– 2026 adalah untuk mendukung:

1. Kawasan peruntukan industri, merupakan kawasan yang potensial dimanfaatkan untuk kegoatan industri yang meliputi :
  - a. Kawasan industri skala besar direncanakan pengembangannya di Kawasan Kabupaten Pohuwato dan kabupaten Gorontalo Utara;
  - b. Kawasan ekonomi strategis meliputi Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango, dan kabupaten Gorontalo;
  - c. Kawasan industri skala kecil dan menengah, yang bersifat strategis dalam skala kabupaten atau kota lokasi dan jenis komoditasnya akan ditentukan lebih rinci dalam RTRW Kabupaten dan RTRW Kota
2. Pengembangan Kawasan Pertanian berkelanjutan yang paduselaraskan dengan pengembangan irigasi teknis berupa KSP Randangan dan sekitarnya, KSP Pawonsari (paguyaman Wonosari) dan sekitarnya, KSP Sumatoa (Sumalata, Tolinggula, Anggrek) dan sekitarnya
3. Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa, yaitu KSP Kota Gorontalo dan sekitarnya dan KSP Marisa dan sekitarnya
4. Pengembangan Kawasan terpadu industri, perdagangan, dan simpul transportasi darat, udara dan kereta api berupa KSP Isimu
5. Pengembangan Kawasan Terpadu Pelabuhan, peti Kemas, dan Pergudangan KSP Anggrek
6. Kawasan Potensi Pengembangan Ekonomi Gorontalo-Paguyaman-Kwandang dengan sektor unggulan agrobisnis dan agroindustri
7. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Gorontalo (KSP)  
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut :
  - a. Pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (pertanian, perkebunan, logam dasar, dan kemaritiman) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur yang difokuskan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan/atau Kawasan Industri (KI) antara lain KEK/KI Palu, KEK Bitung dan KI Takalar;
  - b. Pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata, yaitu destinasi pariwisata prioritas (DPP) dan/atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) antara lain Manado-Likupang/KEK Likupang, DPP Barru Toraja-Makassar Selayar, dan DPP Wakatobi;

- c. Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi melalui pembangunan jalan Trans Sulawesi dan jalan akses ke kawasan pariwisata, dan kawasan perbatasan, antara lain jalan lintas Gorontalo, jalan Trans Sulawesi, Tol Manado Bitung, Jalan lintas tengah dan tenggara Sulawesi, jalan trans/lingkar Pulau Buton, Jalan trans /lingkar pulau Muna, Jalna Lingkar P. Wangi-Wangi (Wakatobi), jalan akses wisata likupang, KA Makassar ParePare, Rekonstruksi pelabuhan Wani, Pengembangan Pelabuhan Bitung, Pengembangan bandara Pohnuato, Bandara Bolaang Mongondow, Pengembangan bandara banggai laut, Bandara bumbu kunik dan pengembangan sistem angkutan umum massal di metropolitan Makassar.

## **E. Penentuan Isu-Isu Strategis**

### **1. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Isu strategis di bidang Koperasi dan UMKM adalah:

- a. Peningkatan pembinaan dan pengawasan koperasi
- b. Peningkatan Akses Pasar, Akses Permodalan,
- c. Peningkatan Kualitas SDM KUKM
- d. Peningkatan daya saing UKM.

Perkembangan UMKM dan koperasi saat ini belum menunjukkan kapasitas mereka sebagai pelaku usaha yang kuat dan berdaya saing. Populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro yang informal, dan memiliki aset dan produktivitas yang rendah. Sementara itu, populasi usaha kecil dan menengah, yang memiliki kapasitas dan aset yang lebih besar, masih sangat rendah. Adapun Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan koperasi dan UMKM adalah:

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berkoperasi.
- b. Rendahnya kepatuhan terhadap tata kelola manajemen kelembagaan dan usaha koperasi
- c. Rendahnya produktivitas, akses permodalan dan pemasaran produk KUKM.
- d. Rendahnya kualitas SDM terhadap pengelolaan, keterampilan dan kewirausahaan KUKM.

Tantangan dalam pengembangan Koperasi UKM adalah

- a. Sumber daya manusia (SDM), terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas, berakibat pada pengelolaan koperasi yang belum menggunakan pendekatan manajemen usaha yang professional
- b. Kelembagaan, dari sisi kelembagaan koperasi khususnya pembentukan koperasi dan pembuatan akta, anggota maupun pengurus koperasi tidak menemui banyak kesulitan karena mudahnya prosedur namun akan kesulitan saat harus mengurus izin jika ingin masuk dalam lingkup bisnis yang lebih besar sebab harus berurusan dengan otoritas terkait, sehingga menurunkan motivasi dan kreativitas untuk mengembangkan kelembagaannya. Koperasi juga masih dipandang sebagai badan hukum/badan usaha yang bersifat sosial dan belum memandang koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis anggota yang berorientasi pada keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- c. Pembiayaan, perluasan akses dan skema pembiayaan/pendanaan koperasi masih terbatas pada sumber-sumber pembiayaan internal dan belum memanfaatkan skema pembiayaan eksternal yang lebih inklusif serta berbasis investasi.
- d. Produksi dan pemasaran, pada umumnya system produksi dan pemasaran koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan pasar, mengefisienkan rantai pasok, dan kebutuhan pelaku UMKM serta kurang tanggap atas pergerakan kebutuhan pasar sebagai dampak terjadinya perkembangan teknologi yang pesat.

Salah satu faktor keberhasilan suatu usaha adalah sumber daya manusia yang berkualitas dengan system manajemen pembagian tugas yang baik. Namun secara umum, kualitas pendidikan pengelola UMKM masih rendah menjadikan tantangan bagi pemerintah untuk memberikan bantuan bagi pelaku usaha, misalnya dengan memberikan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan.

UMKM di Indonesia memiliki karakteristik informal yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak adanya status badan hukum, tidak adanya system pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal yang terbatas dan keahlian yang terbatas, serta penggunaan teknologi yang masih sederhana. Mayoritas UMKM belum menggunakan komputer dan belum memanfaatkan internet serta belum

menjalin kemitraan dengan perusahaan besar atau dengan kata lain amsih sedikit UKM yang aik kelas sehingga menjadi salah satu tantangan terbesar saat ini.

## 2. Bidang Perindustrian

Isu strategis di bidang perindustrian adalah:

- a. Peningkatan kualitas SDM industri kecil menengah dalam hal skill, manajemen usaha dan akses terhadap permodalan,
- b. Peningkatan produktivitas dan pemasaran produk IKM baik pasar l73okal, regional, nasional dan internasional,
- c. Pengembangan sentra dan kluster industri di daerah,
- d. Penetapan Rencana Kawasan Industri Terpadu

## 3. Bidang Perdagangan

Isu strategis di bidang perdagangan adalah:

- a. Pelaksanaan operasi pasar
- b. Peningkatan infrastruktur
- c. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan konsumen,
- d. Peningkatan Kapasitas SDM Petugas Pengawas Perdagangan,
- e. Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku usaha ekspor
- f. Mewujudkan Masyarakat Yang Sadar Standar
- g. Belum baiknya system distribusi barang dan jasa
- h. Masih rendahnya akses pasar luar negeri.

Hal ini ditandai dengan masih panjangnya rantai distribusi barang, tingginya disparitas harga antar wilayah dan fluktuasi harga di tingkat konsumen dalam kondisi tertentu seperti pada saat hari besar keagamaan. Rendahnya akses pasar luar negeri merupakan dampak dari belum berkembangnya sistem informasi pasar termasuk rendahnya kemampuan pelaku usaha dalam mengakses pasar luar negeri, baik dari sisi kuantitas dan kualitas produk, promosi dan pemasaran (termasuk *market intelegent*), kapasitas usaha, dan permodalan sehingga belum mampu mengakselerasi peningkatan ekspor komoditi unggulan daerah.

- i. Belum membaiknya system distribusi barang ini merupakan dampak dari jaringan distribusi yang belum tertata dengan baik (sarana pasar dan infrastruktur transportasi),
- j. Belum transparannya ketersediaan pasokan di tingkat distributor dan agen,
- k. Terbatasnya sarana penyimpanan (pergudangan, silo, pendingin) di tingkat produksi.
- l. Kebijakan perdagangan antar pulau untuk mendukung peningkatan transaksi antar pulau yang belum sinergi baik antar provinsi maupun antar kawasan strategis di Sulawesi.
- m. Masih lemahnya pengamanan pasar dalam negeri, yang ditandai oleh lemahnya pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen.

#### **4. Bidang Pelayanan SKPD**

Isu strategis di bidang pelayanan SKPD adalah:

- a. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik SKPD yang ditandai dengan keterbatasan SDM aparatur baik dari sisi jumlah maupun kualitas
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi,
- c. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, evaluasi dan monev program baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja kelembagaan SKPD.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

##### **1. Tujuan**

- a. Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian
- b. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

##### **2. Sasaran Jangka Menengah SKPD**

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka sasaran pembangunan Dinas Kumperindag Tahun 2023 – 2026 meliputi:

- a. Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah), Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase), dan meningkatnya nilai ekspor (USD)
- b. Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

| No | TUJUAN   | INDIKATOR TUJUAN                                | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA  | FORMULASI INDIKATOR   | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- |              |              |              | Kondisi Akhir RPD Renstra |
|----|--|---|---|--|---|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
|    |  |   |   |  |   | 1                                     | 2            | 3            | 4            |                           |
| 1  | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan  | Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan | Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan                           | Nilai SAKIP  | Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja+ Evaluasi Internal + Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi | 74,5                                  | 74,68        | 74,88        | 75,05        | 75,05                     |
| 2  | Meningkatnya Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah, Lapangan Kerja Dan Daya Saing Perekonomian | Kontribusi Industri terhadap PDRB Nilai Ekspor  | Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah), Meningkatkan pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase), dan meningkatnya nilai ekspor (USD) | Jumlah Koperasi Berkualitas  | Koperasi Sehat Tahun-n  | 20                                    | 20           | 20           | 20           | 20                        |
|    |  |   | Jumlah UKM yang berdaya saing   | UKM naik kelas Tahun-n   | 60  | 70                                    | 80           | 90           | 300          |                           |
|    |  |   | Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah  | $\frac{(\text{Jumlah Industri Tahun } n - \text{Jumlah Industri Thn } n - 1)}{(\text{Jumlah Industri Tahun } n - 1) \times 100\%}$ | 0,78%   | 0,84%                                 | 0,90%        | 0,95%        | 0,95%        |                           |
|    |  |   | Jumlah Nilai Ekspor   | Nilai Ekspor Tahun-n   | \$14.102.573  | \$14.807.701                          | \$15.548.086 | \$16.325.490 | \$16.325.490 |                           |

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### A. Strategi dan Kebijakan SKPD

##### 1. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Strategi dan kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan kapasitas koperasi dan usaha kecil menengah sebagai berikut:

*Tabel 5.1. Strategi dan Kebijakan Bidang KUMKM*

| Strategi   | Kebijakan   |
|--|---|
| 1. Meningkatkan kapasitas usaha dan kelembagaan koperasi UKM | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas SDM koperasi dan pendampingan koperasi</li> <li>2. Peningkatan Kapasitas Usaha, akses pasar, akses pembiayaan dan penataan manajemen usaha</li> <li>3. Pengawasan, Pemeriksaan, Pengendalian serta Penilaian Kualitas dan Kesehatan Kelembagaan dan Usaha Koperasi</li> <li>4. Fasiltasi pembiayaan dan penguatan modal UKM, Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM serta Kelembagaan UKM</li> <li>5. Digitalisasi promosi, perluasan pemasaran dan pengembangan UKM (Integrasi UMKM Mart dan Toko Tani Indonesia</li> <li>6. Peningkatan produktifitas UKM (produksi, pemasaran, kelembagaan, kerjasama dan kemitraan)</li> </ol> |

##### 2. Bidang Perindustrian

Strategi dan kebijakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan industri kecil menengah adalah sebagai berikut:

*Tabel 5.2. Strategi dan Kebijakan Bidang Perindustrian*

| Strategi  | Kebijakan  |
|---|--|
| Menyiapkan desain perencanaan industri, melakukan pengendalian izin usaha industri, mengelola sistem informasi industri | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri (RPIP/RPIK) Tahun 2021-2041</li> <li>2. Fasilitasi Perolehan Izin dan pengawasan Usaha Industri</li> <li>3. Penyediaan Data Informasi Industri Berbasis Digital</li> </ol> |

### 3. Bidang Perdagangan

Strategi dan kebijakan dalam rangka meningkatkan nilai export dan perdagangan dalam negeri sebagai berikut:

Tabel 5.3. Strategi dan Kebijakan Bidang Perdagangan

| Strategi  | Kebijakan  |
|---|--|
| Peningkatan kelancaran arus barang, stabilisasi harga dan pasar                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dan Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok/Barang penting</li> <li>2. Pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan/ tertib niaga/ barang beredar dan jasa serta rekomendasi ekspo</li> <li>3. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen, pengawasan kegiatan perdagangan/tertib niaga/barang beredar dan jasa serta promosi penggunaan produk dalam negeri</li> </ol> |
| Perluasan kemitraan dan kerjasama internasional, Pameran dan misi dagang untuk mendorong ekspor | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pengembangan Pasar Tujuan Ekspor dan Optimalisasi Task Force Ekspor</li> </ol>   |
| Pengembangan usaha dan mutu pengolahan hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan        | <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peningkatan Layanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang</li> </ol>   |

### 4. Bidang Pelayanan OPD

Strategi dan kebijakan dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan sebagai berikut.

Tabel 5.4. Strategi dan Kebijakan Bidang Pelayanan OPD

| Strategi  | Kebijakan   |
|---|---|
| Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Reformasi Birokrasi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi dan penatausahaan daerah melalui pemanfaatan SIPD</li> <li>2. Transformasi digital dalam penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)</li> <li>3. Meningkatkan Sarana, Prasarana, SDM dan Administrasi Perkantoran</li> <li>4. Meningkatkan Tata Kelola Data Sektoral dan Keuangan</li> </ol> |

Untuk lebih lengkapnya dapat lihat dalam Tabel 5.24. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026 sebagai berikut.

Tabel 5.5. Rumusan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran yang mengacu Pada RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026

| Tujuan  | Indikator Tujuan  | Sasaran   | Indikator Kinerja Sasaran  | Strategi  | Kebijakan   |
|---|---|---|--|---|---|
| 1. Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian | 1. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB   | Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah), Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase), dan meningkatnya nilai ekspor (USD) | Persentase peningkatan kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah, pertumbuhan Industri Kecil Menengah dan nilai ekspor (USD) | Meningkatkan kapasitas usaha dan kelembagaan koperasi UKM | Peningkatan kapasitas SDM koperasi dan pendampingan koperasi                              |
|   |   |   |  |   | Peningkatan Kapasitas Usaha, akses pasar, akses pembiayaan dan penataan manajemen usaha   |
|   | Pengawasan, Pemeriksaan, Pengendalian serta Penilaian Kualitas dan Kesehatan Kelembagaan dan Usaha Koperasi   |   |  |   |   |
|   | Fasiltasi pembiayaan dan penguatan modal UKM, Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM serta Kelembagaan UKM |   |  |   |   |
|   | Digitalisasi promosi, perluasan pemasaran dan pengembangan UKM (Integrasi UMKM Mart dan Toko Tani Indonesia)  |   |  |   |   |
| 2. Nilai Ekspor   |   |   |  |   | Peningkatan produktifitas UKM (produksi, pemasaran, kelembagaan, kerjasama dan kemitraan) |

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | Menyiapkan desain perencanaan industri, melakukan pengendalian izin usaha industri, mengelola sistem informasi industry | Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri (RPIP/RPIK) Tahun 2021-2041  |
|  |  |  |  |   | Fasilitasi Perolehan Izin dan pengawasan Usaha Industri  |
|  |  |  |  |   | Penyediaan Data Informasi Industri Berbasis Digital  |
|  |  |  |  | Peningkatan kelancaran arus barang, stabilisasi harga dan pasar   | Pengawasan dan Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok/Barang penting  |
|  |  |  |  |   | Pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan/ tertib niaga/ barang beredar dan jasa serta rekomendasi ekspor Pelaksanaan Perlindungan Konsumen, pengawasan kegiatan perdagangan/tertib niaga/barang beredar dan jasa serta promosi penggunaan produk dalam negeri |
|  |  |  |  | Perluasan kemitraan dan kerjasama internasional, Pameran dan misi dagang untuk mendorong ekspor                         | Pengembangan Pasar Tujuan Ekspor dan Optimalisasi Task Force Ekspor  |
|  |  |  |  | Pengembangan usaha dan mutu pengolahan hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan                                | Peningkatan Layanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang  |

|   |  |   |  |   |   |
|---|--|---|--|---|---|
| 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan |  | Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan |  | Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Reformasi Birokrasi | Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi dan penatausahaan daerah melalui pemanfaatan SIPD |
|   |  |   |  |   | Transformasi digital dalam penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)                         |
|   |  |   |  |   | Meningkatkan Sarana, Prasarana, SDM dan Administrasi Perkantoran  |
|   |  |   |  |   | Meningkatkan Tata Kelola Data Sektoral dan keuangan   |

**BAB VI****RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Sebagaimana tertuang dalam RKPDP Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026, maka Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan selang 4 (empat) tahun, sebagai berikut:

1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  
Sub Kegiatan:  
Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel
2. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  
Sub Kegiatan:  
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
3. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
  - 1) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  
Sub Kegiatan:  
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
4. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM), dengan kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan  
Sub Kegiatan:
    - a. Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja,

- Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
- b. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan
5. Program Pengembangan UMKM, dengan kegiatan sebagai berikut:
- 1). Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
- Sub Kegiatan:
- a). Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
- b). Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM
6. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, dengan kegiatan:
- 1). Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi
- Sub Kegiatan:
- a). Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- 2). Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)
- Sub Kegiatan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
- 7 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, dengan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
- Sub Kegiatan:
- a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota

- b. Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 2) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya  
Sub Kegiatan:
  - a. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi
8. Program Pengembangan Ekspor, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - 1). Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi  
Sub Kegiatan:
    - a). Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
9. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - 1). Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan:
    - a). Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen
  - 2). Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan:
    - a). Verifikasi Mutu Produk
    - b). Pengembangan Layanan Pengujian
    - c). Pengembangan Layanan Sertifikasi
  - 3). Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan:
    - a). Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen
10. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, dengan kegiatan:
  - 1). Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi  
Sub Kegiatan:

- a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
  - b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
  - c. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
11. Program Pengendalian Izin Usaha Industri, dengan kegiatan:
- 1). Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi  
Sub Kegiatan:  
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
12. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, dengan kegiatan
- 1). Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)  
Sub Kegiatan:  
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
13. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan/Sub Kegiatan sebagai berikut:
- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:  
Sub Kegiatan:
    - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan:
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan:
  - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan:
  - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Sub Kegiatan:
  - a. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Secara lebih lengkap, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada pada Tabel 6.28. Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan yang mengacu pada RKPD 2023-2026 sebagaimana pada tabel 6.1 :

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  
DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI GORONTALO

| Tujuan   | Sasaran  | Kode        |                |   |                       | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)   | Satuan  | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |                |                |                |                |                |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                    | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab                        | Lokasi             |
|--|--|-------------|----------------|---|-----------------------|---|--|---|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--------------------|---|--------------------|
|  |  | Urusan Btd. | Urusan Program | Kegiatan  | Sub Kegiatan          |   |  |   |  | 2023  |                | 2024           |                | 2025           |                | 2026           |                | Target  | Rp                 |   |                    |
|  |  |             |                |   |                       |   |  |   |  | Target  | Rp             | Target         | Rp             | Target         | Rp             | Target         | Rp             |   |                    |   |                    |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan  | Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan                | 2           | 17             | 01  |                       | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan | %   |  | 100   | 16.252.559.818 | 100            | 22.926.912.612 | 100            | 18.510.095.991 | 100            | 18.602.374.870 | 100   | 76.291.943.291     | Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo |                    |
|  |  |             |                |   | 1.01                  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah   | Dokumen   | 10                                       | 1.565.800.000                                 | 10             | 1.665.800.000  | 10             | 1.765.800.000  | 10             | 1.865.800.000  | 10             | 6.863.200.000   | Provinsi Gorontalo |   |                    |
|  |  |             |                |   | 1.01                  | 01  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Dokumen                                  | 4   | 939.500.000    | 4              | 989.500.000    | 4              | 1.039.500.000  | 4              | 1.089.500.000  | 4   | 4.058.000.000      |   | Provinsi Gorontalo |
|  |  |             |                |   | 1.01                  | 07  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Laporan                                  | 6   | 626.300.000    | 6              | 676.300.000    | 6              | 726.300.000    | 6              | 776.300.000    | 6   | 2.805.200.000      |   | Provinsi Gorontalo |
|  |  |             |                |   | 1.02                  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangan  |   | 87                                       | 10.011.759.818                                | 87             | 10.306.112.612 | 87             | 10.609.295.991 | 87             | 10.921.574.870 | 87             | 41.848.743.291  |                    |   |                    |
|  |  |             |                |   | 1.01                  | 02  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | Orang/ Bulan                             | 87  | 9.811.759.818  | 87             | 10.106.112.612 | 87             | 10.409.295.991 | 87             | 10.721.574.870 | 87  | 41.048.743.291     |   | Provinsi Gorontalo |
|  |  |             |                |   | 1.02                  | 05  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                      | Laporan                                  | 1   | 200.000.000    | 1              | 200.000.000    | 1              | 200.000.000    | 1              | 200.000.000    | 4   | 800.000.000        |   | Provinsi Gorontalo |
|  |  |             |                |   | 1.05                  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan  | Orang   | 87                                       | 325.000.000                                   | 87             | 355.000.000    | 87             | 385.000.000    | 87             | 415.000.000    | 87             | 1.480.000.000   |                    |   |                    |
|  |  |             |                |   | 1.05                  | 09  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan   | Orang                                    | 87  | 325.000.000    | 87             | 355.000.000    | 87             | 385.000.000    | 87             | 415.000.000    | 87  | 1.480.000.000      |   | Provinsi Gorontalo |
|  |  |             |                |   | 1.06                  | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan  | paket   | 30                                       | 2.500.000.000                                 | 31             | 8.650.000.000  | 30             | 3.700.000.000  | 30             | 3.250.000.000  | 121            | 18.100.000.000  |                    |   |                    |
|  |  |             |                |   | 1.06                  | 02  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | Paket                                    | 30  | 2.500.000.000  | 31             | 8.650.000.000  | 30             | 3.700.000.000  | 30             | 3.250.000.000  | 121   | 18.100.000.000     |   | Provinsi Gorontalo |
|  |  |             |                |   | 1.08                  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Laporan   | 1  | 1.850.000.000                                 | 1              | 1.950.000.000  | 1              | 2.050.000.000  | 1              | 2.150.000.000  | 4              | 8.000.000.000   |                    |   |                    |
|  |  |             |                |   | 1.08                  | 03  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | Laporan                                  | 1   | 1.850.000.000  | 1              | 1.950.000.000  | 1              | 2.050.000.000  | 1              | 2.150.000.000  | 4   | 8.000.000.000      |   | Provinsi Gorontalo |
| Meningkatnya Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah, Lapangan Kerja dan Daya Saing Perekonomian | Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah), Meningkatkan industri hulu dan olahan (persentase), dan meningkatnya nilai ekspor (USD) | 2           | 17             | 03  |                       | <b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>  | Jumlah Koperasi Sehat  | Koperasi  | 20                                       | 400.000.000                                   | 20             | 412.000.000    | 20             | 424.360.000    | 20             | 437.090.800    | 60             | 1.673.450.800   |                    |   |                    |
|  |  |             |                |   | 1.01                  | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi   | Dokumen   | 20                                       | 400.000.000                                   | 20             | 412.000.000    | 20             | 424.360.000    | 20             | 437.090.800    | 80             | 1.673.450.800   |                    |   |                    |
|  |  |             |                |   | 1.01                  | 02  | Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel             | Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel | Unit Usaha                               | 20  | 400.000.000    | 20             | 412.000.000    | 20             | 424.360.000    | 20             | 437.090.800    | 80  | 1.673.450.800      | Provinsi Gorontalo (6 Kab/Kota)                                     |                    |
|  |  |             |                |   | 05                    | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>   | Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya  | Orang   | 390                                      | 1.514.280.000                                 | 390            | 1.714.280.000  | 390            | 1.914.280.000  | 390            | 2.114.280.000  | 390            | 7.257.120.000   |                    |   |                    |
|  |  |             |                |   | 1.01                  | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah SDM Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Latihan Perkoperasian   | Orang   | 390                                      | 1.514.280.000                                 | 390            | 1.714.280.000  | 390            | 1.914.280.000  | 390            | 2.114.280.000  | 390            | 7.257.120.000   |                    |   |                    |
|  |  |             |                |   | 1.01                  | 01  | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi  | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian  | Orang                                    | 390   | 1.514.280.000  | 390            | 1.714.280.000  | 390            | 1.914.280.000  | 390            | 2.114.280.000  | 390   | 7.257.120.000      | Provinsi Gorontalo (6 Kab/Kota)                                     |                    |
|  |  |             | 06             | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b> | Jumlah Koperasi Aktif | Unit Usaha  | 15   | 500.000.000   | 20                                       | 550.000.000                                   | 25             | 600.000.000    | 30             | 650.000.000    | 30             | 2.300.000.000  |                |   |                    |   |                    |

|   |    |    |      |  |   |  |                   |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |               |                        |
|---|----|----|------|--|---|--|-------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------|------------------------|
| 2                                       | 17 | 06 | 1.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Koperasi yang difasilitasi Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha   | Unit Usaha   | 15                | 500.000.000 | 20                    | 550.000.000 | 25                    | 600.000.000 | 30                    | 650.000.000 | 30                    | 2.300.000.000 |                        |
| 2                                       | 17 | 06 | 1.01 | 02   | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha  | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha  | Unit Usaha        | 15          | 500.000.000           | 20          | 550.000.000           | 25          | 600.000.000           | 30          | 650.000.000           | 30            | 2.300.000.000          |
| 2                                       | 17 | 07 |      |  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>   | <b>Jumlah UKM yang berdaya saing</b>   | <b>Unit Usaha</b> | <b>100</b>  | <b>3.250.000.000</b>  | <b>140</b>  | <b>3.630.000.000</b>  | <b>160</b>  | <b>4.010.000.000</b>  | <b>180</b>  | <b>4.390.000.000</b>  | <b>180</b>    | <b>15.280.000.000</b>  |
| 2                                       | 17 | 07 | 1.01 |  | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan  | Jumlah UKM yang meningkat kapasitas dan kompetensinya  | Unit Usaha        | 200         | 3.250.000.000         | 250         | 3.630.000.000         | 300         | 4.010.000.000         | 350         | 4.390.000.000         | 350           | 15.280.000.000         |
| 2                                       | 17 | 07 | 1.01 | 01   | Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan                        | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan  | Unit Usaha        | 200         | 1.300.000.000         | 250         | 1.550.000.000         | 300         | 1.800.000.000         | 350         | 2.050.000.000         | 350           | 6.700.000.000          |
| 2                                       | 17 | 07 | 1.01 | 02   | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan  | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan   | Orang             | 278         | 1.950.000.000         | 318         | 2.080.000.000         | 358         | 2.210.000.000         | 398         | 2.340.000.000         | 398           | 8.580.000.000          |
| 2                                       | 17 | 08 |      |  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>  | <b>Jumlah UKM yang bertransformasi usaha</b>   | <b>Unit Usaha</b> | <b>30</b>   | <b>1.000.000.000</b>  | <b>40</b>   | <b>1.200.000.000</b>  | <b>50</b>   | <b>1.350.000.000</b>  | <b>60</b>   | <b>1.550.000.000</b>  | <b>60</b>     | <b>5.100.000.000</b>   |
| 2                                       | 17 | 08 | 1.01 |  | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah  | Jumlah UMKM yang meningkat skala usaha menjadi usaha menengah  | Unit Usaha        | 30          | 1.000.000.000         | 40          | 1.200.000.000         | 50          | 1.350.000.000         | 60          | 1.550.000.000         | 60            | 5.100.000.000          |
| 2                                       | 17 | 08 | 1.01 | 01   | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi   | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi  | Unit Usaha        | 30          | 1.000.000.000         | 40          | 1.200.000.000         | 50          | 1.350.000.000         | 60          | 1.550.000.000         | 60            | 5.100.000.000          |
| <b>Jumlah Urusan Koperasi &amp; UKM</b> |    |    |      |  |   |  |                   |             | <b>22.916.839.818</b> |             | <b>30.433.192.612</b> |             | <b>26.808.735.991</b> |             | <b>27.743.745.670</b> |               | <b>107.902.514.091</b> |
| 3                                       | 30 | 02 |      |  | <b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>   | <b>Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi</b>   | <b>Dokumen</b>    | <b>2</b>    | <b>550.000.000</b>    | <b>2</b>    | <b>610.000.000</b>    | <b>2</b>    | <b>670.000.000</b>    | <b>2</b>    | <b>730.000.000</b>    | <b>8</b>      | <b>2.560.000.000</b>   |
| 3                                       | 30 | 02 | 1.02 |  | Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi | Dokumen           | 1           | 350.000.000           | 1           | 380.000.000           | 1           | 410.000.000           | 1           | 440.000.000           | 4             | 1.580.000.000          |
| 3                                       | 30 | 02 | 1.02 | 03   | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik  | Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission         | Dokumen           | 1           | 350.000.000           | 1           | 380.000.000           | 1           | 410.000.000           | 1           | 440.000.000           | 4             | 1.580.000.000          |
| 3                                       | 30 | 02 | 1.04 |  | Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)   | Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)   | Dokumen           | 8           | 200.000.000           | 9           | 230.000.000           | 10          | 260.000.000           | 11          | 290.000.000           | 38            | 980.000.000            |
| 3                                       | 30 | 02 | 1.04 | 01   | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA  | Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal  | Dokumen           | 8           | 200.000.000           | 9           | 230.000.000           | 10          | 260.000.000           | 11          | 290.000.000           | 38            | 980.000.000            |

M Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

|                                 |
|---------------------------------|
| Provinsi Gorontalo (6 Kab/Kota) |
| 6 Kab/Kota                      |
| Provinsi Gorontalo (6 Kab/Kota) |
| Provinsi Gorontalo              |
| 6 Kab/Kota                      |
| Provinsi Gorontalo              |

|                                  |    |    |      |  |   |   |              |           |                      |               |                      |               |                      |               |                      |               |                       |               |
|----------------------------------|----|----|------|--|---|---|--------------|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 3                                | 30 | 04 |      | <b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>   | <b>Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>   | <b>Laporan</b>  |              | <b>28</b> | <b>2.000.000.000</b> | <b>28</b>     | <b>2.320.000.000</b> | <b>28</b>     | <b>2.640.000.000</b> | <b>28</b>     | <b>2.960.000.000</b> | <b>112</b>    | <b>9.920.000.000</b>  |               |
| 3                                | 30 | 04 | 1.02 | Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Laporan   |              | 16        | 1.800.000.000        | 16            | 2.070.000.000        | 16            | 2.340.000.000        | 16            | 2.610.000.000        | 64            | 8.820.000.000         |               |
| 3                                | 30 | 04 | 1.02 | 01   | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota   | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota                                | Laporan      |           | 12                   | 200.000.000   | 12                   | 220.000.000   | 12                   | 240.000.000   | 12                   | 260.000.000   | 48                    | 920.000.000   |
| 3                                | 30 | 04 | 1.02 | 02   | Operasi Pasar dalam rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi            | Laporan      |           | 4                    | 1.600.000.000 | 4                    | 1.850.000.000 | 4                    | 2.100.000.000 | 4                    | 2.350.000.000 | 16                    | 7.900.000.000 |
| 3                                | 30 | 04 | 1.03 |  | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya  | Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya | Laporan      |           | 12                   | 200.000.000   | 12                   | 250.000.000   | 12                   | 300.000.000   | 12                   | 350.000.000   | 48                    | 1.100.000.000 |
| 3                                | 30 | 04 | 1.03 | 03   | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi   | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%   | Laporan      |           | 12                   | 200.000.000   | 12                   | 250.000.000   | 12                   | 300.000.000   | 12                   | 350.000.000   | 48                    | 1.100.000.000 |
| 3                                | 30 | 05 |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>   | <b>Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor</b>   | <b>Komoditi</b>   |              | <b>6</b>  | <b>650.000.000</b>   | <b>7</b>      | <b>750.000.000</b>   | <b>8</b>      | <b>850.000.000</b>   | <b>9</b>      | <b>950.000.000</b>   | <b>9</b>      | <b>3.200.000.000</b>  |               |
| 3                                | 30 | 05 | 1.01 |  | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi   | Jumlah Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi        | Pelaku Usaha |           | 6                    | 650.000.000   | 7                    | 750.000.000   | 8                    | 850.000.000   | 9                    | 950.000.000   | 30                    | 3.200.000.000 |
| 3                                | 30 | 05 | 1.01 | 03   | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan   | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan  | Pelaku Usaha |           | 6                    | 650.000.000   | 7                    | 750.000.000   | 8                    | 850.000.000   | 9                    | 950.000.000   | 30                    | 3.200.000.000 |
| 3                                | 30 | 06 |      | <b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>   | <b>Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen</b>  | <b>Dokumen</b>  |              | <b>5</b>  | <b>4.995.500.000</b> | <b>7</b>      | <b>6.185.500.000</b> | <b>9</b>      | <b>4.200.500.000</b> | <b>11</b>     | <b>4.240.500.000</b> | <b>32</b>     | <b>19.622.000.000</b> |               |
| 3                                | 30 | 06 | 1.01 |  | Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Penyelesaian Sengketa Konsumen   | Kasus        |           | 10                   | 1.920.000.000 | 11                   | 2.020.000.000 | 12                   | 2.120.000.000 | 13                   | 2.220.000.000 | 46                    | 8.280.000.000 |
| 3                                | 30 | 06 | 1.01 | 01   | Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen   | Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif   | BPSK         |           | 6                    | 1.920.000.000 | 6                    | 2.020.000.000 | 6                    | 2.120.000.000 | 6                    | 2.220.000.000 | 6                     | 8.280.000.000 |
| 3                                | 30 | 06 | 1.02 |  | Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk  | Dokumen      |           | 102                  | 2.775.500.000 | 153                  | 3.840.500.000 | 204                  | 1.730.500.000 | 255                  | 1.645.500.000 | 714                   | 9.992.000.000 |
| 3                                | 30 | 06 | 1.02 | 01   | Verifikasi Mutu Produk  | Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau   | Komoditi     |           | 3                    | 190.500.000   | 3                    | 190.500.000   | 3                    | 190.500.000   | 3                    | 190.500.000   | 3                     | 762.000.000   |
| 3                                | 30 | 06 | 1.02 | 02   | Pengembangan Layanan Pengujian  | Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang  | Dokumen      |           | 100                  | 2.110.000.000 | 150                  | 3.150.000.000 | 200                  | 1.065.000.000 | 250                  | 955.000.000   | 700                   | 7.280.000.000 |
| 3                                | 30 | 06 | 1.02 | 03   | Pengembangan Layanan Sertifikasi  | Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan   | Sertifikat   |           | 2                    | 475.000.000   | 3                    | 500.000.000   | 4                    | 475.000.000   | 5                    | 500.000.000   | 14                    | 1.950.000.000 |
| 3                                | 30 | 06 | 1.03 |  | Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi  | Pelaku Usaha |           | 30                   | 300.000.000   | 40                   | 325.000.000   | 50                   | 350.000.000   | 60                   | 375.000.000   | 180                   | 1.350.000.000 |
| 3                                | 30 | 06 | 1.03 | 01   | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi   | Laporan      |           | 12                   | 300.000.000   | 12                   | 325.000.000   | 12                   | 350.000.000   | 12                   | 375.000.000   | 48                    | 1.350.000.000 |
| <b>Jumlah Urusan Perdagangan</b> |    |    |      |  |   |   |              |           | <b>8.195.500.000</b> |               | <b>9.865.500.000</b> |               | <b>8.360.500.000</b> |               | <b>8.880.500.000</b> |               | <b>35.302.000.000</b> |               |

Dinas Koperasi UK

Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 Kab/Kota              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 Kab/Kota              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 Kab/Kota, Luar Daerah |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 Kab/Kota              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 Kab/Kota              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 Kab/Kota              |

|   |    |    |      |  |  |         |  |    |                |    |                |    |                |    |                |     |                 |            |  |  |
|---|----|----|------|--|--|---------|--|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|-----|-----------------|------------|--|--|
| 3   | 31 | 02 |      | <b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>  | Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri   | Dokumen |  | 36 | 2.192.873.743  | 36 | 2.246.659.955  | 36 | 2.302.059.754  | 36 | 2.359.121.547  | 144 | 9.100.714.999   |            |  |  |
| 3   | 31 | 02 | 1.01 | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi  | Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi   | Dokumen |  | 36 | 2.192.873.743  | 36 | 2.246.659.955  | 36 | 2.302.059.754  | 36 | 2.359.121.547  | 144 | 9.100.714.999   |            |  |  |
| 3   | 31 | 02 | 1.01 | 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri  | Dokumen |  | 12 | 780.555.808    | 12 | 803.972.482    | 12 | 828.091.657    | 12 | 852.934.407    | 48  | 3.265.554.354   | 6 Kab/Kota |  |  |
| 3   | 31 | 02 | 1.01 | 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat  | Dokumen |  | 12 | 1.012.317.935  | 12 | 1.042.687.473  | 12 | 1.073.968.097  | 12 | 1.106.187.140  | 48  | 4.235.160.645   |            |  |  |
| 3   | 31 | 02 | 1.01 | 06 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri  | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri   | Dokumen |  | 12 | 400.000.000    | 12 | 400.000.000    | 12 | 400.000.000    | 12 | 400.000.000    | 48  | 1.600.000.000   | 6 Kab/Kota |  |  |
| 3   | 31 | 03 |      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>  | Jumlah izin yang difasilitasi & dievaluasi   | Dokumen |  | 1  | 150.000.000    | 1  | 175.000.000    | 1  | 200.000.000    | 1  | 225.000.000    | 4   | 750.000.000     |            |  |  |
| 3   | 31 | 03 | 1.01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi   | Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi yang terfasilitasi  | Dokumen |  | 1  | 150.000.000    | 1  | 175.000.000    | 1  | 200.000.000    | 1  | 225.000.000    | 4   | 750.000.000     |            |  |  |
| 3   | 31 | 03 | 1.01 | 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi :<br>1) Industri Besar; dan<br>2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota,<br>3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi | Dokumen |  | 1  | 150.000.000    | 1  | 175.000.000    | 1  | 200.000.000    | 1  | 225.000.000    | 4   | 750.000.000     | 6 Kab/Kota |  |  |
| 3   | 31 | 04 |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>  | Jumlah informasi industri & fasilitasi pengolahan data industri  | Dokumen |  | 12 | 350.000.000    | 12 | 375.000.000    | 12 | 400.000.000    | 12 | 425.000.000    | 48  | 1.550.000.000   |            |  |  |
| 3   | 31 | 04 | 1.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)   | Jumlah Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)   | Dokumen |  | 12 | 350.000.000    | 12 | 375.000.000    | 12 | 400.000.000    | 12 | 425.000.000    | 48  | 1.550.000.000   |            |  |  |
| 3   | 31 | 04 | 1.01 | 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)   | Dokumen |  | 12 | 350.000.000    | 12 | 375.000.000    | 12 | 400.000.000    | 12 | 425.000.000    | 48  | 1.550.000.000   | 6 Kab/Kota |  |  |
| <b>Jumlah Urusan Perindustrian</b>  |    |    |      |  |  |         |  |    | 2.692.873.743  |    | 2.796.659.955  |    | 2.902.059.754  |    | 3.009.121.547  |     | 11.400.714.999  |            |  |  |
| <b>Total (Jumlah Urusan Koperasi &amp; UKM + Perdagangan + Perindustrian)</b> |    |    |      |  |  |         |  |    | 33.805.213.561 |    | 43.095.352.567 |    | 38.071.295.745 |    | 39.633.367.217 |     | 154.605.229.090 |            |  |  |

Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program dan kegiatan SKPD Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026, yang memuat Indikator Kinerja OPD mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026. Adapun indikator tujuan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran  
Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

| No. | TUJUAN   | SASARAN  | INDIKATOR               | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (2021) | KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD |
|-----|--|--|-------------------------|--|--------------------------------|
| 1   | Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat | Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian | Nilai Ekspor (Juta USD) | 13,2'  | 24,6                           |
| 2   | Terwujudnya Good and clean Government            | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan   | Nilai SAKIP             | B  | A                              |

Brdasarkan pada indikator kinerja dari tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana tabel diatas, maka indikator kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Utama  
Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo 2023-2026

| No | TUJUAN   | INDIKATOR TUJUAN                                | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- |       |       |       | Kondisi Kinerja Akhir RPD |
|----|--|---|---|-------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------------|
|    |  |   |   |                   | 1                                     | 2     | 3     | 4     |                           |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan | Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan | Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan | Nilai SAKIP       | 74,5                                  | 74,68 | 74,88 | 75,05 | 75,05                     |
| 2  | Meningkatnya Nilai                             | Kontribusi Industri                             | Meningkatnya kapasitas  | Jumlah Koperasi   | 20                                    | 20    | 20    | 20    | 20                        |

|   |                            |  |  |              |              |              |              |              |
|---|----------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Tambah Produk Unggulan Daerah, Lapangan Kerja Dan Daya Saing Perekonomian | terhadap PDRB Nilai Ekspor | Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah), Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase), dan meningkatnya nilai ekspor (USD) | Berkualitas                                    |              |              |              |              |              |
|   |                            |  | Jumlah UKM yang berdaya saing                  | 60           | 70           | 80           | 90           | 300          |
|   |                            |  | Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah | 0,78%        | 0,84%        | 0,90%        | 0,95%        | 0,95%        |
|   |                            |  | Jumlah Nilai Ekspor                            | \$14.102.573 | \$14.807.701 | \$15.548.086 | \$16.325.490 | \$16.325.490 |

Adapun Indikator Kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

1. Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan
2. Jumlah Koperasi Sehat
3. Jumlah SDM Koperasi yang Meningkatkan Kapasitasnya
4. Jumlah Koperasi Aktif
5. Jumlah UKM yang Berdaya Saing
6. Jumlah UKM yang Bertransformasi Usaha
7. Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi
8. Jumlah laporan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting
9. Jumlah Komoditi unggulan yang diekspor
10. Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen
11. Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri Jumlah Izin yang Difasilitasi dan dievaluasi
12. Jumlah izin yang difasilitasi dan dievaluasi
13. Pengelolaan sistem informasi industri yang tersedia

Untuk lebih jelasnya . Indikator Kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026 tertuang pada Tabel 7.3 dibawah ini :

Tabel 7.3. Indikator Kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026

| Kode    | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)   | Satuan     | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD | Target Capaian Setiap Tahun |         |         |         | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD |
|---------|--|--|------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|--|
|         |  |  |            |                                       | Tahun 1                     | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 |  |
| 2 17 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                    | Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan | Persen     |                                       | 100                         | 100     | 100     | 100     | 100                                    |
| 2 17 03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                              | Jumlah Koperasi Sehat  | Koperasi   |                                       | 20                          | 20      | 20      | 20      | 60                                     |
| 2 17 05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                             | Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya  | Orang      |                                       | 390                         | 390     | 390     | 390     | 390                                    |
| 2 17 06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                           | Jumlah Koperasi Aktif  | Unit Usaha |                                       | 15                          | 20      | 25      | 30      | 30                                     |
| 2 17 07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Jumlah UKM yang berdaya saing  | Unit Usaha |                                       | 100                         | 140     | 160     | 180     | 180                                    |

| Kode |    |    | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                       | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)         | Satuan     | Kondisi Kinerja Pada Awal | Target Capaian Setiap Tahun |    |    |    | Kondisi Kinerja Pada Akhir |
|------|----|----|---|--|------------|---------------------------|-----------------------------|----|----|----|----------------------------|
| 2    | 17 | 08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM   | Jumlah UKM yang bertransformasi usaha  | Unit Usaha |                           | 30                          | 40 | 50 | 60 | 60                         |
| 3    | 30 | 02 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                        | Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi                                    | Dokumen    |                           | 2                           | 2  | 2  | 2  | 8                          |
| 3    | 30 | 04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Laporan    |                           | 28                          | 28 | 28 | 28 | 112                        |
| 3    | 30 | 05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR   | Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor   | Komoditi   |                           | 6                           | 7  | 8  | 9  | 9                          |
| 3    | 30 | 06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                     | Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen                | Dokumen    |                           | 5                           | 7  | 9  | 11 | 32                         |
| 3    | 31 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                        | Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri                         | Dokumen    |                           | 36                          | 36 | 36 | 36 | 144                        |
| 3    | 31 | 03 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                            | Jumlah izin yang difasilitasi & dievaluasi   | Dokumen    |                           | 1                           | 1  | 1  | 1  | 4                          |
| 3    | 31 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL              | Jumlah informasi industri & fasilitasi pengolahan data industri                    | Dokumen    |                           | 12                          | 12 | 12 | 12 | 48                         |

## BAB VIII

### P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memiliki kedudukan sangat penting dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan selama 4 (empat) tahun ke depan yang memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

Sebagaimana Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021, bahwa Renstra PD Tahun 2023-2026 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Rencana jangka menengah dalam Renstra ini selanjutnya akan dijabarkan lagi ke dalam perencanaan jangka pendek atau tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk tahun 2023 hingga tahun 2026 dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Gorontalo dan mempertimbangkan perkembangan yang terjadi di setiap tahun. Dengan demikian penjabaran Renstra ke dalam Renja SKPD atau dokumen-dokumen perencanaan lain dapat bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan RKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo yang ditetapkan

Renstra Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Tahun 2023 – 2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan indikasi pendanaan SKPD, yang mengacu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026. Disamping itu, Renstra ini juga menyajikan data-data capaian kinerja pada RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2021 yang menggambarkan kondisi awal seluruh indikator kinerja, sebagai baseline dan *starting point* untuk mengukur keberhasilan program dan kegiatan SKPD selang empat tahun ke depan.

Semoga Dokumen Renstra ini bisa menjadi pedoman dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta sarana sinkronisasi program baik pusat, provinsi, kabupaten/kota, lintas sektor dan lintas pelaku, sekaligus menjadi

alat ukur pencapaian kinerja tahunan dan empat tahunan SKPD Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026.

Gorontalo, Mei 2022

**KEPALA DINAS**



**RISION SUNGE**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 196909241989021001**

**Daftar Aset Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Gorontalo**

| No. | Jenis Barang>Nama Barang                  | Luas (M2) | Tahun Pengadaan | Letak/ Alamat   | Penggunaan                                    | Keterangan   |
|-----|---|-----------|-----------------|---|---|--|
| 1   | 2   | 5         | 6               | 7   | 11  | 14   |
| 1   | Tanah<br>Bangunan<br>Kantor<br>Pemerintah | 15,424.00 | 2004            | Jl. Tengah<br>Desa Toto<br>Selatan Kec.<br>Kabila           | Dinas<br>Kopperindag<br>Provinsi<br>Gorontalo | Belanja Pengadaan<br>Tanah Tahap I Belanja<br>Pengadaan Tanah Tahap<br>II<br>Sertifikat Asli ada di<br>Dinas Keuangan dan Aset<br>Daerah Prov. Gorontalo |
| 2   | Tanah<br>Bangunan<br>Kantor<br>Pemerintah | 0         | 2004            | Jln Tengah<br>Desa Toto<br>Selatan                          |   |  |
| 3   | Tanah<br>Bangunan<br>Laboratorium         | 8,769.00  | 2004            | Jln<br>Tinaloga<br>Desa Toto<br>Utara Kec.<br>Kabila        | UPTD. Balai<br>Metrologi                      | Bukan Taman Wisata<br>Iluta, tetapi Taman<br>Wisata di Area KIAT<br>senilai Rp. 20.000.000   |
| 4   | Tanah<br>Lapangan<br>Taman lainnya        | 0         | 2007            | taman wisata<br>iluta                                       |   | Diperoleh dari<br>Pemerintah<br>Provinsi Sulawesi Utara,<br>Sertifikat di Dinas<br>Keuangan dan Aset<br>Provinsi Gorontalo                               |
| 5   | Tanah<br>Lapangan<br>lainnya              | 23,100.00 | 2013            | Kelurahan<br>Buliide  |   |  |
| 6   | Bangunan<br>Gedung Kantor<br>Permanen     | 15242     | 12/31/2005      | Jl. Tengah<br>Desa Toto<br>Selatan<br>Kab.Bone<br>Bolango   |   | Gedung Pusat Promosi<br>(Gedung Kantor Dinas<br>Kopperindag Provinsi<br>Gorontalo) Tahun 2005  |
| 7   | Taman lainnya                             | 8769      |                 | Jl.Tinaloga<br>Desa Toto<br>Selatan<br>Kab.Bone-<br>Bolango |   | Reklas Dari KIB B,<br>Bangunan Pagar UPTD.<br>Metrologi dan UPTD.<br>BPSMB Tahun 2005  |
| 8   | Bangunan<br>Gedung Kantor<br>Permanen     |           | 12/31/2006      | Jl.Tinaloga<br>Desa Toto<br>Utara Kab.<br>Bone<br>Bolango   |   | Gedung Kantor UPTD.<br>Metrologi Tahun 2006  |

| No. | Jenis Barang>Nama Barang        | Luas (M2) | Tahun Pengadaan | Letak/ Alamat                            | Penggunaan | Keterangan   |
|-----|---------------------------------|-----------|-----------------|--|------------|--|
|     |                                 |           |                 |  |            | Gedung UPTD. BPSMB (diperoleh awal Rp. 401.466.000,- tambahan rehab 2012 dikapitalisasi sebesar Rp. 218.997.500,-) Tahun 2006 Penyimpanan UPTD. Metrologi Tahun 2006 |
| 9   | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 8769      | 12/31/2006      | Jl.Tinaloga Desa Utara Kab. Bone Bolango |            | Gedung Pengolahan Bakso Ikan, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2006  |
| 10  | Bangunan Gudang Lain-lain (dst) | 66.5      |                 | Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango  |            | Gedung Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2006 Gedung Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2006  |
| 11  | Bangunan Gedung Pabrik Permanen | 108       |                 | Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango  |            | Gedung Pengolahan Cabe Bubuk, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2006<br>Gedung Pengolahan Jahe, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2006             |
| 12  | Bangunan Gedung Pabrik Permanen |           |                 | Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango  |            | Tempat Genset, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2007   |
| 13  | Bangunan Gedung Pabrik Permanen | 93.5      |                 | Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango  |            | Gedung Pengolahan Saos Tomat, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2007  |
| 14  | Bangunan Gedung Pabrik Permanen | 66.5      |                 | Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango  |            | Bangunan Pabrik VCO, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2007   |
| 15  | Bangunan Gedung Pabrik Permanen |           |                 | Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango  |            | Pembangunan Pagar Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2007  |
| 16  | Bangunan Fasilitas Umum         |           |                 |  |            | Gedung Hasil Produksi (untuk Kegiatan Fasilitas  |

| No. | Jenis Barang>Nama Barang   | Luas (M2) | Tahun Pengadaan | Letak/ Alamat                                  | Penggunaan | Keterangan  |
|-----|--|-----------|-----------------|--|------------|---|
|     | lainnya  |           |                 |  |            | Pengembangan Teknologi  |
| 17  | Bangunan Gedung Pabrik Permanen                                      | 87.5      |                 | Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango        |            | Inkubator Teknologi dan Bisnis) Tahun 2008                                  |
| 18  | Bangunan Gedung Pabrik Permanen                                      | 87.5      |                 | Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab. Bone Bolango |            | Gedung Laboratorium UPTD. Metrologi Dinas Kopperindag Provinsi Gorontalo    |
| 19  | Bangunan Pabrik VCO, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2007 | 89        |                 | Jl. Tinaloga Desa Toto Utara Kab. Bone Bolango |            | Gudang Arsip dan Inventaris Dinas Kopperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2013 |
| 20  | Bangunan Gudang Tertutup Permanen                                    | 70.5      |                 | Jl.Tinaloga Desa Toto Selatan Kab.Bone-Bolango |            | PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PELAYANAN TERA-TERA ULANG UPTD                 |
| 21  | Bangunan Fasilitas Umum lain   | 8769      |                 | Desa Toto Selatan, Kec. Kabila                 |            | PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG UPTD. METROLOGI                                |
| 22  | Bangunan Gedung Laboratorium Permanen                                | 63        |                 |  |            | PENGADAAN TEMPAT PARKIR UPTD. METROLOGI BELANJA MODAL                       |
| 23  | Bangunan Gudang Tertutup Permanen                                    |           |                 |  |            | GEDUNG DAN BANGUNAN BERUPA PEMBUATAN GARASI KENDARAAN KEPALA DINAS          |
| 24  | Bangunan Gedung Kantor Permanen                                      |           |                 |  |            |   |
| 25  | Bangunan Gedung Kantor Permanen                                      |           |                 |  |            | Pembangunan   |

| No. | Jenis Barang>Nama Barang         | Luas (M2) | Tahun Pengadaan | Letak/ Alamat | Penggunaan | Keterangan  |
|-----|----------------------------------|-----------|-----------------|---------------|------------|---|
| 26  | Gedung Garasi/Pool Permanen      |           |                 |               |            | Gedung Pabrik Es di Provinsi Gorontalo pada Kegiatan Pengembangan Industri Terpadu            |
| 27  | Gedung Garasi/Pool Permanen      |           |                 |               |            | PENGADAAN TAMAN KANTOR UPTD. METROLOGI  |
| 28  | Bangunan Gedung Pabrik Permanen  |           |                 |               |            | Pengadaan Backdropp   |
| 29  | Taman lainnya                    |           |                 |               |            | Pengadaan panggung  |
| 30  | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain |           |                 |               |            | Pembangunan Pagar Depan Kantor Pagar Kantor Keliling pengadaan lanjutan bangunan pagar kantor |
| 31  | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain |           |                 |               |            | PENGADAAN ETALASE PRODUK BER SNI UPTD. BPSMB Mutasi dari Nakertrans                           |
| 32  | Pagar Permanen                   |           |                 |               |            | Sesuai SK Status Pengguna Barang Nomor 198/20/IV/2016 Tanggal 14 April 2016                   |
| 33  | Taman lainnya                    |           |                 |               |            | Sesuai SK status pengguna barang nomor 198/20/IV/2016   |
| 34  | Pagar Permanen                   |           |                 |               |            | Sesuai SK status pengguna barang nomor 198/20/IV/2016 tanggal 14 april 2016                   |